

# **SKRIPSI**

## **KONSEP PAJAK**

### **DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM**

**MUHAMMAD ANWAR**



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2015**

**SKRIPSI**

**KONSEP PAJAK**

**DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ANWAR**

**A31110302**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2015**

**SKRIPSI**  
**KONSEP PAJAK**  
**DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM**

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ANWAR**

**A31110302**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 November 2015


Pembimbing I


  
Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM.  
NIP195912081986011003

Pembimbing II

  
Drs. Abdul. Rahman, MM., Ak., CA.  
NIP 196601101992031001

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196509251990022001



# SKRIPSI

## KONSEP PAJAK

### DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ANWAR**  
**A31110302**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **03 Desember 2015** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM.	Ketua	1 .....
2	Drs. Abdul Rahman, Ak., MM., CA.	Sekretaris	2 .....
3	Dr. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3 .....
4	Drs. Muh. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA.	Anggota	4 .....
5	Muhammad Irdam Ferdiansyah, S.E., M.Acc	Anggota	5 .....



Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 196509251990022001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Anwar  
NIM : A31110302  
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### KONSEP PAJAK DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makasar, 23 November 2015

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD ANWAR**

## KATA PENGANTAR

*Dengan nama Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang*

Segala puja dan puji peneliti panjatkan hanya kepada-Nya, Tuhan semesta Alam. Tertuang segala bentuk penyembahan, segala bentuk syukur, seluruhnya ditujukan kepada-Nya yang Maha Kuasa, dan dengan nama-Nya yang Maha Berilmu peneliti memohon dengan penuh harapan agar dikaruniahkan ilmu yang bermanfaat yakni ilmu yang mengangkat derajat peneliti sebagai seorang manusia. Salam penghormatan dan pemuliaan kepada pembawa risalah yang lurus Muhammad *Shallallahu'alahi wassallam* dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya.

Skripsi yang ada di depan Anda Ini merupakan buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga, dan pikiran bagi peneliti dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa (S1). Penulisan skripsi ini dilakukan bukan saja dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, tapi lebih dari itu awalnya rasa ingin tahu tentang konsep pendapatan negara yang dikehendaki dalam Islam. Hingga setelah konsultasi yang panjang lahirlah penelitian ini dengan judul konsep pajak dalam pandangan intelektual muslim. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa, mungkin peneliti tidak sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam penulisan karya ini.

Akhirnya di akhir tahun 2015 barulah peneliti dapat merampungkan karya ini. Olehnya untuk semua pihak yang telah membantu, dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan simbol penghormatan kepada mereka :

1. Kedua Orang tuaku yang saya hormati dengan penghargaan yang tinggi Bpk. Alimuddin dan Ibu Illang. Atas segala yang diberikan saya tak menemukan kalimat yang tepat untuk mewakili ucapan terima kasih dalam tulisan ini, karena saya merasa itu tak ternilai. Semoga Allah memberikan kekuatan untukku untuk bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan padamu berdua. Amin.
2. Pembimbing 1, Bapak Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak. Atas keikhlasannya dalam mengarahkan, membimbing dan nasihat-nasihat yang mencairkan daya pikir peneliti untuk melihat persoalan dengan baik, dan satu lagi atas buku-bukunya. Terus terang saja, banyak perubahan dalam diri peneliti atas pola bimbingannya mungkin ini karena pola bimbingannya yang secara tak langsung mengarahkan saya untuk membaca lebih dalam.
3. Pembimbing 2, Bapak Drs. Abdul Rahman, MM., AK., CA. atas semua bimbingan, keramahan, dan masukannya selama proses penyelesaian skripsi ini. Secangkir kopi di pagi hari dalam akhir-akhir penyusunan skripsi ini selalu teringat bersama dengan nasihat pribadi bapak. Insya Allah saya akan belajar lebih berani. Jangan lupa doanya pak.
4. Para Murobbiku seluruhnya yang telah menanamkan nilai kehidupan dalam diriku. Terima kasih tak terhingga atas segala ilmu, nasihat, saran dan inspirasinya.
5. Para intelektual Muslim yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, Prof Halide, Prof Arfin, Ustad Hamid Habbe, Ustd. Idris, Firman Menne, Mukhlis Supri, Mudzakkir Arif, Ustad Rahman Abdurrahman,

dan pak Alimuddin atas segala keramahannya bersedia memberikan waktu untuk bertukar pikiran dalam memaknai pajak.

6. Ibu Rahmawati HS, SE., M.Si. yang selama ini berperan sebagai PA (Penasehat Akademik) saya di FE-UH. Akhirnya bisa selesai juga skripsinya bu.
7. Para Pustakawan di Perpus Ekonomi Unhas, Perpus pusat Unhas, perpus UIN Alauddin, dan perpus pusat Pangkep. Secara khusus untuk Ibu Susi dan Ibu Zaida di perpus ekonomi, terima kasih banyak atas keramahan dan banyak kemudahan yang diberikan untuk peneliti.
8. Para Ustad di PPMI Showatul Is'ad yang telah memberikan banyak dukungan terlebih izin yang sebelumnya yang diberikan untuk menempuh kuliah ini.
9. Direktur utama PT. Nurimu Tour and Travel Ibu Atiek Jasnuddin, yang telah menerimaku sebagai bagian dari perusahaannya selama setahun penuh, tip-tip khusus ibu tak terlupakan.
10. Direktur utama PT. BMC Money Changger Bpk. Masrur Makmur Latanro, dan segenap karyawan yang telah menemani kehidupanku sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang karyawan. Bekerja di tempat ini telah memberikan pengalaman berharga dan tak terlupakan.
11. Untuk kawan-kawanku, yang tidak kurang sebagai saudara-saudaraku sendiri kanda Nur, kanda Salman, Ilman, Idris, Yusmawan, Wahyudi, Hambali, Manggala Putra, Wawan, juga ikhwa teman-teman kajian dan kanda Ilham yang telah setiap menemani dalam wawancara selama penelitian ini.



12. Kepada seluruh keluargaku di rumah yang tak mungkin disebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan doannya. Secara khusus kepada kakakku Safaruddin, terima kasih banyak atas segala bantuannya selama ini,
13. Untuk saudara-saudaraku ikhwan di MPM Unhas dan MDI, menjadi anggota dalam barisan ini sangat berkesan dalam hidupku sebagai seorang mahasiswa.

Peneliti

Muhammad Anwar

## ABSTRAK

### Konsep Pajak dalam Pandangan Intelektual Muslim *Tax Concept in Muslim Intellectual Perspectives*

Muhammad Anwar  
Alimuddin  
Abd. Rahman

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Dalam konteks modern penerimaan pajak menjadi semakin dominan sehingga tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pajak dalam pandangan intelektual Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur karya intelektual muslim. Adapun wawancara yaitu melakukan wawancara langsung kepada kalangan intelektual muslim dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terjadi perbedaan pandangan di kalangan intelektual muslim atas pajak. Sebagian intelektual muslim memandang bahwa pajak tidak dapat diterima sebagai pendapatan negara dan sebagian yang lain memandang bahwa pajak dapat diterima sebagai pendapatan negara dengan pertimbangan kemaslahatan meskipun demikian intelektual muslim yang setuju dengan pajak tidak memandang bahwa pajak dapat ditarik oleh pemerintah dengan sewenang-wenang tanpa rambu-rambu syariah.

**Kata kunci:** *Konsep pajak, Intelektual Muslim, Pertimbangan kemaslahatan*

*Tax is one of state revenue sources that has an important role in supporting the wheel of government and development financing. In the modern context of tax revenue becomes dominant increasingly so that a large part of the state activities difficult to implement without tax. This study aims to determine the tax concept in perspectives of Muslim intellectuals. This research is a type of qualitative research and the method of data collection is done by the literature research and interviews. The literature research is the way to learn, explore, and cite theories or concepts from a number of literary of Muslim intellectual works. The interview is conducted by interviewing directly to Muslim intellectuals to ask questions to obtain information. The result of research showed that there was perspective disagreements among Muslim intellectuals on tax. A part of Muslim intellectuals view that tax can not be accepted as state income and others consider that tax revenue can be accepted as state income with the maslahah considerations, notwithstanding Muslim intellectuals who agree with tax do not view that the tax may be withdrawn by the government arbitrarily without sharia signs.*

**Keyword:** *The concept of tax, Muslim intellectuals, Maslahah consideration*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR ISTILAH .....	xv
 <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>14</b>
2.1 Tinjauan Tentang Pajak dalam Islam .....	14
2.1.1 Definisi Pajak .....	14
2.1.2 Karakteristik Pajak .....	19
2.1.3 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	19
2.1.4 Tujuan Penggunaan Pajak.....	21
2.1.5 Teori Pemungutan Pajak .....	22
2.2 Tinjauan Tentang Intelektual Muslim .....	24
2.2.1 Definisi Intelektual Muslim.....	24
2.2.2 Ciri-ciri Intelektual Muslim .....	25
2.2.3 Jenis-jenis Intelektual .....	30
2.2.4 Peran Intelektual Muslim .....	31
 <b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33

3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.2.1 Jenis Data.....	33
3.2.2 Sumber Data .....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	34
3.5 Metode Analisis Data .....	35
3.7 Batasan Pembahasan .....	36
<b>BAB IV EKSISTENSI PAJAK SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA</b>	
<b>DALAM ISLAM .....</b>	<b>37</b>
4.1 Historitas Pajak dalam Islam .....	37
4.2.1 Pajak pada Masa Awal Islam.....	38
4.1.2 Pajak pada Masa Pemerintahan Pasca <i>Khulafaur</i> <i>Rasyidin</i> .....	41
4.1.3 Pajak dalam Dunia Islam Modern.....	44
4.2 Konsep Pajak pada Masa Awal Islam .....	45
4.3 Legitimasi Syariah Atas Adanya Pajak Baru dalam Islam.....	50
4.3.1 Eksistensi <i>Dharibah</i> (Pajak) dalam Sumber Hukum Islam.....	51
4.3.2 Kaidah Hukum Syariah untuk Legalitas Pajak <i>Syariah</i> ..	54
4.3.4 Eksistensi Pajak yang tak Lepas dari Perbedaan Pendapat.....	57
4.4 Relavansi <i>Maqashid Syariah</i> dengan Pajak Darurat .....	59
4.4.1 Konsep <i>Maqashid Syariah</i> .....	59
4.4.2 Pajak dengan Pendekatan <i>Maqashid Syariah</i> .....	61
<b>BAB V ANALISIS KONSEP PAJAK DALAM PANDANGAN</b>	
<b>INTELEKTUAL MUSLIM .....</b>	<b>66</b>
5.1 Keberadaan Pajak dalam Pandangan Intelektual Muslim.....	67
5.1.1 Pemaknaan Pajak .....	67
5.1.2 Problematika Atas Pemaknaan Pajak .....	71
5.2 Abtraksi Pemikiran Intelektual Muslim terhadap Sistem Perpajakan Modern .....	80

5.3 Penerapan Pajak ( <i>Dharibah</i> ) dalam Masyarakat Muslim: Refleksi Intelektual Muslim atas adanya Pajak Baru.....	98
5.3.1 Adaptasi terhadap Perubahan Situasi dan Kondisi .....	98
5.3.2 Dekonstruksi Pajak: Sebuah Gelombang Kesadaran Ekonomi Islam.....	100
5.3.3 Jalan terakhir dalam Pemenuhan Kas Negara: Pajak <i>Syariah</i> .....	104
5.3.4 Prioritas Penggunaan Uang Pajak Darurat ( <i>Dharibah</i> )	111
5.4 Keberatan terhadap Konsep Pajak Modern sebagai Pendapatan Negara: Refleksi 'Ketidaksetujuan' Intelektual Muslim .....	115
5.4.1 Kewajiban Utama Umat Islam atas Harta hanyalah Zakat .....	115
5.4.2 Konsep Pajak <i>Dharibah</i> berbeda dengan Pajak ( <i>tax</i> ) Modern .....	118
5.4.3 Mengapa Harus Pajak menjadi Solusi Sumber Pembiayaan Negara .....	122
5.4.4 Pengaruh Sekularisme dalam Pendapatan Negara (Refleksi Pembebanan Pajak) .....	124
5.4.5 Kedzaliman dalam Tubuh Perpajakan .....	130
5.4.6 Sebuah Pintu untuk Pendapatan Non-halal.....	134
5.4.7 Penghindaran Pajak Modern Upaya Perlindungan Harta.....	135
5.5 Akuntansi Perpajakan: Refleksi Kebutuhan Keuangan Dunia Islam .....	136
5.5.1 Akuntansi sebagai Bagian dari Sistem Islam yang Kompleks .....	136
5.5.2 Harmonisasi Akuntansi Islam dan Pajak Islam ( <i>dharibah</i> ) .....	137
5.5.3 Sistem Audit dalam Pajak Islam.....	139
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>142</b>
6.1 Penutup .....	142
6.2 Saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Pemasukan Negara di Masa Rasulullah <i>Shallallahu'alahi wasallam</i> .....	2
Tabel 1.2	Jenis dan Tarif Pajak di beberapa Negeri Muslim.....	8
Tabel 2.1	Perbedaan Subjek dan Objek antara Pajak, <i>Jizyah</i> dan <i>Kharaj</i> ..	15
Tabel 5.1	Perbedaan Pandangan Intelektual Muslim atas Pemungutan Pajak dan Pertimbangannya.....	92

## GLOSORIUM

Asnaf	: Penerima zakat. Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 menetapkan ada delapan <i>asnaf</i> yakni fakir, miskin, amil (pegawai) zakat, orang yang berutang, musafir, orang yang baru masuk Islam, biaya pembebasan budak dan <i>sabilillah</i>
Baitul mal	: Pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran
Batil	: Sesuatu yang tidak benar
Dekonstruktif	: Istilah untuk "membongkar" keamanan teori yang dianggap menindas
<i>Derivasi</i>	: Perubahan proses
<i>Diabolic</i>	: Kecerdasan yang mengarah kepada perlawanan pada kebenaran (penyesatan)
<i>Dharibah</i>	: Beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslimin setelah adanya beban pertama (zakat) harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangkai memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas baitul mal) serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut. Adapun diwajibkan atas baitul untuk (1) pembiayaan jihad baik aspek pembentukan, pelatihan dan persenjataanya (2) pembiayaan orang-orang fakir, miskin dan <i>ibnu sabil</i> termasuk didalamnya pembiayaan untuk gaji/upah pasukan, pegawai negara, qadhi, pengajar dan selain mereka yang memberikan pelayanan kemasyarakatan(3) pembiayaan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, memberikan layanan umum serta hal-hal yang sangat vital bagi kaum Muslimin, seperti jalan umum, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, Masjid, pemenuhan air dan sebagainya. Diwajibkan bagi Baitul Mal untuk memenuhi hal tersebut baik ada atau tidak adanya harta, apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, kewajiban beralih kepada kaum Muslimin dengan diwajibkannya <i>dharibah</i> .
<i>Dharuriyat</i>	: Kebutuhan yang sifatnya mendasar dan harus ada dalam suatu kehidupan guna menjalankan aktivitas kehidupan. Sehingga menjadi salah satu tingkatan

kemaslahatan yang paling penting (kebutuhan primer)

<i>Doif</i>	: Lemah
<i>Doktrin</i>	: Pengetahuan yang bercorak ideologis, normatif tentang 'bagaimana seharusnya', yang objeknya adalah keseluruhan nilai seperti keadilan, kemanusiaan, kasih sayang dll.
<i>Dominasi</i>	: Sebuah bentuk penaklukan atau penguasaan baik dalam ideologi, agama, kebudayaan, dan wilayah dengan maksud agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau sosial berupa kekuasaan.
<i>Dzalim</i>	: Bermakna lawan dari adil, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pemimpin yang buruk, yang memerintah dengan dzalim berarti menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak rakyat dan berbuat semena-mena.
Eksistensi	: Keseluruhan realitas yang "ada", disebut sebagai "keberadaan".
<i>Falah</i>	: Sebuah kata yang di dalamnya terkandung makna kemenangan, keberuntungan, kemakmuran, sukses, tercapai sesuatu yang dicari-cari seseorang, keselamatan, keamanan yang terus menerus atau tetap dalam kebaikan dan kemakmuran
<i>Fai</i>	: Harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.
Feodalisme	: Sebuah sistem dimana hubungan sosial, lembaga sosial, politik dan ekonomi terpola menurut 'kelas-kelas'. Sistem ini bercorak sentralisasi kuasa pada segelintir penguasa tanah (disebut sebagai tuan tanah, tuan tanah memberikan keamanan dan upah sedangkan petani memberikan kesetiaan.
Fitrah	: Sesuatu yang suci melekat pada diri manusia, yang dibawa secara bathin sejak lahir sebagai sebuah potensialitas yang siap mengaktual di alam.
<i>Fuqaha</i>	: Para Ulama yang ahli di bidang fiqh
<i>Fiqh</i>	: Hasil Ijtihad para alim ulama terdahulu
<i>Ghanimah</i>	: Harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir, melalui peperangan.



Harmonisasi	: Upaya penyelarasan
<i>Haq</i>	: Kebenaran berdasarkan Islam
<i>Hedonisme</i>	: Sebuah paham yang lebih berorientasi pada kebebasan dan kesenangan fisik dan mengabaikan dimensi-dimensi kehidupan lainnya seperti spiritual
Hegemoni	: Penguasaan dengan cara halus tanpa ancaman kekerasan. Ide-ide didiktekan dan diterima secara pasif bahkan dilegitimasi secara moral.
<i>Hilli walqdi</i>	: <i>Hilli walaqdi</i> merupakan kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik
<i>Hijayyah</i>	: Kebutuhan yang sifatnya bukan sesuatu yang mendasar akan tetapi memudahkan aktivitas kehidupan
Holistik	: Suatu cara pandang yang melihat sesuatu secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek dari berbagai segi
<i>Homo Islamicus</i>	: Model manusia yang sesuai dengan cetak biru penciptanya
<i>Homo Economicus</i>	: Model manusia yang dalam melakukan tindakan ekonomi didorong oleh kepentingan sendiri
Ibadah	: Terma yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Rabb, baik dalam hati, ucapan, dan perbuatan
<i>Ibnu Sabil</i>	: Musafir
Ideologi	: Segenap keyakinan sekaligus cita-cita yang mengarahkan untuk bertindak dan menjawab persoalan-persoalan sosial secara normatif.
<i>Ijma</i>	: Kesepakatan para ulama mengenai hukum sesuatu hal
<i>Ijtihad</i>	: Usaha yang dilakukan oleh para ahli dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya kemampuan ruhani dan akal pikiran rasional,

mengenai masalah keislaman dengan berdasarkan al-Quran dan Hadist shahih dengan Qiyas (analogi) yang tepat.

- Infaq* : Salah satu bentuk pengeluaran harta karena Allah. Sebagaimana zakat, infaq merupakan bagian dari shadaqah. Dengan kata lain, shadaqah terbagi menjadi dua atau mempunyai dua bentuk yakni zakat dan infaq. Bedanya dengan zakat adalah, infaq tidak dikeluarkan berdasarkan waktu maupun persentase tertentu
- Intelektual : : Cendikiawan atau orang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki daya akal budi serta totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pengertian atau pemahaman
- Intelektual muslim : Para cendikiawan yakni golongan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama dan mampu menteorisasikannya dalam kehidupan. Makna intelektual lebih ditekankan pada sikap dan spirit untuk memperjuangkan eksistensi keilmuan, kebenaran dan kejujuran melalui ucapan, pemikiran, ide maupun performance dan dedikasinya terhadap masyarakat. intelektual Muslim berperan mengembang amanah sebagai orang yang berpihak kepada kebenaran sebagaimana kebenaran yang terkonsep dalam Islam dalam menyelesaikan problematika masyarakat.
- Islamisasi : Pada awalnya diartikan sebagai sebuah bentuk pembebasan manusia menuju konsep Islam. Namun Islamisasi berkembang sebagai istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mensitesakan antara etika islam dengan berbagai bidang pemikiran modern.
- Jahil* : Bodoh, terutama tentang ajaran agama
- Jahiliyyah* : Suatu kondisi untuk menggambarkan realitas masyarakat yang belum mendapatkan ilmu (petunjuk) atau *jahil*
- Jizyah* : Sesuatu yang diwajibkan terhadap individu dari golongan ahlu *dzimmah* (non muslim) yang tinggal di dalam kekuasaan Islam dan telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dalam definisi lain *jizyah* juga ditafsirkan sebagai suatu pajak yang ditentukan atas tiap kepala (individu) yang secara

langsung meminta perlindungan pada hukum negara Islam.

<i>Kaffah</i>	: Menyeluruh
Kapitalisme	: Sebuah sistem politik dan ekonomi yang bercorak liberal-individualisme, norma utamanya adalah kepemilikan swasta sehingga secara ideologis menciptakan keberpihakan kepada penguasa modal sebagai jalan menuju kesejahteraan.
Kausalitas	: Proses keterhubungan realitas yang berbeda dalam pola sebab-akibat.
Kemaslahatan	: Titik tolak, dasar utama, dan tujuan diturunkannya syariat dan teks. Kemaslahatan juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi manusia mencakup dunia dan akhirat
<i>Khalifah</i>	: Penguasa atau pengganti penguasa. Khalifah Allah adalah umat manusia yang diberi kemampuan dan wewenang untuk mengatur tata kehidupan dunia demi keserasian dan kelestariannya, sejalan dengan ajaran-Nya
<i>Kharaj</i>	: Pajak atas tanah taklukan dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam atas tanah yang dimanfaatkan hal ini karena konsep kepemilikan tanah taklukan menjadi milik umat Islam
<i>Khulafaurasyidin</i>	: Pengganti Rasul yang benar dan lurus dan diterima oleh seluruh umat. Empat Khalifah yang mendapatkan julukan khulafaurasyidin adalah empat khalifah awal yang berturut-turut.
Kolonialisme	: Pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut.
Konsep	: Abstraksi pemikiran, gagasan, ide atau gambaran mental tentang sesuatu objek yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol
<i>Laizzes faire</i>	: Doktrin tentang kebebasan pasar. Dimana tidak ada campur tangan pemerintah di dalam kegiatan pasar atau ekonomi

Legitimasi	: Kualitas suatu hukum dapat diterima dalam masyarakat
<i>Mahdah</i>	: Jenis ibadah yang telah ditentukan tata cara pelaksanaannya
<i>Maqashid</i>	: Terma yang digunakan untuk menyebut tujuan diturunkannya syariat mencakup semua perkara untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda
Materialisme	: Madzhab pemikiran yang menganggap materi sebagai tujuan
<i>Maslahah Mursalah</i>	: Kemaslahatan umum
Modern	: Kemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata
Modernisasi	: Suatu bentuk proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju
<i>Mudharat</i>	: Sesuatu yang membahayakan bagi manusia
<i>Muks</i>	: Pajak berupa pungutan yang ditarik secara dzolim disertai unsur kekerasan dan paksaan. Beberapa ulama memaknainya sebagai pungutan yang diambil dari masyarakat tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan. <i>Al-muks</i> juga bisa digunakan untuk menyebut orang-orang yang mengambil zakat secara tidak adil seperti menarik zakat melebihi takaran yang seharusnya, menggunakan uang zakat untuk kepentingan pribadinya.
<i>Muzakki</i>	: Seorang wajib zakat
Profetik	: Konsepsi yang terkait dengan tugas-tugas kenabian.
<i>Rahmatan lil alamin</i>	: Misi Islam sebagai rahmat bagi keseluruhan alam.
Rasionalisme	: Doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika dan analisis yang berdasarkan fakta.
Relatif	: Sesuatu yang memiliki sifat dapat berubah.
Realitas	: Suatu kenyataan atau fakta yang didapatkan manusia dari lingkungan di sekitarnya. Realitas juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang

	bisa ditangkap dan disadari keberadaannya oleh manusia
Refleksi	: Kegiatan berupa penilaian tertulis maupun lisan berisi ungkapan harapan serta kritik membangun
<i>Renaissance</i>	: Berhubungan dengan warisan filsafat klasik model yang berpengaruh adalah sains modern. Sains yang diciptakan newton memberikan model bagi semua pengetahuan manusia
Sekularisme	: Doktrin yang menolak nilai-nilai agama dalam urusan manusia dengan kata lain agama tidak boleh mengintervensi urusan manusia
<i>Siyasah syar'iyyah</i>	: Pengaturan kemaslahatan manusia sesuai dengan tuntunan syariah
<i>Shadaqah</i>	: Sedekah; bentuk umum bagi pengeluaran harta maupun nonharta yang dimaksudkan untuk meringankan beban orang lain atau untuk menyenangkanya. Sedekah terbagi menjadi dua yakni infaq dan zakat
<i>Shabul Muks</i>	: Para pemungut <i>muks</i> (pajak dzalim) yakni orang-orang yang mengambil harta manusia apa yang tidak secara syaria mengeluarkan
Sosialisme	: Sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial melalui penghapusan milik pribadi dan swasta menjadi milik publik
Spiritualitas	: Proses perjalanan (bathin) makhluk menuju realitas transendental (sebagai realitas hakiki, melampaui realitas fisik).
<i>Spiritual value added</i>	: Nilai tambah spiritual sebagai sebuah kesadaran psikologik berupa altruisme atas keputusan pendistribusian nilai lebih.
Syariah	: Peraturan yang datang dari Allah baik melalui Alquran, Sunnah Nabi-Nya maupun ikutan dari keduanya yakni <i>Ijma</i> dan <i>Qiyas</i>
Swastanisasi	: Denasionalisasi dari suatu industry, merubahnya kepemilikan dari kepemilikan pemerintah ke pemilikan perorangan (swasta)
<i>Tahsinayat</i>	: Kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap dan bersifat mewah

Universalitas	: Menunjuk pada realitas yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak pula dibatasi oleh ruang. Menunjuk pada konsepsi tentang keseluruhan.
Upeti	: Uang atau barang yang diberikan kepada raja oleh rakyat sebagai persembahan
<i>Usrh</i>	: Pajak perdagangan atau bea cukai yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan
<i>Waqaf</i>	: Memindahkan milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah
<i>Worldview</i>	: Teori pandangan hidup (cara melihat kehidupan) yang menjadi asas bagi setiap perilaku manusia
Zakat	: Kewajiban seorang muslim atas harta yang mencapai <i>nishab</i> dengan kadar dan ketentuan tertentu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Astrini, 2012 : 1-2). Di masa kini, pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi negara, mengingat semakin bertambahnya pegawai negara, dan juga bertambahnya kewajiban serta tanggung jawab negara di bidang ekonomi maupun sosial (Rayyan, 1999) dalam (Hakim, 2011: 2). Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai adanya pungutan pajak pada suatu negara, sebagian ada yang membenarkan dan sebagian lagi adayang mengharamkan, dengan berbagai landasan hukum dalil Quran dan hadits yang mendasari masing-masing pendapat.

Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran tentang kebijakan publik telah dimulai sejak awal kehadiran Islam. Dalam hal pembiayaan negara, Islam mempunyai sejarah tersendiri yang menarik, keuangan publik berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dan di teruskan oleh *Khulafaurrasyidin* (Islahi, 1997 : 249).

Pendapatan negara Islam Madinah masa Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya dapat dibagi atas pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer dapat dikatakan sebagai pendapatan wajib yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin dan pendapatan sekunder diperoleh tergantung situasi dan kondisi yang ada (Sudarsono, 2003:120) dalam (Gusfahmi, 2007: 62-63).

Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu pendapatan resmi negara dan pendapatan tidak resmi negara (Azmi, 2005:89) dalam (Gusfahmi, 2007: 84). Pendapatan tidak resmi negara, terdiri dari *ghanimah* dan shadaqah. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena diperuntuhkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun negara bertanggung jawab atas pengumpulannya (*amil*). Namun negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut (tujuan zakat dan *ghanimah*). Sementara pendapatan resmi negara diperuntuhkan untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya (Gusfahmi, 2007:84).

Berikut adalah beberapa pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam:

**Tabel 1.1**

**Sumber Pemasukan Negara di Masa Rasulullah Shallallahu'alahi wasallam**

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	<i>Ghanimah</i>	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	<i>Zakat</i>	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	<i>Ushr - Shadaqah</i>	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/ dagang	Tetap	8 Kelompok
4	<i>Jizyah</i>	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	<i>Kharaj</i>	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	<i>Ushr - Bea Cukai</i>	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	<i>Waqaf</i>	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	<i>Dharibah (Pajak)</i>	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Sumber: Gusfahmi (2007:86)



Dalam ekonomi Islam pajak dikenal dengan istilah *dharibah*<sup>1</sup>. Terjadi perbedaan pendapat mengenai adanya pungutan pajak tersebut, Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadist dari Rasulullah *Shallallahu‘alihi wasallam*. Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Thalhah r.a;

“Seorang laki-laki penduduk Najd datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan nabi Saw. Ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Lalu ia bertanya: Apakah ada kewajiban lain diluar zakat ? beliau menjawab “ tidak ada kecuali shadaqah”. lalu ia mundur sambil berkata; saya tidak akan menambah atau mengurangnya. Kemudian Rasulullah Saw. berkata “beruntunglah jika ia benar (maka ia akan masuk surga)” (H.R. Bukhari).

Sebagian juga mengatakan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan saat ini merupakan kezoliman, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* tidak membiarkan manusia saling mendzolimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan dzolim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya.<sup>2</sup> Yang didasarkan pada firman Allah :

---

<sup>1</sup> Berasal dari kata kerja *dharaba* yang berarti mewajibkan, menentukan, dan membebaskan. sedangkan bentuk kata bendanya adalah *dharibah* yang berarti beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan) yang berat (Gusfahmi, 2007: 25)

<sup>2</sup> Dzalim bermakna lawan dari adil, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pemimpin yang buruk, yang memerintah dengan dzalim berarti menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak rakyat dan berbuat semena-mena. Kezoliman adalah sebuah dosa dan kezaliman terbesar dalam kehidupan adalah menyekutukan Allah Ta’ala. Lihat: Yazid Bin Abdul Qodir Jawas, *Prinsip Dasar Islam (Bogor : Pustaka At-Taqwa, cet.ke-8, 2010)*. Juga Abu Ibrahim Muhammad Ali. 2008. *Pajak dalam Islam*, (online), (<http://almanhaj.or.id>) diakses 16 oktober 2014

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah *Shallallahu‘alaihi wa sallam* bersabda

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”  
[HR Ahmad 4/109]

Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu sabil (musafir) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdakakan hamba sahaya (budak), mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah: 177)

Ayat ini menurut sebagian ulama merupakan alasan yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan (Qardhawi, 1999:974) dalam (Gusfahmi, 2007:174).

Firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 177, mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan lain-lainnya. Point-point dalam bagian (a) di atas, bukan hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan dengan jalan tersendiri.

Juga adanya kaidah-kaidah umum hukum *syara'* yang memperbolehkan. seperti kaidah mencegah *mafsadat* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maslahat'*, atau kaidah lebih memilih *mudharat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.<sup>3</sup>

Selain itu, pajak dipertahankan sebagian *fuqaha* di samping zakat disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Mereka mempertimbangkan sistem perpajakan “yang adil”, yang seirama dengan semangat Islam (Chapra, 2000 : 294-295).

---

<sup>3</sup> Kaidah-kaidah umum hukum *syara'* yang memperbolehkan. Misalnya kaidah “*Mashalih Mursalah*” (atas dasar kepentingan), atau kaidah mencegah *mafsadat* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maslahat'*, atau kaidah lebih memilih *mudharat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum. Lihat: Muhammad Wasitho Abu Fawas. 2011. *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam*, (online), (<http://abufawaz.wordpress.com>) diakses 02 Februari 2014.

Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, yakni pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*<sup>4</sup>, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar, dan terakhir dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan (Chapra, 2000 : 295).

Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang semakin meningkat, sehingga sumber-sumber pendapatan negara harus terus dapat dioptimalkan. Sementara 1/5 hasil *ghanimah* (rampasan perang) yang diperoleh kaum muslimin dari musuh-musuh yang kalah dalam perang atau yang diperoleh dari harta kaum musyrikin tanpa perang yang menjadi pendapatan sejak masa-masa penaklukan Islam pertama kini pada zaman sekarang kedua sumber pendapatan itu telah tiada lagi. (Qardhawi, 2007 : 1075)

Kebutuhan negara yang terus meningkat dalam berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara (keamanan), transportasi, pendidikan dan lain-lain, sementara dana dari zakat dan sedekah tidak terpenuhi. Maka, untuk dapat membiayai keperluan-keperluan itu, tidak ada jalan lain kecuali mewajibkan pajak atau tugas-tugas yang ditentukan bagi mereka yang punya uang sekedar untuk memenuhi keperluan-keperluan yang wajib dibiayai sesuai dengan kaidah, “sesuatu yang menjadi syarat bagi yang wajib adalah wajib” (Qardhawi, 2007 : 1075).

---

<sup>4</sup>Umer Chapra dalam bukunya Islam dan Tantangan Ekonomi menyebut *maqashid* sebagai tujuan-tujuan syariat. Imam Ghazali memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda dalam *maqashid*. Lihat : Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Terj, Ikhwani Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal 7

Nahbani dalam Gusfahmi (2007:153) juga menegaskan bahwa dalam keadaan darurat dan terjadi kekosongan/kekurangan *baitul mal* (kas negara), khalifah berhak untuk mengambil harta individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri (kaum Muslimin), seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan, yang tidak terpenuhi oleh kas negara, lalu dipungutlah pajak (*dharibah*) uang pajak itu harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim itu sendiri, misalnya: membuat jalan raya, sekolah-sekolah, menggaji aparat keamanan, dan lain-lain.

Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan pada *public goods* dan mempunyai tujuan sebagai alat retribusi, penstabilan dan pendorong pertumbuhan ekonomi (Nasution dkk, 2007:223). Sehingga tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan (Astrini, 2012 : 1-2).

Pajak yang ditarik di negeri-negeri Muslim pun bermacam jenis dan persentasenya. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan beberapa jenis pajak dan persentase di berbagai negeri Muslim saat ini (yang termasuk dalam negara anggota OKI) :

**Tabel 1.2**  
**Jenis dan Tarif Pajak di beberapa Negeri Muslim**

COUNTRY/ REGION	CORPORATE TAX	INCOME TAX MIN	INCOME TAX MAX	VAT/GST/SALES TAX
Afghanistan	20 %	10%	20%	2% to 5%
Albania	15%	0 %	23%	20%
Bangladesh	0-45%	0%	25%	15%
Brunai	20 %	0%	0 %	-
Egypt	25	10%	20%	10% (standard), 25% (luxury goods),
Indonesia	25%	5%	30%	10 &
Iran	25	0	35	1.5-10% depending on item
Jordan	30%/24%/14%	0	14	16
Kazakhstan	17.5%, 15%	10	10	12
Kuwait	10%, 0% on dividends	0	0	16 %
Lebanon	15/4 - 21%	2	20	10
Malaysia	25	0	26	
Maldives	8-15			6
Turkey	20	15	35	18%or8%(e.g.clothing) or 1%(certain food
Pakistan	35	7.5	35	0% or 17% (basic food items)
Sinegal	25	0	50	20
Syria	35%/28%/22%	5	15	
Palestina	15	5	15	14.5 (VAT)
Yemen	20%	10	15	2

Sumber : <http://en.wikipedia.org> di akses 13 oktober 2014

Dari tabel tersebut, nampak beberapa jenis pajak di negeri Muslim yang berlaku zaman sekarang. Hal ini mengisyaratkan bahwa peranan pajak bagi suatu negara sangat penting. Sehingga negeri-negeri muslim kini telah bergantung pada pajak untuk menjaga keberlangsungan pemerintahannya.

Namun sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan koridor syariat akan menjadi sebagai salah satu alat yang dimainkan untuk melegalkan dan melegitimasi sebuah kebijakan/struktur yang menindas. Sebagaimana

kekhawatiran para fuqaha jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan (Chapra, 2000 : 294).

Seiring dengan kemunduran peradaban Islam disertai *hegemoni* peradaban barat, hukum *syar'i* semakin ditinggalkan dan digantikan dengan hukum *wad'i* (buatan manusia).<sup>5</sup> Implikasinya berbagai penyimpangan tidak terelakkan bahkan penyalahgunaan fungsi dari pajak tidak dapat dihindarkan.<sup>6</sup>

Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai pemasukan negara, secara bersamaan muncul pula kesadaran umat untuk membayar zakat serta peran zakat sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan ekonomi maupun sosial. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks menyejahterakan rakyat.<sup>7</sup>

Kaum Muslim yang telah mengeluarkan zakat kini mendapatkan beban tambahan yang sifatnya wajib dan dapat dipaksakan. Seorang wajib zakat (*Muzakki*) juga sebagai seorang wajib pajak (*Tax Payers*). Adanya dualisme pungutan tersebut dirasakan berat bagi kaum Muslim. Disamping membayar zakat mal, juga atas penghasilan kaum Muslim dari kerja kerasnya dikenakan PPh, semakin berat jika diwajibkan pula membayar PBB yang mereka bayar dengan uang hasil kerja keras atau harta simpanan yang telah dizakati dan telah

---

<sup>5</sup> Sistem ekonomi modern yang ada dibangun diatas domonasi-dominasi lewat hegemoni yang dilegitimasi secara ilmiah atas nama pengetahuan, atau hegemoni dalam konteks dominasi ideologi lewat kerangka sebuah teori. Yahya Ibn Adam. 1987, Kitab *Kharaj*, Muqqodimah tahqiq Li Dr. Husein Mu'annas, hal.8. Dalam Rahmad Hakim (Ed.), *Zakat Dan Pajak Dalam Islam* hlm. 1. Negeri Sembilan : Faculty Of Economics And Muamalat And Faculty Of Syari'Ah And Law Islamic Science University Of Malaysia.

<sup>6</sup> Di tengah menguatnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara, fungsi zakat sebagai pemasukan negara dikebiri dapat digantikannya dengan pajak. Ibid,.

<sup>7</sup> *Zakat, Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat*, Harian Republika, 01 April 2010. Dalam Rahmad Hakim, ibid,.

dikeluarkan PPhnya. Ditambah lagi dengan PPN jika masyarakat atau kaum Muslim mengkonsumsi barang tertentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah). Maka hal ini menjadi pungutan pajak berganda atas penghasilan (Gusfahmi, 2007:7).

Sebagai seorang Muslim wajib untuk mencari tahu kebenaran dari segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya. Maka dipandang perlu untuk meminta penjelasan dari orang-orang yang berilmu (intelektual Muslim) dalam memberikan penjelasan tentang hal tersebut sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nahl : 43 *“maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji tentang konsep perpajakan dalam Islam, melalui sebuah penelitian dengan judul: **“Konsep Pajak dalam Pandangan Intelektual Muslim”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep perpajakan dalam pandangan Intelektual Muslim?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perpajakan dalam pandangan Intelektual Muslim?



#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

*Pertama*, bagi peneliti. Menelaah lebih dalam bagaimana konsep perpajakan dan konsep pendapatan negara dalam pandangan Islam. Menjadi wajib bagi kaum Muslim untuk mencari tahu kebenaran dari segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya, dalam hal ini pendapatan negara. Selain itu menambah wawasan keislaman bagi peneliti dalam bidang ekonomi sebagai konsekuensi pilihan konsentrasi.

*Kedua*, bagi fakultas. Dalam memupuk fitrah fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin pada tradisi intelektual, sebagaimana fungsi hakiki yang sesungguhnya melekat pada semua institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi mahasiswa di bidang ekonomi Islam pada fakultas ekonomi unhas yang dicanankan akan memiliki jurusan ekonomi Islam kedepannya.

*Ketiga*, bagi pengambil kebijakan. Dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua komponen yang memiliki peran sebagai pengambil kebijakan dari berbagai struktur hirarki maupun horizontal, dalam hal ini termasuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik dan

*Terakhir*, bagi *Tollabul ilmi*, Mudah-mudahan kajian sederhana ini dapat membawa kekuatan baru dalam menggagas dan mendesain gerakan untuk masa depan umat, bangsa dan negara yang akan datang. Dengan penuh harapan Indonesia beradab 2045 yang telah kita agendakan dapat terwujud. Semoga Allah menganurahkan taufik kepada kita. Amin...

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pajak dalam ekonomi Islam, yang berisi tentang definisi pajak menurut Islam, karakteristik pajak, syarat pemungutan pajak dan tinjauan tentang Intelektual Muslim yang berasal dari referensi–referensi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang menunjang pengembangan kerangka pikir selanjutnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yakni terkait dengan bentuk dan paradigma penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV EKSISTENSI PAJAK SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas historitas pajak dalam Islam, konsep pajak pada masa pemerintahan Islam, legitimasi syariah atas adanya pajak baru dalam Islam, dan relevansi *maqashid syariah* dengan *dharibah*.

### **BAB V ANALISIS KONSEP PAJAK DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM**

Bab ini merupakan bab pembahasan, yang membahas keberadaan pajak dalam pandangan intelektual muslim, abstraksi pemikiran intelektual muslim, penerapan *dharibah* dalam

masyarakat muslim, keberatan terhadap pemungutan pajak sebagai pendapatan negara dan akuntansi perpajakan.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Tentang Pajak dalam Islam

##### 2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut etimologi dalam bahasa Arab disebut dengan nama *Adh-dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribu*, *dharban* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (Gusfahmi, 2007:27).

Gusfahmi (2007:27) menyebutkan bahwa secara bahasa *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Sehingga An-Nabhani dalam Gusfahmi (2007:28) menyebutkan bahwa *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

An-Najah, (2010) menyebutkan istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya *al-Jizyah*, *al-kharaj* dan *al-'ushr*. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan *al-Muks*. Gusfahmi (2007: 30) menekankan perbedaan pajak (*dharibah*) dengan istilah-istilah pungutan lainnya seperti *Jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* yang dalam penerjemahannya sering disamakan padahal seharusnya tidak sama, masing-masing berbeda subjek dan objeknya.

Tabel. 2.1 Perbedaan Objek dan Subjek antara Pajak, *Jizyah* dan *Kharaj*

NAMA / SEBUTAN	OBJEK	SUBJEK
Pajak ( <i>dharibah</i> )	Harta selain zakat	Kaum Muslim
<i>Jizyah</i>	Jiwa ( <i>An Nafs</i> )	Non Muslim
<i>Kharaj</i>	Tanah Taklukkan	Non Muslim

Sumber : Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut '*ushr* (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara khalifah, baik muslim maupun *zimmi*<sup>8</sup> dan bukan *mu'ahad*<sup>9</sup>. Sebab '*ushr* hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besarnya '*ushr* sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara khalifah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengespor komoditas dari negara tersebut (an-Nahbani dalam Gusfahmi, 2007:28).

Adapun *ushr* (hasil pertanian), ditarik dari kaum muslim dari hasil pertanian, dibayar pada saat panen yaitu ketika tanaman dituai atau buah-buahan dibawah. *Ushr* (hasil pertanian) termasuk ke dalam kelompok sedekah dan menjadi salah satu penerimaan negara yang penggunaanya sudah ditentukan langsung oleh Allah Ta'ala. Dari sisi cara pengeluaran, jika dikelompokkan sama dengan zakat (Gusfahmi, 2007:116). Diterangkan Suyanto (2007) bahwa zakat dan *ushr* (pertanian) adalah pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*, Keduanya berbeda dengan pajak

<sup>8</sup> Kafir *dzimmi* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin.

<sup>9</sup> Kafir *mu'ahad* yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati.

dan tidak diberlakukan seperti pajak. Zakat dan *ushr* merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam.

Adapun *Jizyah* adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir, karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* tersebut merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun dan tidak diwajibkan sebelum satu tahun (An-Nabhani, 1996:259). Adapun objek dari *jizyah* adalah jiwa, tidak sama dengan *dharibah* yang objeknya adalah harta selain zakat.<sup>10</sup> Sedangkan *kharaj* adalah pajak atas tanah taklukan, sehingga objek *kharaj* adalah tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam) pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib, sebagaimana diterangkan oleh Rochmat Soemitro dalam (Pudiyatmoko, 2009 :1) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, pajak sebagai pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Jadi, pajak (tax) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara (Gusfahmi, 2007: 29).

Lebih lanjut Gusfahmi (2007) menerangkan bahwa pengertian tersebut, adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari

---

<sup>10</sup> *Jizyah* dikenakan atas orang, bukan atas harta. *Jizyah* wajib berdasarkan *nash* Quran at-Taubah:29 “sampai mereka membayar dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”. *Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka.

rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian *dharibah* bisa kita artikan sebagai pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.<sup>11</sup>

An-Nabhani (1996:262) menerangkan bahwa harta yang dikumpulkan ini boleh disebut dengan sebutan pajak (*dharibah*). Begitu pula diperbolehkan menyebutnya dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain. Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata dalam bahasa Arab yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam (Gusfahmi, 2007: 29).

Oleh Sholihin (2010:547) *dharibah* (pajak) diterjemahkan sebagai harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (diwajibkan atas baitul mal) serta pihak-pihak yang diwajibkan atas mereka, namun Baitul Mal tidak dapat memenuhi hal tersebut. Adapun diwajibkan atas baitul untuk (1) pembiayaan jihad baik aspek pembentukan, pelatihan dan persenjataanya (2) pembiayaan orang-orang fakir, miskin dan *ibnu sabil* termasuk didalamnya pembiayaan untuk gaji/upah pasukan, pegawai negara, qadhi, pengajar dan selain mereka yang memberikan pelayanan

---

<sup>11</sup>Pengambilan harta (dari orang Islam) inilah yang disebut sebagai *dharibah* (sejenis pungutan) yang dibenarkan oleh syara' untuk dipungut oleh Daulah Islamiyah(negara) dan menjadi tanggungjawab negara untuk membelanjakannya dengan hak. *Dharibah* adalah satu bentuk 'pungutan khas' yang dikutip dari kaum Muslimin yang kaya/layak sahaja, itu pun hanya pada keadaan Baitul mal mengalami defisit atau tidak cukup untuk melaksanakan apa jua kewajiban oleh negara. Tidak boleh memungut *dharibah* jika Baitul mal negara masih mencukupi. Ia hanya dipungut di dalam keadaan negara yang amat terdesak sehingga jika tidak dipungut, maka sebuah kewajiban akan terabai. Dikutip dalam <http://ms.wikipedia.org/wiki/Cukai>. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini dalam Fawas (2010), pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal."

kemasyarakatan (3) pembiayaan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, memberikan layanan umum serta hal-hal yang sangat vital bagi kaum Muslimin, seperti jalan umum, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, Masjid, pemenuhan air dan sebagainya. Diwajibkan bagi Baitul Mal untuk memenuhi hal tersebut baik ada atau tidak adanya harta, apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, kewajiban beralih kepada kaum Muslimin dengan diwajibkannya *dharibah*.

Adapun definisi pajak yang disebutkan oleh beberapa ulama seperti, Qardhawi (2007: 999) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Adapun Zallum dalam Gusfahmi (2011: 29) berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah *Ta'ala* kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari definisi tersebut, definisi yang dikemukakan oleh Zallum mendekati apa yang dikatakan pajak syariah karena merangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting, yaitu: (1) Diwajibkan oleh Allah *Ta'ala* (2) Objeknya adalah harta (*al-mal*) (3) Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyum*), tidak termasuk non-Muslim (4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja (5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri* (Gusfahmi, 2011: 33).



### 2.1.2 Karakteristik Pajak

Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslimin setelah adanya beban pertama, yaitu zakat (Gusfahmi, 2007:30). Ada beberapa karakteristik pajak (*dharibah*) menurut syariah, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yaitu: Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya dan sifatnya temporer, yakni hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Kedua, pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan, yakni ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Hal ini berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*) (Kholis, 2010) dalam (Astrini, 2012:30).

### 2.1.3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulama andalus, ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah, dengan syarat (Tarmizi, 2014);

- a. Ada (*hajjah*) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang.<sup>12</sup>
- b. Pemasukan negara dari *jizyah*, *kharaj* dll tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibnu Abidin dalam Tirmizi (2014) berkata, "Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya". Seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh

- c. Bermusyarah dengan ahlul *hilli walaqdi*.<sup>14</sup>
- d. Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu.<sup>15</sup>
- e. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.
- f. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara.<sup>16</sup> Sebagaimana yang pernah diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi sebelum ditemukan minyak.

Adapun Menurut Qardhawi (2007: 1079) pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : Pertama, harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Kedua, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan, keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Ketiga, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai

---

<sup>13</sup>Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ushr* kecuali dari pajak

<sup>14</sup>*Hilli walaqdi* merupakan kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Dalam hal ini, mengambil pajak dari masyarakat Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat seperti yang dikatakan Ibnu Al Arabi dalam Tirmizi (2014) "tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama".

<sup>15</sup>Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang-orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Al Haitami dalam Tirmizi (2014) berkata, "Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya".

<sup>16</sup>Syatibi dalam Tirmizi (2014) berkata, "Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajak pun dihapuskan".

kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu.<sup>17</sup> Keempat, ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak, kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah, tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu sistem perpajakan yang adil menurut mereka apabila memenuhi tiga kriteria, yakni pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*<sup>19</sup>, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar, dan terakhir dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan (Chapra, 2000 : 295).

#### 2.1.4 Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariah

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum Muslimin) pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jika menyalahi hal ini, maka jelaslah pungutan pajak itu haram.<sup>20</sup> Menurut Zallum, ada enam pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak menurut Islam (Gusfahmi: 179), yaitu:

---

<sup>17</sup>Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

<sup>18</sup>Karena pada dasarnya, harta seseorang haram diganggu, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

<sup>19</sup>Umer Chapra dalam bukunya Islam dan Tantangan Ekonomi menyebut *maqashid* sebagai tujuan-tujuan syariat. Imam Ghazali memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda dalam *maqashid*.

<sup>20</sup>Jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka pajak menjadi haram dipungut, karena tiada kerelaan dari si pembayar pajak. Hal ini sesuai dengan hadist: "Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan pemiliknya." (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714). Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan syariah. Adapun yang

- a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan *Ibnu sabil*.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- e. Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul amal tidak ada atau kurang.

#### **2.1.5 Teori Pemungutan Pajak**

Sumber-sumber pendapatan baitul mal dalam khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun ketika di baitul mal tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela kaum muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum muslimin. Hal itu karena Allah telah mewajibkan demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum

---

termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan.

muslim. Allah telah mewajibkan kepada negara dan ummat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum muslim (Setiawan, 2010:19).

Al-Arabi dalam Qardhawi (2007:991) Pada harta tidak ada kewajiban selain zakat. Namun apabila zakat telah diselesaikan, kemudian sesudah itu datang kebutuhan mendesak, maka wajib bagi orang kaya untuk mengeluarkan hartanya untuk keperluan tersebut. Apabila harta baitul mal kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam hendaklah membebankan biaya itu kepada mereka yang kaya untuk mencukupi keperluan tersebut, sehingga baitul mal berisi kembali (Syatibi ) dalam (Qardhawi, 2007:992).

Karena kewajiban utama atas harta adalah zakat maka landasan teori pajak harus mengacu (sama) dengan zakat. Alasannya, subjek zakat dan pajak (*dharibah*) adalah sama, yaitu orang muslim (Gusfahmi, 2007:204). Sehingga Menurut Qardhawi, asas teori wajib zakat dan pajak adalah sebagai berikut :

a. Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmat-Nya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka, agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada Rasull-Nya, dan siapa yang membangkang, kemudian Allah membalas perbuatan mereka.

b. Teori Khilafah

Teori ini didasarkan bahwa harta itu adalah amanah Allah. Asas teori ini bahwa itu semua adalah kepunyaan Allah dan manusia hanyalah

pemegang amanah atas harta itu.<sup>21</sup> Maka tak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah, ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya.

c. Teori Pembelaan Antara Individu Dan Masyarakat

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

d. Teori Persaudaraan

Teori ini didasarkan pada asas persaudaraan yang dibawa oleh Islam. Apabilah persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Di antarauntutannya ialah manusia tidak boleh hidup senang sendiri, tidak mempedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tidaklah berhak untuk hidup di dunia ini.

## **2.2 Tinjauan Tentang Intelektual Muslim**

### **2.2.1 Definisi Intelektual**

Dari segi bahasa intelektual berarti cendekiawan atau orang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki daya akal budi serta totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut

---

<sup>21</sup> QS. Al-Najm 53: 31 dan QS. Thaha 20 : 6

pengertian atau pemahaman.<sup>22</sup> Kata Intelektual di Indonesia disamakan dengan kata cendikiawan yang berarti (1) cerdik pandai (2) orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu (Saragih, 2010:15)

Istilah intelektual adalah istilah yang lahir dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan kasus Dreyfus<sup>23</sup>. Peristiwa Dreyfus dianggap sebagai referensi (otoritas) historis politik dan pemikiran di Perancis atas istilah "*les intellectuels*" (*al-mutsaqqafun*). Sebab, untuk pertama kalinya kata tersebut digunakan sebagai "sebutan" (gelar) dalam sebuah deklarasi "*manifeste des intellectuels*" (al-Jabiri, 2003:43) dalam (Satria, 2009:89).

Kata intelektual mulai populer bukan hanya setelah kubu Dreyfusard mendapatkan cemohan "intelektual" yang memiliki konotasi negatif, kata intelektual menjadi sebuah model bagi bentuk baru keterlibatan dalam kehidupan

---

<sup>22</sup>Intelektual juga diartikan sebagai Cendikiawan ; Intelegensia ; kecendikiawanan; kecerdasan; mengenai akal; menurut pikiran; intelektuil; orang terpelajar (Pusat Bahasa Depdiknas, 2001:437).

<sup>23</sup> Kasus tersebut terjadi pada tahun 1896, berawal ketika Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi dalam dinas ketentaraan Perancis dituduh telah melakukan kegiatan spionase (mata-mata). Alfred dituduh menyampaikan rahasia militer Perancis dalam apa yang disebut *bordeau* atau jadwal kepada kedutaan Jerman. Bagi Perancis tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada membocorkan rahasia militer Negara oleh seorang opsir. Alfred dicopot dari pangkatnya oleh sebuah pengadilan militer dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Ternyata apa yang disebut sebagai pengkhianatan itu adalah palsu belaka dan merupakan hasil penipuan. Sebagai protes atas tindakan kesewenang-wenangan keputusan pengadilan itu, Emile Zola, seorang novelis populer yang terkenal, menerbitkan sebuah surat terbuka berjudul "*J'accuse*" (aku mendakwa) di halaman muka surat kabar yang terbit di Paris, Emile Zola menuduh para anggota dinas ketentaraan Perancis telah merekayasa bukti, memanipulasi dan menutup-nutupi fakta kasus tersebut. Emile Zola akhirnya ditahan dan diadili dengan tuduhan memfitnah dan mencemarkan nama baik. Surat Emile Zola inilah yang kemudian dikenal sebagai '*manifeste des intellectuels* (manifesto para intelektual). Surat ini juga membuat perpecahan dikalangan pengarang Perancis menjadi dua kubu : kubu Dreyfusard (yang membela Dreyfus) dan kubu anti-Dreyfusard (kubu yang anti Dreyfus). Dari polarisasi ini muncullah istilah intelektual. Pada awal istilah ini merupakan cemoohan yang memiliki konotasi negatif. Bagi kubu anti-Dreyfusard, yang berbicara dari sudut pandang institusi-institusi Negara, istilah intelektual dipakai untuk menunjuk kepada para penulis dan selebritis yang berorientasi pasar yang memiliki keterkaitan dengan kubu Dreyfusard sehingga pada tahap-tahap awal kemunculannya, intelektual menunjuk pada sebuah kelompok dengan misi yang diproklamkan sendiri, yaitu membela sebuah nurani bersama atas persoalan-persoalan politik yang mendasar (Latif, 2012:20-22).

publik dan juga peran baru untuk dimainkan (Latif, 2012:21). Hal demikian merupakan akibat dari polarisasi makna intelektual serta perannya dalam masyarakat (al-Jabiri, 2003:44) dalam (Saragih, 2010:1).

Alatas (1988) dalam Putro (2000:161) melihat bahwa seorang intelektual adalah orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah nonmaterial dengan menggunakan kemampuan penalarannya. Sementara Dhakidae (2003:28) dalam Satria (2009:90) menjelaskan bahwa intelektualsenantiasa terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai *speech community*, yaitu komunitas yang mempergunakan bahasa sebagai alat, modal, medium, untuk mengolah kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intelektual muslim adalah golongan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama dan mampu menteorisasikan serta merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat, selain itu intelektual selalu bisa berbicara dengan bahasa kaumnya dan mampu menyesuaikan diri pada kaumnya untuk memberikan pendidikan, pencerahan, dan solusi.

Adapun munculnya istilah intelektual Muslim dapat dilacak ketika para anggota dari komunitas intelegensia Indonesia merumuskan suatu respons ideologi atas negara kolonial yang represif, pluralitas latar sosio-kultural mereka melahirkan perbedaan-perbedaan dalam ideologi. Sebagai konsekwensinya, para intelektual Indonesia terbelah ke dalam beberapa tradisi politik dan intelektual. Oleh karena itu lahirlah kelompok intelektual Muslim, intelektual komunis, intelektual nasionalis, intelektual sosialis, intelektual Kristen dan seterusnya. Dalam konflik di antara tradisi-tradisi intelektual ini, setiap kelompok berupaya untuk memperbanyak pengikutnya dengan jalan menggabungkan diri



dengan kelompok-kelompok status (status groups) yang telah mapan, yaitu kelompok-kelompok solidaritas kultural (Latif, 2012: 32)

Bawami dan Anshori (2003:211-212) dalam Saragih (2010:16) memberikan penjelasan bahwa makna intelektual lebih ditekankan pada sikap dan spirit untuk memperjuangkan eksistensi keilmuan, kebenaran dan kejujuran melalui ucapan, pemikiran, ide maupun *performance* dan dedikasinya terhadap masyarakat. Dengan kata lain intelektual bertanggung jawab dalam berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dan mereka memberikan pendidikan, pencerahan, dan solusi alternatif.

### **2.2.2 Ciri-ciri Intelektual**

Intelektual merupakan pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisisan terhadap masalah tertentu atau yang potensial dibidangnya. Sehingga menjadi "*Change maker*" yaitu orang yang membuat perubahan atau agar perubahan di dalam masyarakat. Dengan demikian menurut Winarto (2011) intelektual memiliki ciri-ciri :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang mampu diteorisasikan dan direalisasikan di tengah masyarakat
- b. Dapat "berbicara" dengan bahasa kaumnya dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan.
- c. Mengemban tugas sebagai artikulator.
- d. Memiliki tanggung jawab sosial untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis.

Adapun menurut Alatas (1988:12-13) dalam Putro (2000:161) ciri-ciri sosial kaum intelektual antara lain:

- a. Mereka direkrut dari segala kelas, sekalipun dalam proporsi yang berbeda-beda.
  - b. Mereka dijumpai dari kalangan pendukung atau penentang berbagai gerakan kebudayaan dan politik.
  - c. Bila dilihat dari pekerjaannya, mereka pada umumnya bukanlah pekerja tangan dan bagian terbesar menjadi dosen, penyair, wartawan dan sebagainya.
  - d. Sampai pada batas tertentu mereka pada umumnya agak menjauh dari masyarakat selebihnya bergaul dalam kelompoknya sendiri.
  - e. Mereka tidak hanya tertarik pada segi-segi pengetahuan teknis dan mekanis semata-mata. Ide-ide mengenai agama, seni, kebudayaan, rasa kebangsaan, ekonomi terencana, kehidupan yang lebih baik dan sejenisnya termasuk dalam dunia pemikirannya. Pada bagian lain, selanjutnya berbeda dengan spesialis, kaum intelektual berusaha melihat dari perspektif yang lebih luas, yakni dalam bentuk saling hubungan dan secara total.
  - f. Kaum intelektual senantiasa merupakan bagian kecil dari masyarakat.
- Sedangkan secara khusus, menurut Quraish Shihab dalam Winarto (2011) intelektual Muslim haruslah memiliki ciri-ciri :
- a. Mengingat (*Dzikir*) kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi sebagaimana dalam surah Fathir 28 dan Assyuaru 197.<sup>24</sup>
  - b. Memikirkan/memperhatikan fenomena alam raya yang pada saatnya memberi manfaat ganda yaitu memahami tujuan hidup serta memperoleh manfaat dari alam raya untuk kebahagiaan dan kenyamanan hidup

---

<sup>24</sup>Diantara hamba-hamba Allah yang kepadaNya, hanyalah para Ulama yakni orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah (Surah Fathir : 28)

- c. Berusaha dan berkreasi dalam bentuk nyata dengan hasil-hasil dari buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat.

Arif (2007) mengingatkan bahwa penggabungan antara istilah intelektual dan Muslim menjadi “Intelektual Muslim” tidak dapat diterima begitu saja, karena istilah “Intelektual” dikenal baru-baru ini saja di dunia Islam. Istilah ini mengimpor dari peradaban lain, seperti halnya “Falsafah”.<sup>25</sup>

Sebuah contoh yang ditekankan oleh Syamsuddin Arif:

“Ketika kalangan modernis atau liberalis dengan lantangnya menggugat otoritas Al-Quran, Hadits, ulama, dll. Mereka mengatasnamakan intelektual. Nah itu sikap yang sangat Barat dan tidak bijak serta terburu-buru menggunakan istilah asing.” Kalau diperhatikan, ada makna universal dalam istilah intelektual, seperti ‘memperjuangkan keadilan dan kebenaran’, ‘pendirian kuat’, ‘tidak mudah terbawa arus’, dan lainnya. “Makna universal ini ada di mana-mana, tidak saja di Barat. Masalahnya adalah ketika makna universal diterapkan ke dalam partikular. Seperti menentang arus dalam konteks di dunia Kristen tidak akan sama kasusnya dengan menentang arus dalam konteks di dunia Islam”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah, intelektual dalam Islam cukup dikenali dengan tiga cirinya. Pertama, ia tidak ada rasa takut menyuarakan kebenaran (*la khaufun alaihim wa la hum yahzanun*). Kedua, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, partai dan lain-lain (*la yas alukum alaihi ajran wahum muhtadun*). Ia hanya ditunggangi kepentingan misi Tuhannya. Ketiga, ia adalah *agent of change*/agen perubahan, dan bukan *subject of change*/yang dirubah oleh lingkungannya (Arif, 2007).

---

<sup>25</sup>Arif (2007) menegaskan bahwa istilah-istilah intelektual dengan konteks masyarakat Barat tidak boleh dipindah begitu saja ke dalam Islam. Selama ini, orang Indonesia sangat memaksakan penggunaan istilah itu dengan segala motifnya. Sebagai contoh, ketika muncul kasus Ahmadiyah, tampillah pembela Ahmadiyah atas nama kaum intelektual dan membela atas nama HAM. Ini salah satu contoh kecil penggunaan istilah itu yang sangat dipaksakan.

<sup>26</sup> Maksud Syamsudin Arif, sejak awal kemunculan Islam, ia tidak pernah menentang kemajuan ilmu pengetahuan tidak boleh disamakan dengan tradisi gereja terdahulu yang tidak segan-segan menghukum kalangan ilmuwan dengan hukuman yang berat, artinya proses pembaruan pemikiran Islam jangan serta merta menggugat otoritas Alquran.

### 2.2.3 Jenis Intelektual Muslim

Mengenai Tragedy Dreyfus yang dianggap sebagai titik tolak berkembangnya istilah intelektual, Arif (2007) berpendapat :

Membela kebenaran dalam konteks dunia Barat tidak sama dengan membela kebenaran dalam konteks dunia Islam. Dengan demikian, dengan melepaskan makna partikulernya dan mengambil makna universalnya, Mari kita melihat makna-makna universal itu dalam Islam. “Ternyata, cendekiawan dan intelektual sejati itu dalam Islam adalah para Nabi dan penerusnya, waratsat al-Ambiya’ (pewaris para nabi) dan penerus risalah profetis”.

Sebab itu Arif (2007) membagi intelektual menjadi dua: Pertama, intelektual profetik. Kedua intelektual *diabolik*. Intelektual profetik adalah para nabi dan pewarisnya. Merekalah para pembela kebenaran, sebagaimana kebenaran yang terkonsep dalam al-Quran. Sedangkan intelektual *diabolic* adalah seperti setan dan pengikutnya atau lebih tegasnya intelektual *diabolic* cerdas namun menyesatkan.

Intektual Barat tidak mau terikat dengan aturan Allah, tidak mau menyerah, memberontak (*rebellion*), menentang arus (*oppositional*) yang menyatu dalam kata “takabbur”. Contoh-contoh cendekiawan diabolik sangat banyak dalam sejarah. Seperti Kan’an putra nabi Nuh yang menolak naik ke atas perahu, Haman sebagai the *intellectual in the service of tyrant*, Fir’aun, Musa Samiri sebagai Cendekiawan yang membuat tuhan dari patung lembu, kaum kuffar dari ahlu kitab di zaman Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi wasallam* sebagai para-pakar yang kafir, dan lain sebagainya (Arif, 2007).

Sedangkan contoh intelektual profetik adalah seperti para Nabi, Sahabat, Ulama. Dari para nabi seperti Nabi Ibrahim yang menentang kuasa Namrudz. Nabi Luth juga intelektual yang menentang arus kaumnya yang mayoritas lesbi dan guy. Dari kalangan ulama, seperti Hasan al-Basri, Imam Syafii, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, dll, dan di Indonesia seperti Hamka, Syekh

Yusuf Al-Makasari, Muhammad Natsir, di mana mereka berani mengeraskan suara kebenaran dan merelakan risiko yang terus mengancam (Arif, 2007).

#### **2.2.4 Peran Intelektual Muslim**

Hegemonisasi kebudayaan dan peradaban menjadi salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam sebagai pengemban wahyu illahi. Negeri-negeri Muslim yang pada umumnya masih menjadi mayoritas tertindas dalam keterpurukan ekonomi, politik, dan sosial, ditambah dengan rendahnya intelektualitas, mengimpor produk kebudayaan, teknologi, dan peradaban Barat ke dalam tubuh negeri muslim sebagai usungan jargon globalisasi dan ikon modernisasi.

Kompleksitas masyarakat dan kepentingan-kepentingannya menuntut adanya pemikiran-pemikiran untuk membina dan membangun masyarakat agar tidak terjadi instabilitas dalam segala lini kehidupan, sehingga dalam bernegara para intelektual dituntut dapat memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi. Mereka bertugas merumuskan dan mengarahkan serta memberikan contoh pelaksanaan dari sosialisasinya ditengah masyarakat, agar segala persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Muslim dapat terpecahkan serta dapat menjawab tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang.

Seorang intelektual terlibat langsung dalam soal-soal kemasyarakatan. Pekerjaan seorang intelektual adalah mempertahankan negara dengan kewaspadaannya, selalu sadar akan tanggung jawabnya untuk tidak membiarkan kebenaran diselewengkan. Dalam hal ini intelektual berperan sebagai benteng akal sehat yang kritis terhadap kekuasaan. Intelektual merupakan pencipta bahasa yang mampu berkata benar kepada yang berkuasa (Widyaresmi, 2012:83)

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa intelektual Muslim berperan mengembang amanah sebagai orang yang berpihak kepada kebenaran sebagaimana kebenaran yang terkonsep dalam Islam dalam menyelesaikan problematika masyarakat. Dalam mengembang amanah tersebut tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, atau partai, Ia hanya ditunggangi kepentingan misi Tuhannya sehingga tidak ada rasa takut untuk menyuarakan kebenaran itu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian.**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Menurut Suryabrata (2010:76), “secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif .

- a. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dengan angka angka secara langsung.
- b. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dengan angka, digunakan sebagai penunjang fakta dalam mendukung argumentasi teori.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, majalah, buku (kitab), dan data publikasi lainnya (sekunder) dari instansi yang terkait dengan penelitian.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur guna memperoleh, mengumpulkan data dan menilai data yang lebih akurat untuk membantu penulis dalam mengembangkan topik bahasan yang berkaitan dengan judul penulis pilih.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penulis melakukan Wawancara (*Interview*) langsung pada objek penelitian. Yaitu penulis langsung mewawancarai intelektual Muslim dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi atau penjelasan yang lebih akurat guna memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif.

3. Mengakses *website*/situs internet

Metode ini dilakukan dengan menelusuri *website*/situs yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang diambil oleh peneliti adalah purposive sampling. Sesuai dengan namanya, informan diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang



diperlukan bagi penelitiannya (Mustafa, 2000:9) dalam Phonna (2012:36). Dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara kepada;

1. Prof. Dr. Halide mantan Rektor Universitas Fajar dan Guru Besar Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Ir. Idris Parakkasi, SE, MM. Direktur Koperasi BMT Al-Amin juga dosen Ekonomi Islam FSH UIN Alauddin
3. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA salah seorang intelektual Hizbuthahir Makassar dan juga Wakil rektor IV Universitas 45 makassar
4. Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak merupakan salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mukhlis Supri, SE., M.Si. salah seorang Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Makassar yang juga menjabat sebagai ketua MES Sul-sel
6. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., MSi. merupakan salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
7. Dr. Rahmat Abdul Rahman, Lc., MA. Merupakan salah seorang dosen di kampus Stiba Makassar
8. Mudzakkir M. Arif, MA. Merupakan salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqomah.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul penyusun menggunakan cara penelitian komparasi dan deskriptif. Menurut al Ummah dalam Phonna (2012:37) komparasi yaitu membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.

Dalam penelitian ini, pendapat berbagai kalangan dikomparasikan sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

Selain menggunakan komparasi data juga dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam kerangka *woldview* Islam yakni upaya mendekonstruksi model perpajakan dalam Islam dengan menekankan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, ijma, qiyas, sebagai landasan dalam sistem perpajakan di Negeri Muslim. Dalam menyusun dan menggagas hasil penelitian tersebut nilai-nilai subjek memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hasil penelitian.

### **3.6 Batasan Pembahasan**

Dalam membahas rumusan masalah, penulis akan membatasi penelitian mengenai pajak pemerintah pusat yakni PPh, PBB, PPn, dan cukai dalam pandangan intelektual Muslim yang pendapat tentang hal tersebut diambil dari para intelektual Muslim yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan.

## **BAB IV**

### **EKSISTENSI PAJAK SEBAGAI PENDAPATAN NEGARA DALAM ISLAM**

Dalam sejarah Islam terdapat berbagai pendapatan yang bersumber dari rakyat yang digunakan untuk kepentingan umum. Konsep pendapatan tersebut digunakan sebagai jalan untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin* hingga pendapatan-pendapatan tersebut mampu mendukung dan membawa pada puncak kejayaan Islam, akan tetapi perubahan zaman yang terjadi ikut mengubah konsep pendapatan tersebut.

#### **4.1 Historisitas Pajak Dalam Islam**

Pajak sebagai sebuah sumber pendapatan terbentuk dari sejarah yang panjang dan memiliki konsep yang berubah-ubah mengikuti kondisi sosioekonomi masyarakat. Sebelum munculnya Islam telah dikenal pungutan-pungutan pajak yang sarat dengan unsur kedzaliman berupa tekanan dengan jumlah tertentu sebagai kompensasi dari pihak yang memiliki kekuasaan dan terkadang ditarik dengan jalan kekerasan dan pemaksaan.

Pada abad ke-7 masehi menyusul runtuhnya kekuatan kekaisaran Romawi, Islam muncul sebagai sumber kekuatan baru. Kemunculan Islam dengan ideologinya dapat membentuk peradaban baru yang sangat mengagumkan ditandai dengan sistem kehidupannya yang komprehensif dan universal. Setiap lini kehidupan digariskan oleh Islam, termasuk dalam pendapatan pemerintahan. Muhammad saw adalah seorang nabi yang diutus untuk membawa peringatan,<sup>27</sup> diantara peringatan tersebut dalam hal keuangan (harta) agar tidak mengambil hak (harta) atas orang lain dengan jalan batil. Dari sekian jalan batil tersebut diantaranya pungutan-pungutan berupa pajak yang

---

<sup>27</sup> Terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa para Rasul diutus untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 119 dan An-Nisa ayat 165

diambil tanpa hak. Hadist-hadist dari Rasulullah yang menjelaskan tentang peringatan tercelanya pajak sebagai salah satu bentuk mengambil harta sesama dengan jalan batil menjadi bukti bahwa pajak sebagai sebuah pungutan sudah ada realitasnya pada masa kenabian.

#### **4.1.1 Pajak Pada Masa Awal Islam**

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, pajak sudah menjadi sebuah realitas dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Namun kehadiran pajak dalam sistem sosial masyarakat tidak bisa ditentukan secara akurat kapan muncul dan diakui sebagai sebuah pajak. Hal yang pasti dalam sejarah kehidupan bahwa realitas pajak sebagai sebuah pungutan sudah bisa ditemukan sebelum kedatangan Islam,<sup>28</sup> akan tetapi pungutan-pungutan yang dikatakan sebagai pajak tersebut tidak lepas dari unsur kedzaliman.<sup>29</sup> Adapun di jazirah Arab, (Mahmudah, 2011:1315) suku-suku Arab juga sering menarik pungutan atau retribusi dari kafilah-kafilah dagang sebagai imbalan perlindungan atau sebagai kompensasi melewati daerahnya. Kompensasi itu merupakan pajak yang mengandung unsur paksaan dan tekanan dengan jumlah nominal tertentu.

Sifat syariat yang universal datang dalam realitas arab yang jahil mengoreksi tradisi-tradisi yang mengandung unsur dzolim. Sehingga pada masa Rasulullah semua pajak-pajak yang dipungut tanpa hak dihapuskan oleh syariat bahkan oleh Rasulullah diancam para pelakunya atau pemungut (*shabul muks*)

---

<sup>28</sup> Dalam berbagai literatur sejarah seperti yang dituliskan Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin ekonomi Islam*, pajak sudah dapat ditemukan dalam kerajaan Romawi sebelum datangnya Islam selain itu mengenai asal muasal pajak juga diungkapkan oleh Halide bahwa pajak sudah dapat ditelusuri dalam sejarah Romawi sebagai sebuah pungutan.

<sup>29</sup> Menurut Afzalur Rahman para pejabat pemerintahan Romawi dan Persia menjalankan cara yang sangat keji dan biadab dalam mengumpulkan pajak penghasilan dan sewa tanah dari para petani serta memperlakukan mereka dengan cara hina dan tak jarang menyiksa mereka demi memperoleh bagian. Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam jilid 2*, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995 hal. 197

dengan azab neraka<sup>30</sup>. Sebaliknya bentuk kontribusi rakyat yang ditawarkan Islam dalam membangun kesejahteraan berupa zakat, sedekah, infaq, dan wakaf. Bagi kaum muslim kontribusi tersebut bersifat spiritual atas dasar semangat ibadah. Bukan hanya ibadah dalam hubungan ketuhanan akan tetapi ibadah yang juga berhubungan langsung dengan kemanusiaan (muamalah).

Misi ketuhanan yang dibawah oleh Rasulullah mengharuskan untuk disampaikan kepada setiap manusia diberbagai penjuru dunia sehingga mengharuskan adanya kontak langsung dengan beberapa wilayah dengan bermacam ideologi. Benturan ideologi yang terjadi tak terhindarkan, terkadang pernyataan menerima syariat dengan lapang dada, perdamaian, dan terkadang pula benturan ideologi berujung pada perang. Wilayah-wilayah yang takluk dengan jihad menjadi wilayah kekuasaan Islam, para penduduk asli dari taklukan ditawarkan untuk memeluk Islam dan jika tetap berada pada agamanya maka Rasulullah tetap membiarkan karena konsep risalah yang dibawa tidak memaksa. Namun, sebagai sebuah kompensasi atas keamanannya dalam wilayah Islam dan bentuk kontribusi untuk pembangunan negara, para taklukan yang tetap dalam agamanya diwajibkan membayar *jizyah* atas ketundukan mereka pada Islam. *Jizyah* sebagai sebuah pendapatan negara dikatakan sebagai pajak. Sehingga dalam banyak pandangan menyebut *jizyah* sebagai salah satu pajak dalam Islam.

---

<sup>30</sup> Terdapat banyak Hadist-hadist tentang tercelanya pajak akan tetapi sebagian ulama memperdebatkan keabsahannya dan sebagian ulama mengatakan hadist tentang tercelanya pajak termasuk hadist *doif*. Selain itu lafaz *muks* sebagai pajak juga diperdebatkan oleh banyak ulama, apakah pajak pada teks hadis bisa disamakan dengan pajak yang ada saat ini. Sebagaimana ulama seperti yang disebutkan oleh Qardawi bahwa yang dimaksud *muks* pada hadist tersebut adalah pajak berupa pungutan yang ditarik secara dzolim disertai unsur kekerasan dan paksaan. Sehingga Islam menghentikan bentuk-bentuk pungutan tersebut. Sebagian intelektual mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadist tersebut sama dengan pajak yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat dan Mudzakir saat peneliti melakukan wawancara.

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah dikenal beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara yang sering disebut-sebut sebagai sebuah pajak dalam Islam seperti *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, *rikaz*. Pendapatan-pendapatan demikian dikatakan sebagai pajak sebab posisinya sebagai sebuah sumber pendapatan negara yang ditarik oleh pemerintah dari rakyat. Menurut Khallaf tidaklah semua sumber pendapatan tersebut ditetapkan berdasarkan *nash-nash syara'* melainkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan *ijtihad*, sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan pada setiap masa.<sup>31</sup> Sebagai contoh, pemungutan *kharaj* pertama kali dilakukan di masa khalifah Umar bin Khattab, berdasarkan hasil ijtihadnya sehubungan dengan wilayah taklukan di Iraq yang kemudian diterima oleh para sahabat yang lain.<sup>32</sup> Demikian pula pemungutan *ushr*, ditetapkan oleh khalifah yang sama, menurut Rahmat (2014:1) latar belakang penerapan *usyur* sebagai pajak perdagangan terjadi karena pada masa Umar bin Khattab berdasarkan laporan Abu Musa al-Asy'ari bahwa para pedagang muslim yang berdagang ke wilayah nonmuslim dipungut pajak perdagangan oleh pemerintah wilayah setempat. Demi menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional serta kemaslahatan masyarakat, Umar pun memutuskan memungut pajak dari para pedagang nonmuslim yang berdagang ke wilayah Islam.

---

<sup>31</sup> Konsep *Kharaj* dan *Ushr*-bea cukai merupakan pendapatan-pendapatan pemerintah yang diputuskan berdasarkan *ijtihad* pada zaman Umar bin Khattab. Berdasarkan ijtihadnya pula konsep pungutan ini dikembangkan dan juga dibebankan kepada kaum muslim. Lihat; A.Malik Madaniy, *Pajak dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Al-Jami'ah, No. 56 Th. 1994

<sup>32</sup> Saat itu, pasukan muslimin baru saja menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang (*ghanimah*), termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk di Irak tersebut diwajibkan membayar pajak berupa *kharaj* bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk Islam. inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak atas kaum muslimin di luar zakat. Lihat: Safarni Husain, *Zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak*, Jurnal Risalah Hukum fakultas Hukum Unmul, Juni 2010 hal 9 Vol. 6, No.1

Dengan konsep pajak demikian situasi keuangan negara berlangsung dengan baik. Hal ini juga disebabkan karena harta kekayaan negara cukup besar setelah berbagai penaklukan yang dilakukan para khalifah-khalifah dan diiringi dengan cara pembelanjaan harta yang cermat dan efisien serta memegang teguh sifat amanah, baik oleh para khalifah, pejabat dan para petugas negara.<sup>33</sup>

#### **4.1.2. Pajak Pada Masa Pemerintahan Pasca *Khulafaurasyidin***

Ketika Dunia Islam berada di bawah kepemimpinan pasca *Khulafaurasyidin* kondisi keuangan negara juga berubah. Al-Maududi dalam Gusfahmi menyebutkan bahwa jika pada masa sebelumnya keuangan pemerintahan dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah dan amanat rakyat maka pada masa pemerintahan setelahnya Baitul mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Madaniy juga menggambarkan tentang kondisi perubahan tersebut pada masa pemerintahan Bani Umayyah bahwa biaya hidup para khalifah, pejabat dan petugas negara menjadi besar. Biaya-biaya perang untuk memadamkan berbagai pemberontakan di dalam negeri juga menjadi besar. Dengan kondisi demikian memaksa penguasa untuk menetapkan berbagai bentuk pajak yang tidak pernah dikenal sebelumnya, seperti pajak yang dikenakan pada perahu-perahu yang melintas dan pajak prikanan. Kendatipun ini dilakukan dengan bentuk-bentuk kekejaman dan intimidasi, namun ternyata tidak bermanfaat dalam menjaga keseimbangan moneter, justru sebaliknya semakin menanamkan rasa antipati di kalangan rakyat.

Tidak semua khalifah Bani Umayyah bersikap demikian. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah ke 12 pada dinasti Umayyah. Telah

---

<sup>33</sup> Dalam sejarah Islam, penaklukan yang dilakukan meninggalkan harta rampasan perang yang juga menjadi harta kaum muslim berupa *ghanimah*. A.Malik Madaniy, *Pajak dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Al-Jami'ah, No. 56 Th. 1994 hal 25

melakukan berbagai koreksi dan perbaikan terhadap sistem pemerintahan generasi sebelumnya, baik dalam macam-macam pajak yang dipungut, cara pemungutan dan cara pembelanjanya.<sup>34</sup> Dengan keperibadian yang bersih dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap amanat yang diberikan Allah atas dirinya. Menjadikan kondisi masyarakat pada masa pemerintahannya sebagai masa dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi bahkan dalam banyak literatur disebutkan tidak ada rakyat yang ingin menerima zakat sebagai tanda bahwa perekonomian sangat baik.

Akan tetapi keadaan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama. Seperti yang digambarkan oleh Al-Rayes, situasi mulai berubah kembali ke masa-masa sebelumnya berbagai bentuk kedzaliman dalam pemungutan pajak berulang kembali. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*dharibah*). Pajak (*dharibah*) yang dimaksud adalah pungutan yang dilakukan oleh penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara<sup>35</sup>. Sejalan dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajak semakin beraneka ragam. Kendati pungutan pajak semacam ini telah meluas dilakukan di dunia sejak masa-masa sebelum Islam, khususnya di Romawi dan Persia.

---

<sup>34</sup> Gusfahmi menuliskan bahwa ada sejumlah beban (pajak) yang pernah dikeluarkan oleh sebagian penguasa Umayyah namun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis dihapuskan seperti beban atas pabrik, pajak rumah dan beban yang dipungut dari para penjaja seks. Pajak-pajak demikian diperkenalkan oleh sebagian penguasa Umayyah karena melemahnya semangat Islam dan meluasnya pengaruh local sehingga pajak-pajak tersebut tidak memiliki prinsip kesamaan dan keadilan dan tidak memiliki nilai keagamaan, tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh para fuqaha dan akhirnya dihapuskan oleh Umar bin Abdul Azis.

<sup>35</sup> Kemunculan *dharibah* dalam dunia Islam untuk pertama kali sulit untuk diketahui akan tetapi menurut Abd al-Rasyidun kemunculannya mulai saat pola kehidupan pemerintah menjadi besar. Yakni ketika biaya hidup khalifah dan pejabat-pejabat menjadi besar dan berbagai pemberontakan dalam negeri sehingga memaksa penguasa untuk menetapkan berbagai bentuk pajak untuk memadamkan berbagai bentuk pemberontakan. A.Malik Madaniy, *Pajak dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jurnal Al-Jami'ah, No. 56 Th. 1994 hal 25



Sebelum abad 11 hal lain terjadi di belahan dunia, menurut Karim ketika Eropa masih dikuasai oleh para tuan tanah yang menjadi raja-raja kecil di wilayah kekuasaannya konsep sejenis zakat sama sekali tidak pernah terpikirkan. Orang-orang miskin dan para petani penggarap bekerja keras terkadang hanya untuk membayar sewa tanah kepada para tuan tanah. Dengan konsep demikian redistribusi pendapatan terjadi dari si miskin kepada si kaya.<sup>36</sup> Ketika terjadi interaksi budaya Islam dan budaya Eropa di abad 11,<sup>37</sup> konsep zakat sebagai pendapatan negara mencengangkan para tuan tanah dan kerajaan, ia juga membuka perspektif baru di kalangan gereja.<sup>38</sup> Sebab dalam konsep zakat redistribusi terjadi dari si kaya kepada si miskin. Ketika terjadi perang salib, Eropa mulai mengadopsi konsep zakat dengan nama *salahuddin tax*, yang kemudian menjadi dasar konsep pajak modern. Hal inilah yang juga dituturkan oleh Halide, bahwa “*sebenarnya pajak itu terinspirasi dari zakat dalam Islam*”.

Jika dulu pungutan yang dilakukan oleh penguasa sarat dengan kedzoliman, pajak dibayarkan sebagai bentuk upeti dari rakyat untuk penguasa karena penguasa kala itu membangun mitos-mitos bahwa kekuasaan yang ada

---

<sup>36</sup> Para tuan tanah yang memang kaya hidup dengan tenang penuh kemewahan dari hasil kerja keras orang-orang miskin yang menggarap tanahnya. Kondisi demikian sering kali menimbulkan pemberontakan di kalangan petani karena merasa diperas tenaganya dan diperlakukan semena-mena oleh para tuan tanah. Akan tetapi pemberontakan tersebut dengan mudah dipatahkan dengan bantuan kerajaan yang memiliki angkatan bersenjata. Sehingga Karim menggambarkan terjadi jurang kemiskinan semakin melebar, si miskin menjadi miskin miskin karena redistribusi pendapatan dari si miskin kepada si kaya. Lihat Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007 hal.xiii

<sup>37</sup> Mulai terjadi intraksi budaya Islam dan budaya Eropa yang ditandai dengan banyaknya mahasiswa eropa yang belajar ke negeri-negeri Islam. Kepulangan mereka kembali ke Eropa membawa banyak ide-ide baru, salah satu ide baru tersebut adalah zakat

<sup>38</sup> Salah satu konsep yang ada saat itu disebut ‘*tithe*’ (persepuluhan), donasi, *charity*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gereja, namun sering kali uang yang dibayarkan ke gereja jauh lebih besar yang didistribusikan kembali ke rakyat. Institusi gereja sangat kuat karena hubungannya yang kuat dengan kerajaan. Ide-ide yang dibawa oleh mahasiswa yang belajar di negeri Islam seperti zakat mencengangkan para tuan tanah dan kerajaan.

ditanganya merupakan kekuasaan yang langsung diterima dari Tuhan, maka pada akhirnya mereka memungut upeti dari rakyatnya sebagai bentuk kesetiaan rakyat kepada penguasa.

#### 4.1.3. Pajak Dalam Dunia Islam Modern

Proses sejarah memiliki titik awal dan bergerak ke depan menembus batas ruang dan waktu, yang akhirnya bertemu dengan satu era yang manusia sepakat menamainya dengan era modern.<sup>39</sup> Pungutan-pungutan yang ada di Barat mengalami perubahan setelah diadopsinya konsep zakat dengan nama *Salahuddin tax*. Dalam perkembangannya, pungutan-pungutan tersebut bermetamorfosis menjadi sebuah pungutan resmi yang terlembagakan dalam sebuah institusi pada era modern.

Dalam beberapa literatur buku perpajakan, seperti yang disebutkan oleh Bohari (2002:1) sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa yang mana hal ini sesuai dengan perkembangan negara dan masyarakat, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, akan tetapi merupakan sebuah pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam tujuannya untuk memelihara negara dari segala bentuk kepentingan dan ancaman. Akan tetapi dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah pada kepentingan rakyat itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Jean Jaeques Rousseau (1712-1778) menggunakan kata modern dengan arti yang bersendikan atas; (a) negara-negara bangsa dalam sistem politik, (b) teknologi yang berdasarkan ilmu pengetahuan, (c) *rasionalisme*, (d) penggandaan keuntungan, dan (e) *sekulerisasi* dan pelemahan peran agama. Sedang Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman klasik (abad ke-7-12), zaman pertengahan (abad 13-18) dan modern (kontemporer) abad 19. Jika mengambil pembagian yang dilakukan Harun maka abad 19 dikatakan sebagai zaman modern, dimana wilayah kekuasaan Islam sudah tidak lagi menjadi satu-kesatuan yang utuh. Kekuasaan Islam telah terpecah-pecah menjadi negara-bangsa (nation-state). Lihat Hasan Ali, 2004. *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta: Kencana hal 4-5

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka upeti yang merupakan pemberian secara cuma-cuma dengan tidak meninggalkan sifat utamanya yaitu memaksa, kemudian dibuat suatu aturan yang lebih baik agar sifat memaksanya tetap dipertahankan dan unsur keadilan lebih diperhatikan. Aturan-aturan inilah yang menjadi cikal bakal dalam praktik pemungutan pajak yang berlaku yang disebut dengan undang-undang (Kurniawan, 2009).

Ketika Barat mengalami perkembangan dengan kemajuan ekonomi dan berhasil melakukan kolonisasi di negeri-negeri muslim, konsep pajak di Barat diadopsi kembali ke negeri muslim.<sup>40</sup> Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak di negeri muslim menjadi terbalik. Dimulai dari kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa dan hegemoni peradaban Barat semakin menguat sehingga hukum-hukum *syar'i* ditinggalkan dan sebaliknya hukum-hukum Barat rumusan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak yang bermuatan ekonomi semata.<sup>41</sup>

#### 4.2 Konsep Pajak Pada Masa Awal Pemerintahan Islam

Ekonomi sebagai bagian integral dengan sistem Islam telah banyak dikaji oleh sarjana-sarjana muslim selain karena visi hidup Islam secara *kaffah* yang menjanjikan kesejahteraan juga sebagai bentuk respon terhadap berbagai tantangan dan permasalahan ekonomi yang ada. Kajian tentang pajak mempunyai porsi tersendiri, yang mana sarjana-sarjana muslim memandang

---

<sup>40</sup> Dengan mengambil Indonesia sebagai negari Muslim, Istilah Pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Inggris tahun 1811 – 1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Lihat Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan ke-2 (Malang : Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 3.

<sup>41</sup> Kemunduran kaum muslim dari sisi internal dan dari sisi Eksternal penjajahan Barat turut memperkuat keberadaan pajak di negeri Muslim. Lihat; Sarfani Husain, *Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, hal 10 vol.6, no.1

distribusi sebagai inti masalah dari ketidak cukupan (kemiskinan) umat manusia, hal ini sangat berbedah dengan ekonomi konvensional yang sangat yakin bahwa inti persoalan ekonomi adalah masalah produksi.

Salah satu sistem distribusi yang dikenal dalam literatur keuangan Islam adalah pajak. Pajak dalam masa pemerintahan awal menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terdiri dari *jizyah*, *kharaj*, *ushr*-bea cukai. Pendapatan pajak tersebut dalam pemerintah muslim didistribusikan untuk pembelanjaan kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan transportasi, pendidikan dan sebagainya.

#### a. *Jizyah*

*Jizyah* adalah salah satu jenis pajak dalam pemerintahan Islam yang dibebankan kepada non muslim (Bohari, 2004: 249). Pajak jenis ini menurut Idris ditarik oleh pemerintahan Islam sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan non-muslim terhadap pemerintahan Islam. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan atas kehidupan seperti harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer.

Secara normatif, keberadaan jenis pajak ini disebutkan oleh Allah secara langsung dalam surah at-Taubah 29

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*

Jika melihat ayat tersebut maka konsep *jizyah* sebagai sebuah pendapatan hanya jika Islam memiliki kekuasaan sehingga dapat dikatakan *jizyah* adalah lambang ketundukan seorang non-muslim pada

kekuasaan Islam. Gusfahmi mencatat tulisan Ibnu Khaldun bahwa para pembayar *jizyah* bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum bersama kaum muslimin. Orang-orang yang mampu dari kalangan ahli kitab tidak diwajibkan untuk mengangkat senjata dalam membela tanah air (kekuasaan Islam),<sup>42</sup> sebab yang berkewajiban melakukan itu adalah kaum muslim. Sehingga nonmuslim harus membayar pajak sebagai kompensasi sekaligus kontribusi untuk pembiayaan atas fasilitas umum yang dinikmati bersama. Apabila nonmuslim berpartisipasi dalam pembelaan tanah air bersama kaum muslim, maka kewajiban membayar *jizyah* itu gugur sebagaimana kewajiban membayar *jizyah* itu gugur ketika kaum muslimin tidak mampu membela dan melindungi mereka.

Pada zaman Rasulullah saw. dan *Khulafaur Rasyidin*, hukum *jizyah* dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai ketundukan kepada pemerintah Islam. *Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk agama Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* dikenakan atas orang bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap-tiap orang kafir bukan atas hartanya.

Menurut kajian intelektual muslim seperti Rahmat dalam disertasinya mengatakan bahwa kewajiban *jizyah* dibayarkan sekali setahun, dengan besaran sesuai kebijakan pemerintah Islam dan menjaga kemampuan rakyatnya serta kebutuhan pemerintahan, dan juga hanya dibebankan atas kepala keluarga atau kaum laki-laki, tanpa kaum perempuan dan

---

<sup>42</sup> Menurut Gusfahmi (2007: 123), *Jizyah* bukan merupakan alternatif pengganti dari wajib militer. Ia termasuk keadilan Islam yang mutlak, karena perang dalam Islam sangat terkait dengan akidah, yaitu perang di jalan Allah. Sehingga tidak adil bila membebani seseorang untuk berperang demi sebuah akidah yang tidak diyakininya atau berperang melawan orang-orang yang seakidah dengannya.

anak-anak.<sup>43</sup> Menurut Adiwarmam Karim sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.

b. *Kharaj*

Dalam banyak literatur, sarjana muslim menuliskan bahwa *kharaj* adalah sejenis pajak yang dipungut dari non muslim atas tanah taklukkan yang dikuasai dengan kekuatan senjata. Tanah tersebut dipandang sebagai milik negara sehingga beberapa intelektual muslim mengatakan bahwa *kharaj* semacam uang sewa yang menjadi milik negara melalui pembebasan oleh tentara Islam yang selanjutnya tanah tersebut disewakan kepada penduduk non-muslim.

*Al-Kharaj* sering disebut sebagai pajak tanah, yakni tanah yang diperoleh kaum muslimin melalui peperangan (*ghanimah/fay'*) yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya penggarap diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Islam. *Kharaj* dipernalkan pertama kali setelah perang khaibar, ketika Rasulullah, membolehkan orang-orang Yahudi khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintahan Islam.

Tanah taklukkan tidak diserahkan kepada anggota pasukan perang karena pemilik lama menawarkan untuk mengelolah tanah tersebut sehingga oleh pemerintah Islam dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal dan syarat memberi setengah dari hasil panen dari tanah tersebut. Pungutan tersebut diambil oleh pemerintah muslim dan menjadi salah satu sumber

---

<sup>43</sup> Konsep *Jizyah* sebagai sebuah pajak mempertimbangkan kemampuan nonmuslim, *jizyah* hanya dibebankan kepada kepala keluarga nonmuslim yang masuk dalam kategori mampu. Lihat; Rahmat Abd. Rahman, *Keuangan Negara Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia* (Studi Komparasi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah Karya Al Mawardi Dan Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Karya Abu Ya'la) Desertasi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014 hal 69

pendapatan utama pada awal pemerintahan Islam. Dalam perkembangannya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, *kharaj* yang dipungut dari nonmuslim juga harus dibayar oleh umat muslim yang membeli tanah *kharajiyah* dari non muslim.

c. *Ushr* bea cukai

*Ushr* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *ushr* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Adapun pendapat Rahmat yang beliau kutip dari Ibnu Manzur, *Ushr* adalah cukai yang dikenakan atas barang impor ke dalam negeri Islam selain sumbangan.

Bea cukai barang impor dalam Islam mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syuranya. Menurut Rahmat, latar belakang penerapan *usyur* sebagai pajak perdagangan terjadi karena pada masa Umar berdasarkan laporan Abu Musa al-Asy'ari bahwa para pedagang muslim yang berdagang ke wilayah nonmuslim dipungut pajak perdagangan oleh pemerintah wilayah setempat. Demi menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional serta kemaslahatan masyarakat, Umar pun memutuskan memungut pajak dari para pedagang nonmuslim yang berdagang ke wilayah Islam.

Djazuli (2003:238) menjelaskan bahwa *ushr* pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *ushr* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang.

Apakah ia seorang muslim, *dzimmi*, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang *dzimmi* 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. *Ushr* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar 'usur sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyashah syar'iyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.

#### 4.3 Legitimasi Syariah Atas Adanya Pajak Baru Dalam Islam

Dalam sejarah keuangan pemerintahan Islam, setelah melalui perjalanan yang panjang seiring perluasan wilayah kekuasaan, muncul pungutan-pungutan baru atas nama pajak di luar dari pajak-pajak yang ada di pemerintahan Islam awal. Pungutan ini dilakukan penguasa atas rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Atas dasar kepentingan umum tersebutlah sebagian ulama membolehkan adanya pajak baru dalam kondisi khusus. Para ulama dan intelektual-intelektual muslim menyebutnya dengan istilah *dharibah*.<sup>44</sup> Pendapatan dari *dharibah* muncul dalam Islam sebagai sumber pendapatan darurat ketika semua pendapatan-pendapatan negara telah dimaksimalkan dan terjadi kekosongan dalam baitul mal sehingga pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam negara.

Pendapatan negara dari pajak yang dipungut dari kaum muslim merupakan sebuah ijtihad kolektif antara penguasa dan para ulama untuk menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariat yang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan menghilangkan mudharat bagi manusia

---

<sup>44</sup> Pungutan baru atas rakyat tersebut disebut sebagai *dharibah* oleh banyak ulama dan intelektual diantaranya. Dari kalangan ulama seperti Yusuf Qardhawi, Taqiyuddin An-Nabhani, dari kalangan intelektual muslim seperti Gusfahmi, Firman Menne, Daud Rasyid



baik dunia maupun akhirat. Keberadaan kas negara merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga dan membangun umat. Sehingga kepala negara dalam Islam dapat membuat dan menetapkan pajak baru menurut perubahan keadaan.

#### **4.3.1 Eksistensi *Dharibah* (Pajak) Dalam Sumber Hukum Islam**

Berbicara tentang legitimasi dalam masalah syariah berarti berbicara dengan masalah hukum. Diketahui bahwa sumber utama dari segala sumber hukum Islam adalah wahyu, baik itu al-Qur'an maupun sunnah atau hadis.<sup>45</sup> Selain kedua sumber tersebut terdapat sumber yang lain yakni *ijma* para ulama. Dalam pandangan al-Khail (2011:48-49), *Ijma* adalah salah satu sumber utama dari agama Islam. Ia telah memberika pengaruh yang besar dalam penetapan hukum dan perubahan hukumnya sesuai dengan waktu, adat, keadaan, dan tempat serta berbagai permasalahan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah, atau ada nashnya akan tetapi masih kurang jelas (*mubham*) atau yang multi tafsir. *Ijma* adalah sarana yang benar untuk melaksanakan prinsip dan hukum Islam di tengah kemajuan zaman baik sekarang maupun akan datang.

Menurut Manan (2006: 65) salah satu fakta yang harus diketahui bahwa hukum Islam telah menjangkau seluruh alam Islami dengan sebuah aspeknya, keberagaman bangsa dan peradabannya. Hukum Islam mampu memenuhi berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosa berbagai penyakit dan problem disetiap masalah dengan menyelesaikan secara adil dan benar. Hal ini disebabkan karena hukum Islam memiliki keluhuran fitrah, keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, tegaknya diatas prinsip keadilan, dan selalu memerhatikan kemaslahatan dunia.

---

<sup>45</sup> Rasulullah tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ada banyak ulama yang mengatakan bahwa perkataan Rasulullah adalah wahyu. Hal ini karena al-Quran tidak bisa lepas dari sunnah Rasulullah sebagai intrepertasi dari al-Quran itu sendiri

Konsep wahyu menerangkan bahwa Islam dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan menghilangkan mudharat bagi manusia baik dunia maupun akhirat. Hal ini bisa dilihat dalam surah al-Anbiya ayat 107 “ *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*”. Dalam firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa Allah mencanangkan kemaslahatan bagi para hamba-Nya.

Menurut Ali Yafie, kenyataannya secara kuantitas kedua macam wahyu diatas terbatas sehingga memerlukan sebuah penalaran.<sup>46</sup> Hal itu dilakukan agar senantiasa dapat merespon setiap perubahan dan perkembangan yang ada. Inilah yang dimaksud oleh Abdul Manan bahwa Hukum Islam mempunyai sifat *murunah* (elastis) yang menakjubkan sehingga menjadikannya fleksibel dan lentur, mampu mencukupi setiap masalah baru dan sanggup mengatasi dilemma yang terjadi di zaman modern. Tentu yang dimasuk dalam hal ini adalah dalam perkara muamalah. Seperti yang dijelaskan oleh Syafii Antonio bahwa syariat Islam terbagi menjadi tiga hal pokok, yaitu : Aqidah, Syariat dan akhlak. Aqidah dan akhlak bersifat konstan, tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat dan tidak terdapat medan *ijtihad* di dalamnya. Sementara syariat terdiri atas dua bagian yaitu ibadah *mahdah* dan mua'malah. Secara umum hukum untuk keduanya adalah ibadah mahdah haram dilakukan selama tidak ada dalil yang memvaliditasinya dan mua'amalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga untuk perkara-perkara muamalah boleh dilakukan dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat selama tidak ada dalil yang menerankan keharamannya.

---

<sup>46</sup> Materi yang terkandung di dalam AL-Quran pada umumnya bersifat global. Seringkali hanya mengetengahkan suatu persoalan hanya pada prinsip-prinsipnya tanpa perincian. Lihat; Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungn Hidup, Asuransi, Hingga Ukhwah* (Bandung: Mizan, 1995), hlm 114

Pajak merupakan salah satu bentuk muamalah manusia dan memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, jika dicari dalam sumber hukum utama (Alquran dan Sunnah) maka tidak ditemukan ayat yang menjelaskan keberadaan (kebolehan) pajak secara langsung. Justru yang ada adalah dalil dari hadist yang mencela keberadaannya. Dari sekian hadist yang menunjukkan tentang tercelanya pajak dan para pelakunya akan diazab di neraka, akan tetapi kualitas hadist tersebut sebagiannya masih dipertanyakan oleh ahli hadist. Adapun sebagian hadist yang shahih, mengenai maknanya pun ulama berbeda pendapat.

Sementara seorang penguasa memiliki hak untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan kemaslahatan sehingga jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*).

Inilah *ijtihad* yang dikeluarkan oleh ulama yang setuju dengan adanya pajak, mereka memandang bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, Allah swt. telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika dalam kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut. Sehingga legalitas pajak dalam syariah berdasarkan *ijtihad* yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam pada suatu masa untuk suatu kasus.

#### 4.3.2 Kaidah Hukum Syariah untuk Legalitas Pajak Darurat (*Dharibah*)

Untuk mendapatkan legitimasi pajak sebagai sebuah pendapatan negara maka dibutuhkan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan tersebut. Kerangka teori yang dimaksud adalah kaidah *fiqih* sebagai teori yang digunakan oleh ulama untuk ketepatan pelaksanaan *fiqih*. Diantara berbagai kaidah yang relevan dengan adanya sebuah pungutan baru berupa pajak (*dharibah*) untuk kemaslahatan seperti;

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2003:254). Kaidah *fiqih* yang pertama ini menjelaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan muamalah boleh dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Dalam permasalahan pajak sebagai sebuah bentuk muamalah memang terdapat dalil-dalil tentang tercelanya namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dalam dalil tersebut adalah pungutan jahiliah yang disamakan dengan pajak. Dimana pungutan ini diambil dengan jalan kekerasan, dan menghalang-halangi orang diwilayah perbatasan jika tidak menyetorkan sebagian dari barang bawaan para pedagang yang melintas. Selain itu makna *al-Muks* dalam lafaz hadist yang diterjemahkan sebagai pemungut pajak dalam bahasa Indonesia, dalam hadist tersebut juga bisa untuk orang-orang yang mengambil zakat secara tidak adil. Sehingga *al-muks* dalam pemaknaanya mengandung banyak arti dengan demikian tidak khusus untuk penarik

pajak.<sup>47</sup> Dan para ulama memandang bahwa derivasi suatu hukum berdasarkan *masalah mursalah* merupakan metode yang sangat penting bagi persoalan-persoalan yang tidak ada petunjuk *nassnya* secara jelas.

- b. Menghindari kesulitan dan bahaya harus didahulukan dari pada mendatangkan keamanan dan kenyamanan. Dengan kaidah ini pajak dibolehkan oleh ulama agar kesulitan dalam pemerintah dengan tidak adanya dana dapat menjadikan pemerintah dalam posisi tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, yang pada akhirnya stabilitas dan keutuhan negara menjadi terganggu yang akan berujung ketidakamanan dan sampai pada kemiskinan di dunia Islam
- c. Sesuatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan merelakan pengorbanan lain yang lebih kecil.

---

<sup>47</sup> Aris Munandar mengatakan bahwa para ulama menyebutkan bahwa *maks* itu memiliki beberapa bentuk. (1) *Muks* yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah yaitu uang pajak yang diambil dari para penjual di pasar (2) Uang yang diambil oleh amil zakat dari *muzakki* untuk kepentingan pribadinya setelah dia mengambil zakat. (3) Uang yang diambil dari para pedagang yang melewati suatu tempat tertentu. Uang yang diambil tersebut dibebankan kepada barang dagangan yang dibawa, perkepala orang yang lewat atau semisalnya. Ketiga bentuk *maks* ini disebutkan oleh penulis kitab *Aunul Ma'bud* (Syarh Sunan Abu Daud). Penulis Aunul Ma'bud mengatakan, "Dalam *al Qamus al Muhith* disebutkan bahwa makna asal dari *muks* adalah mengurangi atau menzalimi. *Muks* adalah uang yang diambil dari para pedagang di pasar pada masa jahiliyyah atau uang yang diambil oleh amil zakat (untuk dirinya) setelah dia selesai mengambil zakat. Penulis kitab *an Nihayah* mengatakan bahwa *muks* adalah pajak yang diambil oleh *maakis* atau pemungut *maks*. Sedangkan penulis kitab *Syarh as Sunah* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemungut *muks* adalah orang yang meminta uang dari para pedagang jika mereka lewat di suatu tempat dengan kedok '*ushr* (yaitu zakat)". Dalam Nailul Author, asy Syaukani mengatakan, "Pemungut *muks* adalah orang yang mengambil pajak dari masyarakat tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan". Memungut *muks* adalah haram dengan sepakat ulama. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa perbuatan memungut *muks* adalah dosa besar.

Fiqih *siyasah* di dalam Islam yang meliputi pengaturan kenegaraan, menurut Djazuli harus diorientasikan kepada penolakan kemafsadatan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama pencapaian kemaslahatan sebanyak mungkin. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “apabila dihadapkan kepada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu kemafsadatan yang kadar mudharatnya lebih besar, dan pada saat yang sama menerima salah satu kemafsadatan yang kadar mudharatnya lebih kecil”. Jika hanya ada dua pilihan yang keduanya sama-sama kebaikan atau sama-sama keburukan maka yang sesuai dengan syariat adalah memilih yang nilai kebaikannya lebih besar meski dengan kehilangan kebaikan yang lebih rendah dan mencegah keburukan yang lebih besar meski dengan melakukan keburukan yang lebih rendah. Pajak yang dibebankan kepada kalangan tertentu memang seorang muslim mendapatkan dua beban atas harta yakni zakat dan pajak (*dharibah*), akan tetapi kekosongan kas negara akan mengakibatkan ketidakstabilan negara sehingga akan berujung pada kerugian yang lebih besar.

- d. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas yang lebih kecil.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak jarang pemerintah dihadapkan kepada beberapa hal yang mudarat bagi rakyat. Seperti pajak dalam keadaan demikian pemerintah harus mampu memilih sesuatu yang memiliki tingkat kemudharatan yang paling kecil, dan pilihan itulah yang harus dilaksanakannya. Hal ini menurut Djazuli

(2003:37) sesuai dengan kaidah mengambil yang mudaratnya lebih sedikit.

- e. Sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan kewajiban tidak terpenuhi maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Kaidah ini bisa ditarik jika tidak adanya pajak sebagai sumber pendapatan negara akan menimbulkan banyak kemudaratn. Maka kaidah fiqih “setiap kemudaratn harus dihilangkan” dan kaidah yang lain “setiap kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya suatu sarana, maka sarana itu pun wajib hukumnya” (Djazuli,2003:90-91).

Kaidah-kaidah ini menuntut segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan seperti infrastruktur ekonomi, keamanan, peningkatan kemampuan orang-orang miskin untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, pelatihan dan pendidikan serta peningkatan kemauan yang lebih kuat.

#### **4.3.3 Eksistensi Pajak yang tak Lepas dari Perbedaan Pendapat**

Tidak adanya dalil yang menjelaskan keberadaan pajak darurat (*dharibah*) dalam Alquran dan sunnah secara langsung menjadi sebuah tanda tanya di kalangan sebagian ulama, justru yang ada adalah penarik *mukus* yang mendapatkan celaan dalam beberapa hadist bahkan diancam dengan azab neraka. Para ulama telah mengeluarkan pendapat mengenai keberadaanya. Seperti *jumhur* ulama Hanafiyah, seperti Muhammad 'Uma'im al-Barkati, menyamakan pajak dengan *na'ibah* (jamaknya *nawa'ib*). Ia berpendapat bahwa *na'ibah* (pajak) boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Kemudian *jumhur* ulama Malikiyah, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan bahwa para ulama Malikiyah sependapat bila datang satu

kebutuhan mendesak kepada kaum muslimin setelah membayar zakat, maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut. Sementara *jumhur* ulama Hanabilah, seperti Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipungut oleh sultan dianggap sebagai jihad dengan harta, yang wajib terhadap orang kaya. Pungutan ini dikenal dengan sebutan *kalf al-sulthaniyah*. Sedangkan ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Syekh Syaltaut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* V/39 menafsirkan Qur'an Surat An-Nisaa' ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : "...adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan". Syekh Syaltaut menyatakan bahwa pajak diadakan oleh penguasa ketika ada kebutuhan. Seseorang harus membayar pajak, dan itu dapat disamakan dengan utang akibat sirkulasi dan aktivitas modal (Arif, 2013:35-63).

Kemudian Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa apabila dalam negara Islam ada yang membutuhkan, sedangkan zakat tidak mencukupi, atau masyarakat memerlukan biaya untuk menanggulangi masalah keamanan dan ekonomi atau biaya diperlukan untuk menegakkan agama, baik dakwah maupun pendidikan, maka untuk menanggulangi keperluan tersebut wajib kepada pemerintah Islam untuk minta bantuan orang kaya, sebab tuntutan wajib itu tidak akan terselesaikan tanpa ada uang, padahal uang tidak ada kecuali dengan mewajibkan pajak. Maka berlakulah di sini kaidah "sesuatu yang menjadi wajib hukumnya".



Selanjutnya, mufti Al-Azhar Mesir, Syekh Syaltaut, dalam kitab *Al-Fatawa al-Kubra*, menegaskan bahwa hakim boleh memungut pajak dari orang yang mampu secara ekonomis untuk kemaslahatan asalkan tidak berlebihan (melampaui batas). Muhammad Abu Zahrah juga membolehkan pajak di samping zakat. Abu Zahrah menuturkan bahwa pajak tidak ada pada era Rasulullah Muhammad SAW. Namun itu bukan karena pajak diharamkan dalam Islam, akan tetapi karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu, sehingga tidak diperlukan campur tangan negara dengan menarik pajak.

Sementara Ulama-ulama seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi menyamakan *muks* ataupun *ushr* (1/10) sebagai pajak atau cukai sehingga mereka mengharamkan pajak dan bea cukai, dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga akan diazab dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam (Arif, 2013:35-63).

#### **4.4 Relevansi *Maqasyid Al-Syari'ah* dengan Pajak Darurat**

##### **4.4.1 Konsep *Maqashid Al-Syari'ah***

Kata *Maqashid al-Syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata *maqshid* dan *syari'ah*. Menurut Aspari Jaya Bakri sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, *maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sementara syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Mengenai *maqshid syariah* ini, Ahmad (2011: 217-235) memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-Syari'ah*

adalah maksud serta tujuan al-Syari' (Allah swt.) menurunkan syariat-Nya secara umum kepada manusia. Allah swt menurunkan syariat kepada umat manusia bukan tanpa tujuan tertentu. Tujuan diturunkannya syariat ialah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dan menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Kemaslahatan inilah yang menjadi *kunci* dan sekaligus *tujuan syariat (maqâsid al-Syari'ah)* baik yang bersifat segera (dunia), maupun untuk masa yang akan datang (akhirat).

Al-Qur'an adalah totalitas Syari'ah dan kitab yang menjadi *way of life* umat Islam sepanjang masa untuk kemaslahatan dunia dan akhirat . Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam mengenai kemaslahatan secara garis besarnya telah tercantum dalam kitab suci al-Qur'ân. Semua aturan hukum Allah yang disyariatkan mempunyai tujuan, dalam pandangan Asy-Syatibi bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.<sup>48</sup>

Dari sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum yang dikandungnya mengandung kemaslahatan. Artinya, jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *maqashid al-syariah* dilihat dari ruh syariahnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Di sinilah letak bahwa al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil-Alamin* yang merupakan inti syariah atau hukum Islam.

---

<sup>48</sup> Titik tekan *maqashid syariah* yang dikemukakan asy-Syatibi secara umum bertolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan, di antaranya al-Nisa': 165, al-Anbiya': 107, Hud: 7, al-Zariyat: 56, al-Mulk: 2, al-Maidah: 6, al-Ankabut: 45, al-Haj: 39, dan al-Baqarah: 179

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk tujuan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyyin*), ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara akal (*hifzh al-aql*) terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan terpelihara harta (*hifzh al-mal*) (Chalil, 2009:93).

Seseorang akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya kerusakan atau mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok dimaksud dengan baik. Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyyah*, *maqashid al-hajiyyah*, dan *maqashid al-tahsiniyyah*. Penetapan kepada tiga tingkatan ini oleh al-Syatibi didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid dharuriyat* menempati peringkat pertama, disusul oleh *maqashid al-hajiyat* dengan menempati peringkat kedua, dan disusul pula oleh *maqashid al-tahsiniyat* yang menempati peringkat ketiga. Di sisi lain dalam aplikasinya, peringkat ketiga dapat melengkapi dan menyempurna peringkat kedua, dan peringkat kedua dapat melengkapi dan menyempurna peringkat pertama. Sedangkan peringkat pertama menjadi pokok bagi peringkat kedua dan ketiga.

#### **4.4.2 Pajak dengan Pendekatan Maqashid Syariah**

Pada hakikatnya ketiga tingkatan *maqashid* dimaksudkan untuk memelihara dan merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan, yang merupakan kebutuhan mendasar manusia, hanya saja satu sama lain berbeda tingkatan dan skala prioritasnya. Tingkatan pertama bersifat primer, tingkatan

yang kedua bersifat sekunder dan tingkatan ketiga bersifat komplementer. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia.

Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban pajak sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik.

Al-syaitibi dalam Djazuli (2003: 11) menyebut bahwa, untuk memelihara yang bersifat *Dharuriyyah* seperti: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta perlu diperhatikan dua hal penting. Dalam hubungan ini, kedua hal itu adalah (1) pembinaan terhadap usaha-usaha yang dapat memelihara 'perwujudan' hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* di atas (2) pertahanan dari usaha-usaha yang dapat mengakibatkan 'penghilangan' hal-hal yang bersifat *dharuriyyah*. Dalam memelihara akal, misalnya kebijakan mewajibkan masyarakat untuk belajar merupakan usaha, sedangkan kebijakan melarang masyarakat untuk menyalahgunakan obat (yang dapat menurunkan minat dan prestasi belajar mereka) merupakan usaha. Dalam perspektif kekinian, usaha pertama mirip dengan 'perekayasa masyarakat' (social engineering) dan usaha kedua mirip dengan pengertian yang dicakup dalam istilah 'pengendalian masyarakat' (social control).

Salah satu kewajiban seorang pemimpin yang disebutkan oleh imam Al-Mawardi adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat

dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Serta memelihara tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan dara muslim dan nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (Djazuli, 2003:62). Sehingga kewajiban seorang pemimpin dalam sebuah negara berkaitan dengan *maqashid syariah* yang meliputi hal-hal pokok (*dharuri*).

Kebijakan pemungutan pajak sementara untuk sekedar mengisi kekosongan kas negara merupakan suatu cara menutup jalan menuju mafsadat besar. Hal ini karena keamanan dan upaya untuk kesejahteraan memperoleh prioritas tersendiri dalam Islam, sementara ketiadaan dana menyebabkan kesulitan yang berdampak buruk bagi mayoritas penduduk. Adapun tindakan memungut pajak untuk memenuhi kas negara dari kalangan tertentu bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan mayoritas. Seperti belanja pertahanan, belanja pendidikan, belanja infrastruktur. Yang mana menurut Chapra (2000:285) sebagai salah seorang intelektual muslim, tidaklah mungkin memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik dan sosial yang begitu besar dari sebuah perekonomian modern yang efisien dan berkembang dan mempercepat pembangunan dengan keadilan sosioekonomi tanpa adanya pendapatan dari pajak yang memadai. Bahkan Chapra dalam mempertahankan justifikasi sistem pajak, melihat titik awal dan mengembangkan sistem pajak perlu dilihat dari manfaatnya merealisasikan *maqashid* tanpa melanggar ajaran al-Quran dan as-Sunnah dan tanpa menimbulkan pajak berlebihan atau defisit anggaran. Dengan pendekatan *maqsyid syariah* atas adanya pajak baru dapat dipandang bahwa Islam memberikan nafas kehidupan pada tubuh masyarakat yang sekarat dan mengendalikannya kearah kemaslahatan.

Dengan berpandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Memelihara kepentingan hidup (kemaslahatan dunia) yakni semua yang menjadi kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik, kewajiban pajak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan kepada umat manusia sebagai hamba Allah dalam kondisi dimana keuangan negara sedang lemah, sementara jika tidak dilaksanakan maka kebaikan yang terkandung dan yang dituju akan hilang.

Inilah yang mungkin mendasari Asy-Syathibi membolehkan penarikan pajak terhadap orang-orang ketika keadaan sedang lemah dan ada keputusan yang mendesak terhadap hal itu. Yaitu jika *baitul maal* sudah tidak sanggup memenuhi keperluan umum untuk penyelenggaraan kemaslahatan. Sehingga dapat dilihat bahwa relevansi *maqashid syariah* dengan penetapan pajak bertujuan memelihara sesuatu yang *dharuri* (pokok) dan menghilangkan kesulitan. Dengan kata lain pajak dibebankan atas dasar kemaslahatan umat, yang merupakan salah satu dari tujuan *Syariah (maqâsid al-Syarî'ah)*, pajak dipungut dari kalangan tertentu. Memang dilihat dari dalil-dalil tentang pajak, terdapat beberapa dalil yang mencelanya akan tetapi dilihat dari sudut pandang ketentuan umum al-Qur'ân yang berisi prinsip-prinsip kemaslahatan, penetapan pajak menjadi relevan dan signifikan dalam kondisi darurat.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dan lebih memilih untuk hidup bersama-sama. Hal ini disebabkan dalam kapasitas individualnya, mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pokoknya atau mempertahankan diri sekalipun. Seseorang sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Namun demikian, mereka tidak dapat hidup bersama-sama dalam keadaan konflik dan permusuhan dan kezaliman. Keadaan ini tidak

memungkinkan kehidupan sosial. Karena itu perlu memiliki ‘perasaan kolektif’ dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan untuk mencegah konflik dan kezaliman dan menjaga kebersamaan. Ketersediaan dana dalam hal ini sangat penting. Ketika sumber-sumber pendapatan negara telah dimaksimalkan dan terjadi kondisi kekurangan maka kewajiban tersebut jatuh ditangan orang-orang kaya dengan diwajibkannya pajak. Sehingga secara teoritis, semangat yang terkandung dalam pajak adalah semangat sosial dan tolong menolong antar sesama manusia yang seirama dengan konsep persaudaraan dalam Islam selain itu ketaatan kepada pemerintah dalam Islam juga menjadi kewajiban dalam Islam.

## **BAB V**

### **ANALISIS KONSEP PAJAK DALAM PANDANGAN INTELEKTUAL MUSLIM**

Istilah pajak telah dikenal luas dalam sosial masyarakat sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk kepentingan negara. Pungutan tersebut menjadi sumber keuangan dan pendapatan bagi negara termasuk di negeri-negeri muslim. Dalam perspektif wajib pajak, pungutan tersebut sering kali bermakna sebagai sebuah beban yang memberatkan bagi masyarakat. Adapun dari perspektif pemerintah dimaknai dengan pandangan yang berbeda yakni sebagai kontribusi rakyat untuk kepentingan negara. Subjektivitas penilaian terhadap pembatasan pemaknaan pajak cenderung terjadi, untuk menghindari hal tersebut dalam kajian ini mengenai definisi pajak secara baku diambil dari beberapa buku yang berkaitan dengan pajak seperti yang ditulis oleh Soemitro (2005: 7) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi yang lain juga disebutkan oleh Andriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Lantas bagaimana melihat konsep pajak dalam Islam? maka abstraksi atau interpretasi dari kalangan berilmu yakni intelektual muslim yang konsentrasi studinya adalah syariat dan intens dengan kajian-kajian ekonomi atau memiliki



pengalaman dengan bidang perpajakan perlu dilakukan untuk melihat bagaimana konsep perpajakan dalam Islam.

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendegaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya”. (QS.Al-Isra 36)*

*“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. Al-Nahl 43)*

## **5.1 Keberadaan Pajak dalam Pandangan intelektual Muslim**

Pajak sebagai sebuah sumber pendapatan negara tidak dipungkiri keberadaannya dalam Islam. Meskipun pajak diakui keberadaannya sebagai salah satu sumber pendapatan negara, namun pemaknaan yang diberikan oleh para intelektual muslim memiliki konsep yang berbeda dengan pajak modern.

### **5.1. 1 Pemaknaan Pajak**

Dengan menggunakan konsep pemaknaan pajak yang disebutkan oleh ahli perpajakan maka pajak menjadi sebuah sumber pendapatan negara modern termasuk di negeri-negeri muslim. Pajak sebagai sebuah sumber pendapatan negara tidak dipungkiri keberadaannya dalam sejarah Islam yang panjang. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh para intelektual muslim, diantaranya Hamid Habbe *“pajak dalam Islam itu ada, khususnya dalam negara Islam selain sumber pendapatan syariah yang disyariatkan seperti zakat, infak, sedekah. Tapi pajak di negara Islam itu khusus untuk warga negara non-muslim. Mereka diwajibkan bayar pajak untuk pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya keamanan, pelayanan dan lain-lain sebagainya.”*

Meskipun pajak diakui keberadaannya dalam sejarah Islam sebagai salah satu sumber pendapatan negara, namun pemaknaan yang diberikan oleh Hamid Habbe memiliki perbedaan konsep dengan pajak modern, dimana pajak dalam

Islam dikhususkan untuk non-muslim. Perbedaan ini juga dipertegas oleh intelektual muslim yang lain, diantaranya Idris yang merupakan salah seorang pengajar ekonomi syariah di UIN makassar, Idris mengungkapkan bahwa “*Dalam Islam tidak dikenal pajak yang dibebankan kepada kaum muslim, yang ada adalah zakat, zakat ini yang menjadi beban atas harta kaum muslim. Adapun pajak itu, untuk non muslim, yang kita kenal dengan jizyah dan kharaj, yaitu pajak sebagai kontribusi atas perlindungan mereka terhadap pemerintahan Islam.*”

Berdasarkan pandangan intelektual muslim diatas, memberikan gambaran bahwa konsep pajak modern yang didefinisikan oleh ahli perpajakan berbeda dengan konsep pajak yang ada dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari pajak dalam Islam dikhususkan bagi warga negara non-muslim.<sup>49</sup> Sementara konsep pajak modern bermakna umum untuk semua warga negara.

Kemudian dari perspektif yang lain, ada yang melihat bahwa zakat dalam Islam dapat dipahami sebagai konsep pajak dari segi pendapatan negara.<sup>50</sup> Masdar Mas'udi dalam bukunya *Risalah Zakat (pajak dalam Islam)* melihat pajak sebagai zakat “*zakat adalah roh, sedangkan pajak adalah badan, pajak itulah zakat*”. Bahkan salah seorang intelektual muslim asal Pakistan mengatakan

---

<sup>49</sup> Kondisi demikian karena sistem pemerintahan berada pada kekuasaan Islam. Umat Islam diwajibkan membayar zakat selain sebagai kewajiban keagamaan juga sebagai kewajiban kepada pemerintah. Sehingga pada masa pemerintahan khalifah (kepala negara) memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dengan landasan bahwa kewajiban zakat ditarik oleh penguasa. Sementara kewajiban bagi warga negara non muslim adalah *jizyah* yang sifatnya selain sebagai hukuman bagi nonmuslim yang melakukan perlawanan dengan Islam (tidak menerima Islam) juga sebagai kontribusi dalam pemerintahan yang digunakan untuk kepentingan umum.

<sup>50</sup> Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang intelektual muslim. Halide menuturkan bahwa tidak ada pajak dalam Islam yang dibebankan kepada kaum muslim dalam sejarah Islam pada zaman Rasulullah, pajak hanya dikhususkan untuk non muslim yang dikenal dengan *jizyah*, *kharaj* sementara kaum muslim hanya diwajibkan zakat. Sehingga antara zakat dan pajak sama jika ditinjau dari segi pendapatan negara

bahwa zakat adalah satu-satunya pajak dalam Islam yang dijelaskan oleh Alquran.

Sementara dalam pandangan intelektual muslim yang lain mengatakan bahwa pajak dalam Islam selain dari *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* bea cukai juga dikenal istilah *dharibah* yakni pajak yang diambil dalam kondisi tertentu.<sup>51</sup> Adapun mengenai sifatnya, Firman Menne menjelaskan lebih lanjut bahwa “*sejarah Islam dalam pemerintahannya dimulai dari rasul, khalifa ur-rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya, ternyata pajak itu tidak menjadi sumber pendapatan utama, justru dia menjadi sumber pendapatan alternatif. Misalkan sumber pendapatan-pendapatan negara tidak ada, barulah dihadirkan itu pajak (dharibah)*”.

Sementara intelektual muslim yang lain melihatnya dengan pandangan yang berbeda, bahwa pendapatan-pendapatan dalam pemerintahan Islam yang diambil dari non muslim seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* tidak dapat dikatakan secara langsung sebagai pajak, seperti pendapat Gusfahmi dalam bukunya yang berjudul *Pajak Menurut Syariah*, ia membedakan antara pungutan-pungutan berupa *jizyah* dan *kharaj* yang ditarik dari non muslim dengan pemaknaan pajak (*dharibah*), yang dapat dilihat dari berbedanya subjek dan objek pungutan. Lebih lanjut Gusfahmi menggambarkan bahwa subjek dari *jizyah* dan *kharaj* adalah nonmuslim adapun objek dari *jizyah* adalah jiwa (*nafs*) dan objek dari *kharaj* adalah tanah taklukan sementara pajak (*dharibah*) ditarik atas harta dari seorang muslim dalam hal ini objek dari pajak (*dharibah*) adalah harta. sehingga menurut Gusfahmi yang dimaksud pajak dalam Islam adalah *dharibah*,

---

<sup>51</sup> Pendapat ini dijeleskan oleh banyak ulama, baik dari kalangan ulama klasik maupun ulama kontemprorer diantaranya Yusuf Qardhawi, Hasan Albanna, Taqiyuddin Nahbani Selain dari kalangan ulama juga dari kalangan intelektual muslim seperti Umar chapra, Mannan, Daud Rasyid, Didin hafiduddin, Adiwarmar, Firman Menne, Rahmat Abdurrahman dan Mudzakkir Arif

yakni pungutan tambahan atas seorang muslim setelah zakat dalam kondisi tertentu.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alimuddin, bahwa *jizyah* dan *kharaj* tidak dapat dikatakan sebagai pajak sebab realitas pajak yang kita ketahui tidak sama dengan realitas *jizyah* dan *kharaj* meskipun sama dalam bentuk pungutan yang harus disetorkan kepada negara. *Jizyah* dan *kharaj* merupakan sebuah konsep pendapatan negara yang khusus ada dalam pemerintahan Islam yang jika ditinjau dari akad muamalah dan latar belakang berbeda dengan realitas yang ada dalam konsep pajak modern. Alimuddin memberikan contoh pungutan berupa *kharaj*, jika dilihat dari latar belakangnya maka pendapatan negara dari *kharaj* merupakan akad sewa, dimana tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sehingga status tanah tersebut menjadi milik pemerintahan Islam atas peperangan yang terjadi. Bagi penduduk asli dibiarkan untuk mengolah dengan catatan membayar *kharaj* kepada pemerintahan Islam.

Lebih jauh mengenai pungutan yang diambil dari kaum muslim dalam kondisi darurat, Alimuddin menjelaskan bahwa "*pungutan yang dimaksud dalam kondisi darurat (kondisi dalam perang) tersebut dalam Islam, itu sebenarnya bukan pajak. Itu upaya untuk mempertahankan diri, dengan minta bantuan. Ini beda konteksnya dengan pajak yang bersifat rutin*". Sehingga dalam pandangan Alimuddin, pungutan tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai pajak. Berkaitan dengan pungutan dalam kondisi darurat (*dharibah*), menurut Mudzakir lebih tepat dikatakan sebagai infaq bagi kaum muslim yakni upaya untuk menolong pemerintah dalam kondisi dimana baitulmal/kas negara dalam kondisi kosong atau kurang. Berbedanya batasan pemaknaan pajak, bagi sebagian kalangan intelektual ada yang memberikan definis pajak dengan

mengkombinasikan antara kewajiban dan sebagai sebuah sedekah. Seperti Saifullah Isri memandang bahwa pajak dalam Islam adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah atas warga negara. Disebut sedekah karena tidak ada imbalan langsung yang diterima si pembayar. Adapun Wajib dalam arti bisa dipaksakan demi kepentingan umum (*mashalih ammah*).

### 5.1.2. Problematika Atas Pemaknaan Pajak

Berdasarkan pandangan intelektual muslim yang telah dipaparkan di atas, nampak ada perbedaan batasan pemaknaan pajak. Secara umum dapat diulas menjadi beberapa pertanyaan; 1) Apakah pendapatan-pendapatan pada masa pemerintahan Islam seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ushr* dapat dikatakan sebagai pajak, 2) Apakah pungutan darurat dalam pemerintahan Islam yang disebut *dharibah* dapat dikatakan sebagai pajak, 3) Apakah pungutan *dharibah* sama dengan pajak modern? untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti akan menyajikan unsur-unsur suatu pungutan sehingga dikatakan sebagai pajak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh intelektual muslim bahwa sesuatu dikatakan sebagai pajak jika memenuhi persyaratan:<sup>52</sup>

1. Pembayaran yang diwajibkan oleh pemerintah
2. Tidak ada balasan atau imbalan secara langsung
3. Diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Bersifat rutin dari suatu aktivitas/terus menerus

**Syarat pertama pembayaran yang diwajibkan**, suatu pungutan dikatakan sebagai pajak jika diwajibkan oleh pemerintah. syarat ini memerlukan kajian

---

<sup>52</sup> Tiga persyaratan tersebut dikutip dari buku seorang intelektual muslim Afzalur rahman hal. 242. Sementara persyaratan ke empat dan lima merupakan pendapat intelektual muslim melalui wawancara. Kelima unsur tersebut juga merupakan unsur pajak modern

mendalam tentang suatu yang disebut sebagai kewajiban. Kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilakukan sehingga wajib terikat dengan masalah hukum.<sup>53</sup> Jika berangkat dari sudut pandang Islam (hukum Islam), perintah wajib dan mewajibkan harus memiliki landasan, terutama jika berkaitan dengan lima hal pokok dalam Islam yakni, agama, jiwa, harta, keturunan, akal.

Islam sebagai hukum memiliki sumber aturan Alquran, sunnah dan ijma. Perkara wajib atas suatu hal pokok (maqashid syariah) harus memiliki dalil yang memberikan legitimasi sekurang-kurangnya tidak terdapat dalil yang melarang jika hal tersebut berkaitan dengan muamalah antara manusia. Adapun pajak sebagai salah satu bentuk muamalah manusia yang berkaitan dengan kewajiban atas hak seorang muslim (harta) harus memiliki dalil yang bersumber dari syariah. Seseorang tidak boleh mengambil hak atas harta seseorang selain dari apa yang ditetapkan oleh hukum (syariah) boleh diambil,<sup>54</sup> sekalipun yang bertindak melakukan adalah penguasa.

Dalam konsep Islam, satu-satunya kewajiban utama yang diwajibkan atas harta seorang muslim adalah zakat.<sup>55</sup> sehingga jika suatu pungutan yang dikatakan pajak hanya terbatas pada satu syarat ini, yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah maka yang paling tepat dikatakan sebagai pajak bagi kaum muslim adalah zakat. Inilah yang mungkin menjadi dasar bagi sebagian intelektual muslim yang memandang bahwa satu-satunya pajak dalam Islam bagi

---

<sup>53</sup> Dari sudut pandang Islam, wajib adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan serta memiliki konsekuensi seperti dosa, atau hukuman.

<sup>54</sup> Terdapat banyak dalil tentang terlindunginya harta seseorang seperti “sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian.” (*Muttafaun’alaih*). Karenanya hukum asal harta seorang muslim adalah haram diambil tanpa ada *nash* yang membolehkannya. Sebagaimana sabda beliau dalam hadits yang lain, “Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dirinya.”

<sup>55</sup> Hukum yang berbeda ketika dalam keadaan darurat, yang mana sesuatu yang haram boleh dilakukan dengan pertimbangan darurat. Dalam hal pendapatan negara pajak (*dharibah*) dibolehkan dalam kondisi darurat yakni tidak ada lagi sumber pendapatan negara.

kaum muslim yang dijelaskan oleh alquran adalah zakat sebagaimana pandangan ini dikeluarkan oleh Fazlur Rahman. Namun pandangan ini ditentang oleh banyak intelektual muslim lainnya bahwa zakat tidak boleh dikatakan sebagai pajak. Pajak dikenal dalam dunia Islam baru-baru ini saja, pajak bersumber dari barat yang tidak ada hubungannya dengan unsur ketuhanan. Meskipun sama dalam bentuk kewajiban atas harta namun sifat wajib dalam zakat memiliki tempat tersendiri dalam Islam sebagai sebuah bentuk ibadah *mahdah* yakni ibadah yang memiliki ketentuan tersendiri dalam tata cara pelaksanaannya. Selain itu, sifat wajib dalam kewajiban zakat tetap berlaku sekalipun pemerintah tidak bertindak sebagai pihak yang mewajibkan (menarik).

Adapun kewajiban atas harta non-muslim yang diwajibkan oleh pemerintah dalam kekuasaan (Islam) adalah *kharaj*, *jizyah*, *ushr*. Meskipun dalam perkembangannya konsep *kharaj* dan *ushr* sebagai sebuah pungutan yang dibebankan kepada nonmuslim juga dibebankan kepada kaum muslim. Pungutan-pungutan tersebut memenuhi syarat pertama dikatakan sebagai pajak karena merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga dalam banyak literatur ekonomi Islam istilah-istilah tersebut dikatakan sebagai pajak. Selain itu, juga terdapat pungutan baru yang mendapat tempat dikalangan ulama sebagai pungutan darurat yang disebut sebagai *dharibah*. Pungutan ini juga memenuhi syarat pertama dikatakan sebagai pajak sebab bentuknya sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian untuk syarat ini semua pendapatan-pendapatan negara seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *ushr* dan *dharibah* dapat dikategorikan sebagai pajak.

**Syarat kedua adalah tidak ada jasa timbal balik atau imbalan.**

Syarat ini memberikan penjelasan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mendapat imbalan secara langsung kepada para pembayar

pajak. Uang yang diserahkan oleh rakyat kepada pemerintah merupakan sebuah bentuk muamalah yang lebih dekat dengan tolong menolong dan kerjasama. Tolong menolong dalam hal ini adalah rakyat sebagai pihak yang menolong/memberikan sebagian harta yang mereka miliki kepada pemerintah sebagai bentuk sedekah untuk menolong keuangan pemerintah yang sedang melemah atau membutuhkan dana yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan, sementara kerjasama dalam hal ini adalah pemerintah yang bertindak memberikan pelayanan kepada rakyat yang selanjutnya rakyat mendapatkan keamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Jika melihat pajak sebagai pendapatan negara yang diambil dari rakyat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung maka pendapatan negara seperti zakat, *ushr* bea cukai dan pajak *dharibah* memenuhi syarat ini sebab konsep zakat, *ushr*-cukai dan pajak *dharibah* ditarik tanpa imbalan secara langsung kepada para pembayarnya. Sementara *kharaj* dan *jizyah* tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pajak dalam syarat ini, hal ini karena *kharaj* diwajibkan berdasarkan konsep kepemilikan tanah, dimana tanah taklukan Islam menjadi milik pemerintah, seseorang dapat mengelolah tanah tersebut baik muslim maupun nonmuslim dengan syarat membayar *kharaj* sebagai sewa atas penggunaan tanah kharjiyah milik pemerintah Islam. sehingga pengelola tanah dapat dikatakan sebagai penyewa yang mendapat imbalan secara langsung atas tanah yang digunakan.<sup>56</sup> Adapun *jizyah* merupakan konsep pembayaran sebagai bukti ketundukan kepada pemerintahan Islam, ketundukan ini disebabkan karena perlawanan dan penentangan yang dilakukan nonmuslim terhadap dakwa Islam.

---

<sup>56</sup> Bagi penduduk asli yang kafir maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu karena hal ini karena tanah tersebut adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi ; ini berarti bukan membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut.



dimana para pembayar *jizyah* mendapatkan imbalan berupa keamanan jiwa, harta, aktivitas ibadah dalam kekuasaan Islam.

### **Syarat ketiga, diwajibkan kepada seluruh warga negara**

Dalam konteks modern pajak diwajibkan kepada seluruh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pembayar pajak (wajib pajak) tanpa membedakan status agama. Sementara pendapatan-pendapatan yang diambil dari rakyat dalam Islam mempertimbangkan agama hal ini karena nilai agama menjadi landasan dari setiap aktivitas pemerintahan dalam Islam

Dengan demikian semua pungutan-pungutan seperti zakat, *kharaj*, *jizyah* tidak dapat dikategorikan sebagai pajak dalam konteks modern. Adapun *ushr*-bea cukai dan *dharibah* dalam konteks modern tetap memenuhi syarat sebagai sebuah pajak hal ini karena bea-cukai dan *dharibah* dapat dibebankan kepada warga negara tanpa pertimbangan status agama untuk pemenuhan kemaslahatan umum meskipun dalam setiap pungutan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.

### **Syarat keempat digunakan untuk kepentingan negara**

Pajak yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk syarat ini, semua pendapatan negara seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ushr* dan *dharibah* dapat dikatakan pajak, sebab penggunaannya untuk kepentingan negara seluruhnya. Sekalipun konsep zakat memiliki tujuan tertentu dalam penggunaannya. Tetapi konsep delapan *asnaf* yang disebutkan dalam Alquran mencakup semua kepentingan negara. Sementara untuk semua pendapatan dari *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, dan *dharibah* penggunaannya tergantung *ijtihad* penguasa untuk kemaslahatan umum.

### Syarat kelima bersifat rutin

Dalam syarat ini zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*-cukai bersifat rutin jika sistem pemerintahan berjalan baik, bahkan zakat bersifat permanen sekalipun pemerintah tidak bertindak dalam pengelolaannya adapun *jizyah* dan *kharaj* menyesuaikan dengan kekuasaan Islam. *Jizyah* hanya dapat ditarik jika umat Islam mampu memberikan perlindungan sementara *kharaj* ditarik karena konsep tanah taklukkan kekuasaan Islam yang sewaktu-waktu dapat saja berubah jika kekuasaan Islam mengalami kemerosotan adapun *ushr* cukai hanya sebagai bentuk perlakuan sama atas negara lain yang menarik cukai.

Iuran yang melekat dari definisi pajak mengindikasikan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat rutin dari rakyat. Dalam realitas pajak yang bersifat rutin tidak sama dengan realitas *dharibah* sebagai pendapatan negara. Sebab konsep *dharibah* yang disepakati oleh para ulama dipungut dalam kondisi tertentu yakni ketika kas negara mengalami kekosongan atau kelemahan sementara dalam negara terdapat kebutuhan yang harus direalisasikan dan segera setelah kebutuhan tersebut terpenuhi maka pajak dihapuskan, hal ini karena kedudukan *dharibah* di dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai palang pintu terakhir dalam pemenuhan kas negara untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan utuhnya negara. Adapun *ushr* cukai juga bersifat rutin menyesuaikan dengan bentuk perlakuan negara lain dalam menjaga kestabilan perdagangan antar negara.

Demikianlah unsur-unsur yang terdapat dalam pajak, namun hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa realitas pajak yang berkembang di negeri-negeri muslim tidak lepas dari paradigma konvensional yang berkembang bersamaan dengan

semangat modern di dunia Islam.<sup>57</sup> Sehingga pajak memiliki konsep yang berubah ubah yang dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan dan sistem perekonomian. Di dunia muslim pajak mengalami perubahan makna setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah koloni bangsa Barat pada abad modern yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis, yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Islam semakin cenderung sekuler.<sup>58</sup> Akibatnya batasan pemaknaan pajak mengalami perubahan seiring perubahan bentuk konsep negara, hingga pajak menjadi sebuah istilah umum untuk menggambarkan sebuah pungutan dari rakyat (warga negara) kepada pemerintah untuk digunakan membiayai negara.

### 5.1.3 Analisa Pajak sebagai *Dharibah*

Sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam yang ditarik dari rakyat memenuhi sebagian besar unsur pajak, akan tetapi dari kelima unsur perpajakan

---

<sup>57</sup> Mugist (2003) juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip Islam di negara Islam mulai pudar bersamaan dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin banyaknya mengadopsi kebudayaan luar, terutama barat yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Islam semakin cenderung sekuler, lebih-lebih setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah koloni bangsa barat pada abad modern yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis. Jurnal Hermeneia jurnal kajian Islam interdesipliner vol.2 no.2 juli-des 2003 hal 174. Konsep pajak yang dikenal di Barat telah 'diboyong' ke dunia Islam seiring dengan melemahnya pengaruh dunia Islam yang dibarengi dengan pendudukan asing (colonial) sehingga nampak nilai utama yang dikedepankan dalam pajak modern adalah nilai ekonomi semata. Ibrahim Warde dalam bukunya Islamic Finance mengungkapkan bahwa setelah era colonial berakhir, negara-negara yang independen menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru pula. Pada 1950-an dan 1960-an terlihat kemunculan nasionalisme ekonomi dan penekanannya pada pertumbuhan dan pembangunan dan liberalisasi sebagai tahapan selanjutnya. Para liberalis menonjolkan aksen Islam dalam hal hak-hak kekayaan dan sanjungan pada keuntungan perdagangan untuk mendukung kebijakan *laissez-faire* (kebijakan yang membolehkan perusahaan-perusahaan bisnis untuk beroperasi dan berkembang secara bebas tanpa campur tangan atau control dari pemerintah. Lebih lanjut warde menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan sangat tersekulerisasi secara signifikan. Perdebatan ideology di era modern sudah dibingkai berdasarkan norma-norma Barat. Pada era Liberal, muslim yang belajar ekonomi gaya Barat (serta bidang pengetahuan lain yang berhubungan dengannya) mencoba untuk mentransfer ilmu pengetahuan tersebut pada dunia Islam. Ibrahim warde, Ibid., Hal 82-83

<sup>58</sup> Sistem pajak kapitalis di boyong ke negeri muslim. Karena kompilasi tersebut, para ulama mencari solusi dalam Islam selanjutnya melakukan ijtihad. Dan menemukan konsep *dharibah* sebagai kewajiban untuk kepentingan umum.

yang telah dipaparkan diatas dan jika unsur-unsur sesuatu dikatakan pajak harus memenuhi kelima unsur tersebut maka tidak ditemukan pajak dalam sejarah Islam yang sama dengan unsur tersebut. Namun realitas yang paling dekat dengan perpajakan hanya pada konsep *dharibah* dan *ushr*-bea cukai. Untuk *dharibah* sebagai pendapatan negara, empat syarat pajak diatas dapat dipenuhi oleh konsep *dharibah*, sementara syarat terakhir bersifat rutin tidak dipenuhi, hal ini karena *dharibah* dalam Islam dipungut dalam kondisi khusus (sementara waktu).

Untuk melihat kedekatan konsep pajak modern dengan konsep *dharibah* dalam Islam juga dapat dianalisis dari segi keberadaan, dimana kedua pungutan tersebut secara umum keberadaannya ditarik karena ada kebutuhan kas negara yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah kemudharatan yang akan terjadi jika ketiadaan kas negara. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di negeri-negeri berpendudukan muslim seperti Indonesia, dimana pajak digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Berbeda dengan konsep *jizyah* yang keberadaannya disebabkan karena konsep perlindungan yang diberikan pemerintahan muslim terhadap nonmuslim sementara *kharaj* keberadaannya karena konsep kepemilikan tanah taklukan.

Kedekatan pajak dengan *dharibah* juga dapat dianalisis dari sisi objek, dimana objek keduanya adalah sama yakni harta. Meskipun objeknya adalah harta namun tidak sama dengan zakat, hal ini karena zakat ada disebabkan adanya harta, sementara pajak ada karena adanya kebutuhan.

Batasan terhadap pemaknaan pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda hal ini karena secara historis pajak mempunyai perubahan makna dari masa ke masa seiring dengan perubahan konsep kenegaraan dan perekonomian.<sup>59</sup> Adapun titik kesamaan yang dapat ditarik atas pemaknaan pajak hanya pada batasan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah untuk kepentingan negara (kemaslahatan) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan demikian, batasan pemaknaan ini jika dilihat dalam sejarah Islam, maka pajak sebagai sebuah pungutan untuk kemaslahatan lebih dekat realitasnya dengan konsep *dharibah* dan *ushr* bea cukai, meskipun dalam hal-hal khusus tetap memiliki perbedaan. Keberadaan pajak dharurat dalam Islam bukan karena adanya *nash* Alquran dan hadist secara langsung sebagaimana zakat, akan tetapi keberadaannya berdasarkan *ijtihad* ulama dan penguasa walaupun demikian kesepakatan ini sudah bisa menjadi dalil dibenarkan dalam hukum Islam untuk perkara muamalah. *Dharibah* sendiri pada awalnya adalah konsep infak untuk penjagaan negara Islam. selanjutnya dilakukan pengembangan dari konsep infak dalam Islam menuju konsep pajak *dharibah*, hal ini karena anggaran belanja negara sangat berat dan besar setelah meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-perkara yang harus ditangani oleh negara sementara baitul mal kosong, pendapatan-pendapatan baitul mal semakin melemah seiring

---

<sup>59</sup> Setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah koloni bangsa Barat pada abad modern yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis, yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Islam semakin cenderung sekuler. Sistem pajak kapitalis di boyong ke negeri muslim sehingga perubahan pemaknaan pajak terjadi seiring perubahan bentuk konsep negara, hingga pajak menjadi sebuah istilah umum untuk menggambarkan sebuah pungutan dari rakyat (warga negara) kepada pemerintah untuk digunakan membiayai pemerintahan.

Dari perubahan-perubahan pemaknaan pajak hingga saat ini masih terus terjadi, seperti pajak oleh ahli perpajakan didefinisikan sebagai sebuah iuran yang harus disetorkan ke kas negara. Dari definisi itu nampak sebagai sebuah pembayaran yang memberatkan karena dianggap sebagai beban yang harus dipikul oleh rakyat. Akhirnya perubahan pemaknaan pajak dalam uud diganti menjadi kontribusi rakyat. Sehingga jika menggunakan definisi pajak modern dengan lima syarat diatas, tidak ditemukan dalam Islam. Namun realitas pajak modern yang lebih dekat dengan pajak yang ada dalam Islam hanya pada *dharibah* dan *ushr* cukai.

dengan melemahnya kekuatan Islam. oleh karena itu pemerintah yang memiliki amanah melindungi rakyat dan mengarahkan kepada kemaslahatan mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kekurangan kas, konsep infak berubah menjadi sebuah sumbangan wajib bagi orang-orang tertentu. Sehingga sifat wajib dalam infak tersebut mengubah makna menjadi sebuah pajak yang harus dibayarkan. Sifat wajib dalam konsep *dharibah* digunakan agar sumbangan tersebut memiliki daya kekuatan. Realitas *dharibah* inilah yang dikatakan sebagai pajak dalam Islam untuk kondisi tertentu.

## 5.2 Abstraksi Pemikiran Intelektual Muslim terhadap Sistem Perpajakan

### Modern

Negeri-negeri muslim tidak terlepas dari basis sistem kapitalisme sebagai pemenang perang pada masa modern, demikian pula dalam hal pendapatan negara tidak lepas dari adopsi rumusan sistem kapitalis. Ibrahim Warde menggambarkan bahwa para modernis berhasil memperluas pengaruhnya dengan tingkat kesuksesan yang bervariasi di seluruh dunia Islam, hampir seluruh wilayah-wilayah hukum (dengan pengecualian-pengecualian tertentu seperti hukum keluarga) terinspirasi secara langsung maupun tidak langsung oleh model-model Barat.<sup>60</sup> Seiring dengan impor terhadap model-model Barat, peran Ulama direduksi dan lebih mengutamakan peran oleh *representative*

---

<sup>60</sup> Ibrahim Warde memberikan sebuah contoh, ketika Mesir di bawah pemerintahan Muhammad Ali yang secara langsung terinspirasi oleh undang-undang Napoleon di Prancis. Selanjutnya dengan menggunakan Mesir sebagai sebuah model, negara-negara Islam lainnya secara tidak langsung dipengaruhi oleh ide-ide Prancis. Lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance keuangan Islam dalam perekonomian global*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009 hal 81-82

Dalam hal perpajakan Indonesia, salah seorang nara sumber memberikan penjelasan bahwa hukum pajak di Indonesia adalah warisan hukum belanda. Wawancara dengan Idris

(perlemen).<sup>61</sup> Sehingga metode masyarakat muslim dalam hal mendapatkan pendapatan negara mengabaikan rambu-rambu syariah<sup>62</sup>. Peniadaan rambu-rambu syariah dalam masalah pendapatan negara dapat dilihat dari posisi pajak yang mengganti posisi zakat sebagai sumber pendapatan utama dalam masyarakat muslim. Dalam perkembangan selanjutnya, posisi pajak yang menjadi sumber pendapatan utama negara semakin dimanjakan dan telah dianggap sebagai sumber pendapatan *final*. Sementara zakat yang secara normatif diurus penuh oleh negara kini menjadi urusan rumah tangga-rumah tangga dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada. Pandangan Islam terhadap pajak modern yang diinterpretasi oleh intelektual muslim juga memberi pandangan yang berbeda, Berikut Abstraksi pemikiran intelektual muslim terhadap perpajakan

### **Pendapat yang Setuju dengan Pemungutan Pajak**

#### **1. Didin Hafidhuddin**

Dalam masalah yang dibicarakan ini Didin mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam,

---

<sup>61</sup> Warde memberikan kesimpulan di dunia Islam sekalipun Syari'ah menjadi sumber-sumber prinsip semua legislasi, para wakil rakyat terpilih mempunyai kebebasan luas untuk menggunakan sumber-sumber legislasi lainnya. Ibrahim Warde, *ibid.*,

<sup>62</sup> Mugist (2003;174) memandang bahwa setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah koloni bangsa Barat pada abad modern yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis.

dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

## 2. Daud Rasyid

Pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Alquran maupun hadist tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*. Pajak (*dharibah*) diperbolehkan dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yang boleh dipungut dalam keadaan khusus, yaitu tatkala sumber pendapatan dari sumber-sumber utama seperti ghanimah, shadaqah (zakat dan *ushr*-pertanian), serta *fa'i* (*kharaj*, *jizyah* dan *ushr* cukai) tidak mencukupi kebutuhan baitul mal (kas negara). Jika baitul mal sudah mencukupi, pajak (*dharibah*) harus dihapus.

## 3. Mukhlis Supri

Dalam pandangan Mukhlis, pajak sebagai pendapatan negara merupakan sesuatu yang dibolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan yang mana kemaslahatan lebih diutamakan dalam Islam. Apalagi negeri-negeri muslim adalah negara berkembang yang membutuhkan dana untuk pembangunan. Bahkan dalam pandangannya tanah-tanah yang menganggur harus dikenakan PBB yang lebih tinggi agar pemilik tanah terdorong untuk mengelolah



kepada hal yang produktif. Mukhlis memperkuat pandangannya dengan Mengeluarkan dalil tentang tugas manusia sebagai khalifa.

“jadi tugas sebagai khalifa itu menunjukkan bahwa bumi diciptakan untuk dikelola oleh manusia dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan manusia. Bumi diciptakan untuk dimakmurkan, kalo dimakmurkan berarti harus dikelola sebaik-baiknya, kepentingan muamalat, membangun masyarakat”.

Meskipun setuju dengan pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum untuk kemaslahatan, dalam pandangannya Mukhlis tetap menginginkan ada kejelasan perpajakan, yakni sumber pemasukan pajak diperoleh dari pendapatan-pendapatan halal.

### **Pendapat yang tidak setuju dengan pemungutan pajak**

#### **1. Idris**

Terkait dengan pajak sebagai sumber pendapatan yang diwajibkan kepada umat Islam, Idris memandang bahwa dalam Islam sesuatu yang wajib, harus ada perintahnya.<sup>63</sup> Hal ini berarti ada dalil yang menjelaskan bahwa pajak itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dalam Islam kewajiban seorang muslim atas harta hanya zakat, sehingga jika pemerintah di negeri muslim ingin mewajibkan sesuatu atas harta seorang muslim maka itu adalah zakat, kewajiban zakat inilah yang seharusnya dikelola menjadi sumber pendapatan bagi negara. Adapun pajak dalam Islam menurut Idris tidak jelas perintahnya. Sehingga dalam konteks negara dengan

---

<sup>63</sup> Dalam wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti, Idri memandang bahwa “Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal pajak yang dibebankan kepada kaum muslim. Yang ada adalah zakat, zakat inilah yang menjadi beban atas harta kaum muslim. Adapun pajak tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa itu merupakan sebuah kewajiban”

mayoritas muslim, seharusnya negara memaksimalkan zakat sebagai sumber pendapatan negara.<sup>64</sup>

Lebih lanjut sebagai seorang intelektual, Idris tidak setuju dengan pemungutan pajak sebagai pendapatan negara di negeri muslim karena pajak dianggap sebagai salah satu bentuk penyiksaan, hal ini karena seseorang mendapat beban atas harta yang mereka miliki terutama untuk seorang muslim yang mendapatkan dua kewajiban sekaligus atas harta.

Selain itu, ketidak-setujuan Idris mengenai pajak di negeri muslim karena pendapatan dari sumber pajak tidak memperdulikan rambu-rambu *syariah* khususnya mengenai objek pajak yang mencampur adukkan antara halal dan haram.<sup>65</sup> Hal ini berarti pajak selain sebagai sebuah pungutan yang tidak sesuai dengan konsep Islam, objek pajak juga bertentangan dengan nilai Islam sementara dalam masalah ekonomi, masyarakat muslim seharusnya memastikan bahwa apa yang ia peroleh dan terima adalah sesuatu yang baik. Baik dari sumber, cara mendapatkan dan cara mengeluarkan hal ini karena dalam setiap aktivitas kaum muslimin berorientasi utama untuk mencari keridhaan Allah.

---

<sup>64</sup> Idris memandang bahwa zakat seharusnya dimaksimalkan menjadi sumber pendapatan negara *“selama ini berfokus pada pajak, kenapa tidak menggunakan zakat? Dalam sebuah penelitian zakat 10 kali lipat jumlahnya dari pada pajak. Iya, 10 kali lipat potensi zakat. Besar sekali. Cuma kita tidak mengeloh dengan baik.”*

<sup>65</sup> Idris memandang bahwa pendapatan negara dari pajak tidak memperhatikan rambu-rambu *syariah* sehingga sumber pendapatan negara dari pajak perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan *syariah* tetap diterima sebagai pendapatan negara yang sah. *“Sumber pendapatan itu harus halal, jangan mau haram mau halal sama semua, kalau mau sesuai syariah maka sumber-sumber penghasilan yang haram itu ditinggalkan”*

## 2. Rahmat Abdul Rahman

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana pandangan bapak terhadap pajak? Rahmat Abdul Rahman memberikan jawaban bahwa dalam Islam, berkaitan boleh tidaknya (halal dan haramnya) pajak tidak bisa digeneralisasi secara langsung.<sup>66</sup> Namun pajak sebagai sebuah kewajiban Rahmat Abdul Rahman mengungkapkan

“Bahwa kita ini hanya kena sekali dalam setahun untuk kewajiban harta yaitu zakat. Ketika ada kewajiban lain meskipun negara yang tetapkan itu hukumnya tidak boleh, karena itu dianggap menyamai kewajiban zakat. Mensejajarkan hukum itu dengan kewajiban zakat. Sebagian memang ulama mengecualikan pada saat kondisi negara memang genting, pada saat itu mereka mengatakan darurat. Kalo kita Indonesia ini tidak ada kondisi darurat. Indonesia tidak bisa digeneralisir sebagai keadaan darurat karena kita punya sumber daya alam yang banyak”.

Pandangan Rahmat diatas mengindikasikan bahwa pajak sebagai sebuah kewajiban tidak dapat diterima dalam Islam, hal ini karena kewajiban atas harta tersebut dianggap mensejajarkan dengan kewajiban zakat. Meskipun ada pengecualian dari sebagian ulama tentang bolehnya dipungut dalam kondisi darurat, namun Rahmat tidak setuju jika kondisi tersebut digeneralisasi ke dalam kondisi negeri muslim seperti Indonesia hal ini karena terdapat banyak sumber keuangan lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah seperti kekayaan alam yang melimpah sehingga keuangan negara dapat diisi dari hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut.

---

<sup>66</sup> Rahmat memandang bahwa pajak tidak bisa digeneralisasi secara langsung sebagai sebuah pendapatan yang bertentangan dengan Islam hal ini karena terdapat pajak-pajak yang jenisnya sesuai dengan Islam seperti cukai yang ada sejarahnya sebagai sebuah pendapatan dalam Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun pajak-pajak yang lainnya seperti PPh, PPN, dan PBB tidak terdapat sejarahnya dalam Islam, bahkan pajak-pajak tersebut mengambil porsi zakat yang harus dibayarkan seorang muslim.

Lebih lanjut Rahmat memberikan alasan yang menjadi sebab diutamakannya pajak di negeri muslim

“Negara kan selalu mau praktisnya, pajaki orang saja tidak mau kerja. Artinya sumber pendapatan lain banyakji, banyak. Kalo mereka mau kerja mereka bisa dapat, tapi karena praktis. Pajak praktis mereka tidak perlu kerja, cape-cape semua.”

Pandangan Rahmat diatas mengindikasikan bahwa sebenarnya terdapat banyak sumber keuangan yang dapat diperoleh pemerintah selain dari pajak, seperti pengelolaan kekayaan alam akan tetapi pemerintah tidak melakukan upaya yang lebih (kerja keras) untuk mendapatkan sumber pendapatan tersebut selain dari menarik pajak itu sendiri. Hal ini karena sifat pajak itu praktis sehingga mendorong mereka untuk tidak bekerja keras dalam mengupayakan sumber pendapatan lain.

Kemudian Rahmat menambahkan tentang dalil-dalil tercelanya pajak sebagai alasan menolak pemungutan pajak

“Dalam dalil tersebut *al-muks* memang yang dimaksud adalah pemungut pajak yang lalu, namun sebagian mengatakan ia disetarakan karena yang dimaksud disitu adalah orang yang mendzalimi orang lain dengan kewajiban yang bukan sebenarnya kewajiban. Bukan haknya mereka (negara) mengambil dari kita”.

Pandangan Rahmat tentang tercelanya pajak didasarkan pada dalil pelaku *al-muks* yang diancam oleh Rasulullah dengan azab neraka, hal ini karena para penarik *al-muks* mengambil harta milik orang lain tanpa hak sehingga pungutan demikian dapat disetarakan dengan pajak yang ditarik oleh pemerintah dari masyarakat saat ini tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan yakni negara tidak dalam kondisi darurat.

### 3. Firman Menne

Dalam pandangan Firman Menne

“Pajak itu harus direvitalisasi sebagai sumber pendapatan negara, jika kita melihat sejarah Islam dalam pemerintahannya dimulai dari Rasul, *Khalifaurrasyidin* dan *khalifah-khalifah* setelahnya ternyata pajak itu tidak menjadi sumber pendapatan utama, justru dia menjadi sumber pendapatan alternatif. Misalkan sumber pendapatan-pendapatan negara tidak ada, barulah dihadirkan itu pajak”

Pandangan Firman diatas menggambarkan bahwa pemahaman pajak sebagai sebuah pendapatan negara di negeri muslim perlu diperbaiki, hal ini karena pajak bukanlah sebagai pendapatan utama negara melainkan pajak merupakan pendapatan yang hanya ditarik dalam kondisi khusus. Lebih lanjut Firman mengatakan bahwa

“Sebenarnya banyak potensi-pontensi sumber penerimaan yang bisa kita ambil tanpa menyentuh pajak sehingga pajak perlu dikaji ulang, penerapannya di negeri-negeri muslim khususnya di Indonesia. Karena rupanya sangat tidak potensial kalo pajak sebagai andalan pendapatan negara”

Pandangan Firman diatas mengindikasikan bahwa pajak sebagai sebuah sumber pendapatan merupakan pilihan kebijakan yang tidak tepat di negari muslim hal ini karena terdapat banyak sumber keuangan yang dapat diperoleh tanpa menyentuh pajak yang memberatkan rakyat. Lebih jauh Firman memandang

“Kalau pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, sebenarnya itu memalak rakyat, padahal kekayaan alam kita ini luar biasa”

Sumber keuangan yang dimaksud oleh Firman adalah kekayaan alam yang melimpah di negeri muslim. Kekayaan alam yang melimpah tersebut seharusnya diolah oleh negara untuk mendapatkan sumber pendapatan yang kemudian digunakan untuk penyelenggaraan

negara bukan jatuh pada kebijakan pajak yang sebenarnya sama dengan memalak rakyat.

#### 4. Abu Ihsan al-atsary

“Menganai pajak yang ditarik oleh negara, disana ada bentuk pajak yang boleh negara mengambilnya selain dari zakat. Misalnya pungutan yang diambil oleh negara untuk angkatan bersenjata yang bertugas untuk menjaga negara, nah itu boleh diambil ya. Berdasarkan *murshala mursalah* jika misalnya negara tidak bisa berjalan tanpa itu. Apalagi sekarang ini kita melihat kebutuhan negara itu besar, dan tidak mungkin tertutupi dengan zakat. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu boleh jadi, pungutan yang dilakukan oleh negara itu, sah adanya. Namun tidak semua. Kalo kita melihat realita sekarang ini, negara itu mengambil pajak dari semua perkara. Bahkan kadang-kadang tidak *haq*. Bahkan jelas-jelas itu berasal dari yang haram, misalnya pajak dari pabrik bir, minuman keras, dari tempat-tempat prostitusi ataupun yang lainnya. Dari para pedangan yang membebani mereka, nah ini tentunya bercampur baur di dalamnya antara yang *haq* dan yang batil, diantara yang halal dan haram”.

Pandangan Ihsan diatas tidak memungkiri bahwa dibutuhkan sumber keuangan yang besar untuk kepentingan penyelenggaraan negara muslim modern adapun saat ini pemenuhan kas negara dari sumber pajak tidak bisa digeneralisasi secara umum sebagai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dalam Islam hal ini karena disana bercampur antara pajak yang boleh dipungut dan pajak yang bertentangan dengan syariah untuk dipungut. Pajak yang boleh dipungut menurut Ihsan adalah pajak yang masuk dalam kategori untuk kemaslahatan umum yakni jika memang negara tidak bisa berjalan tanpa harta dari pajak tersebut dalam hal ini masuk dalam kondisi darurat. Adapun pajak yang bertentangan dengan syariah adalah pajak yang dipungut tanpa alasan *syar'i* yakni pajak dipungut bukan dalam kondisi darurat selain itu sumber-sumber pajak yang bertentangan dengan nilai Islam sebagaimana yang banyak terdapat dalam pajak modern. Maka pajak

tersebut ditarik bukan berdasarkan kemaslahatan. Sehingga Ihsan memandang bahwa pemungutan pajak harus dihindari.<sup>67</sup>

##### 5. Alimuddin

Dalam pandangan Alimuddin, konsep kepemilikan dalam Islam sangat jelas. Ada kepemilikan individu ada kepemilikan umum dan negara. Islam menghormati hak kepemilikan sehingga harta milik individu dalam Islam sangat terlindungi. Dengan konsep kepemilikan dalam Islam seseorang bertanggung jawab atas penggunaan hartanya, dengan konsep kepemilikan pula seseorang tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak atau harta milik orang lain.

Sehingga berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara tersebut merupakan sebuah bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atas kepemilikan harta orang lain dalam hal ini pemerintah telah mengambil harta milik individu.

Selain itu, ketidak setujuan Alimuddin atas pemungutan pajak sebagai pendapatan negara karena konsep pajak merupakan konsep pendapatan adopsi sistem kapitalisme. Alimuddin mengungkapkan:

“Kenapa pemerintah memungut pajak, itu karena turunan dari ekonomi yang kita pelajari ekonomi kapitalis” bagaimana itu ekonomi kapitalis!, pemerintah tidak usah berusaha, biarkan kami ini pengusaha bekerja, sebagian dari hasil kami serahkan ke pemerintah berupa pajak, biarlah saya yang membayar, bapak tidak usah berusaha karena kalau bapak berusaha menjadi pemain akan mengganggu kami, jadi kalian (pemerintah) duduk-duduk saja. Nanti saya kasi fee berupa pajak”

---

<sup>67</sup> Ihsan memandang bahwa pungutan pajak yang tidak dapat digeneralisir sebagai sesuatu yang ditarik berdasarkan kemaslahatan bahkan realita saat ini negara mengambil pajak dari semua perkara dan kadang-kadang tidak haq sehingga lebih banyak bermakna sebagai *al-muks* sehingga pemerintah bertindak sebagai *shahibul maks* yakni sebagai orang yang bertindak mengambil harta-harta manusia apa yang tidak secara *syari* untuk dikeluarkan. Jika bentuk pajak demikian maka dalam pandangan Ihsan harus dihindari.

Pandangan Alimuddin diatas menggambarkan bahwa pemungutan pajak di negeri muslim disebabkan karena minimalnya peran negara yang mana hal ini akibat dari adopsi sistem kapitalisme. Paham kapitalisme tersebut berpandangan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam pasar sehingga negara menyerahkan sistem ekonomi kepada mekanisme pasar yang selanjutnya peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam menjadi kecil dan pemenuhan kas negara dicukupkan dari pajak-pajak para pengusaha tanpa pemerintah harus bekerja. Dengan demikian konsep pemungutan pajak ini mengakibatkan ketergantungan pemerintah dalam pemenuhan kas negara pada pajak, selanjutnya ketergantungan tersebut mendorong pemerintah untuk tidak mencari dan berusaha mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari sumber-sumber yang lain seperti pengelolaan atas kekayaan alam yang melimpah.

Selanjutnya berkaitan dengan dampak dari sistem kapitalisme dan bagaimana negara mendapatkan sumber pendapatan dalam pemenuhan kas negara, Alimuddin mengungkapkan

“Apa yang kita lihat dari konsep ini, Begitu perusahaan menguasai suatu lahan maka ia semena-mena menggunakannya dan terkadang tak bisa terkendali. Lalu bagaimana konsep dalam Islam tentang pembangunan ini? Dimana negara mendapatkan uang?, kalo kapitalis tadi mendapatkan dari pajak. Bagaimana Islam mengatur itu? Dalam Islam tidak boleh tidak, pemerintah harus berusaha, harus berusaha. Kemudian dari hasil usahanya pemerintah itulah yang dipakai membangun negaranya.”

Pandangan Alimuddin diatas menggambarkan bahwa dampak paham kapitalisme tersebut menjadikan kekayaan-kekayaan alam milik negara dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga negara tidak



mendapatkan keuntungan yang besar dari kekayaan alam yang melimpah sebaliknya penyerahan pengelolaan kekayaan alam kepada mekanisme pasar mengakibatkan dampak tersendiri terhadap kekayaan alam karena terkadang pengelolaannya tak terkendali. Sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan alam dan malah biaya yang besar dan berkepanjangan harus ditanggung oleh negara akibat kerusakan-kerusakan tersebut. Adapun mengenai pemenuhan kas negara maka Alimuddin memandang bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh tidak, mereka harus bekerja keras mengelolah sendiri kepemilikan negara, dampaknya bukan hanya keuntungan yang besar diperoleh negara dari pengelolaan kekayaan tersebut tetapi pengelolaan kekayaan tersebut dapat diolah secara terkendali dengan mempertimbangkan kemaslahatan

#### 6. Mudzakkir Arif

Dalam wawancara dengan Mudzakkir Arif, Mudzakkir memandang bahwa

“Pajak saat ini dapat dikategorikan sebagai *al-muks* sebagaimana disinggung dalam hadis Rasulullah, oleh karena disana ada kedzoliman, kedzoliman itu adalah diterapkannya pajak untuk semua komoditi, diterapkan pajak untuk semua orang, orang kaya orang miskin, Itu adalah kedzoliman, mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mewajibkan seseorang membayar sesuatu dari hartanya dengan cara yang batil, bukan jual beli, bukan simpan pinjam, bukan pinjaman, bukan utang piutang, bukan bagi hasil, pajak ini akad apa? Ini sama dengan pemalakan, pemaksaan”.

Dalam pandangan Mudzakkir diatas, pajak modern inilah yang masuk dalam kategori tercela yang dijelaskan dalam hadist-hadist Rasulullah Saw, yakni yang mewajibkan pajak kepada orang lain Sehingga

dengan demikian pajak tidak dapat diterima dalam masyarakat muslim.

Pandangan-pandangan intelektual muslim atas pemungutan pajak sebagai pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel di bawah:

Tabel 5.1 Perbedaan Pandangan Intelektual Muslim  
atas Pemungutan Pajak dan Pertimbangannya

Pertimbangan Pendapat yang setuju	Pertimbangan Pendapat yang tidak setuju
- Pajak untuk kemaslahatan kehidupan manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu-satunya kewajiban seorang muslim atas harta yang wajib disetorkan ke pemerintah hanyalah zakat</li> <li>- Konsep terlindunginya harta dalam Islam yang mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi</li> <li>- Pajak yang ditarik dapat dikategorikan sebagai <i>shabul muks</i></li> <li>- Pajak merupakan sumber pendapatan negara adopsi sistem kapitalisme yang tidak dapat mensejahterahkan dunia Islam</li> <li>- Negeri-negeri muslim tidak dalam kondisi darurat</li> </ul>

Seperti yang digambarkan dalam table di atas terdapat dua pandangan tajam atas pajak di negeri-negeri muslim antara pandangan yang setuju dan pandangan yang menolak pajak sebagai pendapatan negara dengan pertimbangan yang mendasari masing-masing pendapat, namun secara umum tidak ada intelektual muslim yang berpendapat bahwa pajak dapat ditarik begitu saja tanpa rambu-rambu syariah yang dapat menjadikan penguasa atau pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam pemungutan pajak. Adapun

landasan intelektual muslim yang setuju dengan adanya pajak dalam penyelenggaraan negara didasarkan pada konsep kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini, yakni ketika kas negara mengalami kekosongan atau kelemahan sementara semua sumber-sumber pendapatan negara telah dimaksimalkan dan negara yang memiliki kewajiban mewujudkan kemaslahatan tidak bisa merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai batu pijakan untuk mewujudkannya. Upaya darurat yang dilakukan oleh penguasa muslim untuk mendapatkan pendapatan dalam mengisi kekurangan kas negara melalui pemungutan pajak dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidakstabilan negara yang berujung pada tidak terlindunginya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Sementara intelektual muslim yang menolak keberadaan pajak sebagai sebuah pendapatan negara di negeri muslim. Didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Kewajiban pajak tidak memiliki dalil syariah secara langsung sementara berkenaan dengan harta, Islam memiliki konsep penghormatan hak kepemilikan individu yang mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi. Dalam hal keuangan negara, pemerintah sebagai pelaksana tidak sepatutnya menarik sumber pendapatan negara dari rakyat kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kewajiban yakni zakat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah seharusnya mencukupkan sumber-sumber pendapatan dari apa yang diarahkan oleh syariah, minimal tidak bertentangan dengan syariah.
2. Adanya dalil yang bisa disetarakan dengan pungutan jahiliyah yang mencela *shabul muks* yaitu pemungut cukai/pajak jalanan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai

pemungut *muks* yakni orang-orang yang mengambil dari harta manusia apa yang tidak secara *syar'i* dikeluarkan.

3. Kondisi di negeri muslim tidak dalam keadaan darurat

Intelektual muslim yang tidak setuju dengan pajak di negeri muslim memandang bahwa jika pun pajak dibolehkan dalam kondisi tertentu dalam hal ini darurat, maka negeri muslim saat ini tidak bisa digeneralisir dalam keadaan demikian, sebab kekayaan alam negeri muslim sangat banyak. Sehingga pajak tidak memiliki alasan untuk dipungut dalam keadaan darurat di negeri muslim.

4. Pajak merupakan sumber pendapatan negara adopsi sistem kapitalisme.

Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep ekonomi kapitalis telah diadopsi ke negeri-negeri muslim sehingga peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam menjadi kecil selanjutnya pemerintahan negeri-negeri muslim memenuhi kas negara dengan pajak adopsi konsep kapitalis. Dampak lain dari minimalnya peran negara dalam konsep kapitalis telah menjadikan negara menyerahkan sistem ekonomi kepada sistem pasar sehingga pengelolaan kekayaan alam diberikan kepada pemodal (pihak kapitalis) yang selanjutnya negara hanya mendapatkan bagian berupa pajak. Menurut sebagian intelektual muslim, jika negeri-negeri muslim menggunakan mekanisme di luar Islam untuk mensejahterahkan rakyat justru dunia Islam tidak mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan dan tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, justru dunia Islam kehilangan metode dalam menyejahterahkan rakyatnya.

Adapun analisa intelektual muslim yang setuju atas pemungutan pajak dalam menanggapi pandangan intelektual muslim yang tidak setuju dengan

pemungutan pajak, seperti yang berkaitan dengan pandangan intelektual muslim yang menolak pajak dengan pertimbangan bahwa kewajiban pajak tidak memiliki dalil syariah secara langsung dan satu-satunya kewajiban atas harta seorang muslim hanyalah zakat. Didin menjadikan surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai dalil untuk menunaikan kewajiban pajak.

*"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, Ibnu sabil (musafir) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdakakan hamba sahaya (budak), mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".*

Ayat ini menurut Didin sebagai alasan mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Ayat tersebut telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan unsur kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (a) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdakakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan lain-lainnya. Point-point dalam bagian (a) di atas, bukan hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya *fardhu*, karena disejajarkan dengan hal-hal yang *fardhu*, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan dengan jalan tersendiri.

Selain itu Didin mengambil tafsir imam al-Qurthubi, ia mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslim walaupun telah

mengeluarkan zakat memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.

Didin menjadikan hadist Rasulullah saw. “*sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat*”. Didin mengatakan bahwa perintah *ulil amri* (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama sebagaimana firman dalam surah an-Nisa 59 tentang ketaatan kepada *ulil amri*, akan tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam membayarnya.

Terkait dengan pandangan penolakan pajak dengan landasan bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta seorang muslim selain zakat, dalam hal ini benar bahwa kewajiban atas harta seseorang yang bersifat rutin, wajib secara terus menerus dan kadarnya ditentukan adalah zakat. Zakat harus tetap dikeluarkan meskipun tidak lagi terdapat orang miskin, yang perlu ditolong atau tidak ada keperluan yang perlu ditanggulangi, sekalipun tidak diurus oleh pemerintah, tetap menjadi sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan untuk mensucikan diri dari harta dan sebagai tanda syukur atas segala nikmat Allah. Adapun kewajiban (selain zakat) mengenai keberadaannya datang sewaktu-waktu dan kadarnya tidak tetap seperti pajak, ia menyesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan. Jadi kewajiban pajak muncul bukan karena adanya harta sebagaimana zakat, namun karena kewajiban untuk membantu orang lain dan mencukupi kebutuhan negara dimana sifatnya tidak seperti zakat yang terus menerus melainkan dapat dihapuskan ketika keadaan keuangan sudah membaik.

Adapun pertimbangan intelektual muslim mengenai terlindunginya harta seseorang dalam Islam yang menjadi pertimbangan penolakan terhadap pajak merupakan sebuah konsep kepemilikan harta dalam Islam, namun berdasarkan kaidah fiqih bila dalam kondisi darurat penguasa boleh saja membebaskan dengan besaran tertentu dari kalangan kaya untuk mengisi kekosongan kas yang terjadi dalam negara. Dengan demikian jika seseorang telah membayar zakat, maka ia tidak lagi mempunyai kewajiban finansial kepada negara, dan negara tidak mempunyai hak untuk menarik pungutan lagi kecuali dalam kasus tertentu (*daruri*), di mana negara tak memiliki dana lagi dan terdapat kebutuhan kas untuk pemenuhan kemaslahatan.

Adapun terkait adanya dalil-dalil tentang tercelanya pajak. Namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dalam dalil tersebut adalah pungutan jahiliyah yang disamakan dengan pajak. Dimana pungutan ini diambil dengan jalan kekerasan, dan menghalang-halangi orang diwilayah perbatasan jika tidak menyetorkan sebagian dari barang bawaan para pedagang yang melintas. Selain itu makna *al-Maks* dalam lafaz hadist yang diterjemahkan sebagai pemungut pajak dalam bahasa Indonesia juga bisa digunakan untuk orang-orang yang mengambil zakat secara tidak adil. Sehingga *al-maks* dalam pemaknaanya mengandung banyak arti dengan demikian tidak khusus untuk penarik pajak.<sup>68</sup> Dan para ulama memandang bahwa derivasi suatu hukum

---

<sup>68</sup> Aris Munandar mengatakan bahwa para ulama menyebutkan bahwa *maks* itu memiliki beberapa bentuk. (1) *Muks* yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah yaitu uang pajak yang diambil dari para penjual di pasar (2) Uang yang diambil oleh amil zakat dari *muzakki* untuk kepentingan pribadinya setelah dia mengambil zakat. (3) Uang yang diambil dari para pedagang yang melewati suatu tempat tertentu. Uang yang diambil tersebut dibebankan kepada barang dagangan yang dibawa, perkepala orang yang lewat atau semisalnya. Ketiga bentuk *maks* ini disebutkan oleh penulis kitab *Aunul Ma'bud* (Syarh Sunan Abu Daud). Penulis Aunul Ma'bud mengatakan, "Dalam *al Qamus al Muhith* disebutkan bahwa makna asal dari *muks* adalah mengurangi atau menzalimi. *Muks* adalah uang yang diambil dari para pedagang di pasar pada masa

berdasarkan *maslahah mursalah* merupakan metode yang sangat penting bagi persoalan-persoalan yang tidak ada petunjuk *nassnya* secara jelas.<sup>69</sup>

Sehingga mengenai pandangan intelektual muslim yang setuju dengan pajak dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima dalam Islam sesuai dengan misi *rahmatan lil alamin* yang dibawah. Dimana seorang penguasa memiliki hak untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan kemaslahatan sehingga jika datang kondisi yang mengharuskan adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*). Pajak yang diwajibkan oleh penguasa karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa sementara perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian penetapan pajak atas orang-orang kaya dapat diterima dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar). Namun kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam legalitas pajak modern

---

jahiliyyah atau uang yang diambil oleh amil zakat (untuk dirinya) setelah dia selesai mengambil zakat. Penulis kitab *an Nihayah* mengatakan bahwa *muks* adalah pajak yang diambil oleh *maakis* atau pemungut *maks*. Sedangkan penulis kitab *Syarh as Sunah* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemungut *muks* adalah orang yang meminta uang dari para pedagang jika mereka lewat di suatu tempat dengan kedok ‘*ushr* (yaitu zakat)’. Dalam Nailul Author, Asy Syaukani mengatakan, “Pemungut *muks* adalah orang yang mengambil pajak dari masyarakat tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan”. Memungut *muks* adalah haram dengan sepakat ulama. Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa perbuatan memungut *muks* adalah dosa besar.

<sup>69</sup>Menurut Nafis Irkhami syari’at Islam hanya memberikan kepada pengikutnya prinsip-prinsip dasar dalam menuntun perilaku ekonomi individu yang mengarah pada tujuan-tujuan umum (*maqashid al-syari’ah*), yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian studi tentang ekonomi Islam memberi kelonggaran dalam batas-batas tertentu, untuk memilih strategi yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan ekonomi dan sosial. Untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang belum diatur secara rinci tersebut, maka diperlukan pemikiran yang mendalam dan sungguh-sungguh (*ijtihad*).



ditentang oleh sebagian intelektual muslim yang lain, hal ini karena kekosongan kas atau kelemahan keuangan negara yang terjadi disebabkan minimalnya peran pemerintah dalam mengusahakan atau bekerja mendapatkan sumber kekayaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di negeri muslim. Dengan demikian keadaan tersebut tidak dapat dikatakan darurat sehingga jika pajak dibebankan dalam kondisi demikian maka pungutan tersebut telah diambil secara tidak wajar dan dzalim, yang tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta dari seorang muslim. Hal ini menyelisihi prinsip umum *syari'at* Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu berdasarkan beberapa dalil dalam Islam. Dosa ini termasuk dalam firman Allah yang artinya, "*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih*" (QS asy Syura:42).

Ditambah dengan berbagai jenis pajak dan konsep negara yang tidak dapat memastikan penggunaan uang pajak, menjadi penguat bagi sebagian intelektual muslim untuk menolak pajak sebagai pendapatan negara hal ini pulalah yang menjadi alasan seorang cendekiawan asal Pakistan yang menolak keberadaan pajak dengan argumen bahwa pemerintah yang ada di dunia Islam dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya 'tidak sah'. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalah gunakan dan menjadi suatu alat penindas". Pandangan Hasan Turobi bukan menolak pajak, namun menolak sistem pemerintahan Islam, dalam hal ini sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariah seperti menggunakan uang pajak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam.

Sebagai kesimpulan bahwa pandangan intelektual muslim yang setuju dengan pajak hanya pada pajak yang betul-betul sesuai dan sejalan dengan

syariat Islam sementara pandangan intelektual muslim yang tidak setuju dengan pajak hanya pada konsep pajak modern yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Meskipun sebagian intelektual muslim tidak memberikan justifikasi terhadap legalitas pajak karena menganggap konsep pendapatan negara dalam Islam jika dimaksimalkan tidak akan sampai pada kondisi darurat yang dalam hal ini sebagian intelektual muslim membolehkan pajak. Akan tetapi konsep yang terakhir ini mengharuskan kondisi sosial (keimanan) sebagaimana pada masa kenabian sehingga sebagian intelektual lain memandangnya sulit untuk diterapkan dalam keuangan negara modern sementara kas negara menuntut untuk diisi segera dalam menjaga kemaslahatan.

### **5.3 Penerapan Pajak (*Dharibah*) dalam Masyarakat Muslim: Refleksi Intelektual Muslim Atas Adanya Pajak Baru**

#### **5.3.1 Adaptasi Terhadap Perubahan Situasi dan Kondisi**

Para intelektual muslim mengakui bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, sistem perekonomian sangatlah sederhana. Sumber-sumber pendapatan masih terbatas pada konsep sedekah dan harta penaklukan Islam, kas negara dapat terpenuhi dari seperlimah *ghanimah* (rampasan perang), *kharaj* dan lain-lain. Pada zaman nabi negara tidak membutuhkan dana yang besar untuk mengurus ummat dan tolong menolong masih sangat mudah dilakukan dalam pemenuhan kas negara. Konsep pendapatan negara demikian dipertahankan oleh para khalifah-khalifahannya sehingga kas pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi ketika ekonomi mengalami perkembangan secara kompleks, situasi telah berubah sejumlah pertanyaan yang tidak diketahui sebelumnya (mengenai administrasi sebuah pemerintahan, regulasi perdagangan, perpajakan, dan lain sebagainya) harus dibicarakan.

Menurut Nafis Irkhani dalam bukunya *Keuangan Publik Islam* mengenai isu-isu teoritis yang membahas permasalahan ekonomi telah dibahas oleh sebagian fuqaha seperti Abu Yusuf (113-182H/731-798M), Abu Ubaid (150-224H), Al-Mawardi (364-450H/974-1058M), Ibnu Khaldun (732-808H/1332-1406M), Al-Ghazali (450-505H/1058-1111M), dan Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1326M). Ulama-ulama klasik tersebut telah mengemukakan gagasan-gagasan (konsep) tentang institusi pemerintah dan alat-alat kebijakan-kebijakannya di bidang ekonomi. Akan tetapi menurut Ibrahim Warde, walaupun para ulama tersebut dikenal sebagai ahli ekonomi dalam Islam, tetap saja ia menulis pada priode tepat sebelum transformasi besar dunia ekonomi (di era penemuan-penemuan besar yang diikuti oleh bersinarnya kapitalisme dan revolusi industri).

Tatkala Barat memasuki fase *renaissance* (pencerahan)<sup>70</sup> dan para modernis berhasil memperluas pengaruhnya dengan tingkat kesuksesan yang bervariasi di seluruh dunia Islam, dalam bidang keuangan ditandai dengan berbagai institusi keuangan yang muncul,<sup>71</sup> termasuk transformasi konsep pajak Barat ke dalam suasana kehidupan ekonomi dunia Timur (dalam hal ini dunia Islam/negeri-negeri muslim). Seiring dengan kemerdekaan yang telah diraih negeri-negeri muslim dari dominasi politik Barat membangkitkan kembali

---

<sup>70</sup> Hasan Ali menjelaskan bahwa fase *renaissance* dunia Barat ditandai dengan semangat revolusi industry setelah ditemukan pertama kali mesin uap oleh James Watt dalam membantu perkembangan industry-industri di negara Barat. Tatkala memasuki fase ini, tulang punggung penggerak aspek ekonomi terdapat pada bidang keuangan yang berbasis pada dunia perbankan yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Setelah keadaan pada masa itu mapan di dunia barat, terjadilah transformasi teknologi ke dunia Timur dengan membawa konsep Barat tersebut dalam suasana kehidupan ekonomi masyarakat muslim. Lihat Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004. Hal 56.

<sup>71</sup> Pengaruh modernis di dunia Islam juga diperkuat oleh adanya muslim yang belajar ekonomi gaya barat dan mentransfer ilmu pengetahuan tersebut pada dunia Islam. Ibrahim Warde mengakui bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi sangat tersekulerisasi dalam bidang keuangan negara.

semangat Islam di negeri-negeri muslim<sup>72</sup>. Akan tetapi dengan kondisi zaman yang telah berubah, zaman yang semakin jauh dari masa kenabian, bukan saja keimanan orang-orang yang datang belakangan tak sekuat dengan keimanan pada zaman agama disempurnakan, tapi dominasi asing telah menjadikan negeri-negeri muslim berkiblat ke Barat. Dengan menggunakan konsep negara bangsa sebagai imbas dari modernisasi, sarjana-sarjana muslim tetap berjuang untuk merekonsiliasikan tradisi hukum dan keilmuan yang berakar pada zaman pertengahan dengan urgensi dunia modern tanpa berseberangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>73</sup> Para ulama dan intelektual berusaha melakukan pemikiran ulang mengenai ilmu-ilmu sosial dan ekonomi untuk menciptakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang 'otentik' atau sekurang-kurangnya *indigenous*. Rekonstruksi terhadap berbagai bentuk keuangan yang tidak *syar'i* dilakukan untuk menjawab perkembangan zaman agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### 5.3.2 Dekonstruksi Pajak: Sebuah Gelombang Kesadaran Ekonomi Islam

Ketika kaum muslimin mengalami kemerosotan yang dibarengi dengan pendudukan asing mengakibatkan perubahan pada sistem pemerintahan masyarakat muslim yang berkiblat ke Barat. Semangat modernnya mampu mengubah bentuk pemerintahan, sistem ekonomi, institusional, humanistik, sosial, dan kesejahteraan, yang mana semua berkembang di Barat pada masa periode kemerosotan kaum muslimin. Namun ketika semangat Islam kembali bangkit ke permukaan menyusul kemerdekaan yang dicapai oleh negara-negara

---

<sup>72</sup> Kemerdekaan dari dominasi politik Barat yang diraih oleh negara-negara muslim setelah Perang Dunia II telah menimbulkan kebangkitan Islam. Seiring berakhirnya era Kolonial dan lahirnya tren yang mengarah kembali kepada Islam,

<sup>73</sup> Bukan karena Islam sebagai agama tidak bisa mengatur seluruh kehidupan akan tetapi orang-orang yang tak menjalankan Islam sebagaimana Islam yang disyariatkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. sementara dulu zaman nabi negara tidak membutuhkan terlalu besar dana untuk mengurus ummat,

muslim.<sup>74</sup> Perubahan yang telah terjadi dalam sosial ekonomi masyarakat muslim mengharuskan Islam pada posisi menanggapi atau memberi jawaban atas peristiwa sosioekonomi (keuangan) yang dialami oleh masyarakat muslim modern. Untuk menjamin bahwa institusi-institusi tersebut tidak bertentangan dengan keimanan dan nilai-nilai Islam serta tetap mempertimbangkan realitas-realitas modern untuk membantu mewujudkan bukan saja pembangunan ekonomi yang dipercepat, tetapi juga kesejahteraan yang hakiki.

Dalam bidang keuangan negara, reformasi pun harus dilakukan dalam hal ini sistem perpajakan,<sup>75</sup> pertimbangan realitas zaman yang telah berubah dimana menurut sebagian intelektual muslim bahwa zaman sekarang sebagian sumber pendapatan negara pada awal Islam telah tiada, maka untuk dapat membiayai keperluan umum setelah semua sumber pendapatan telah dimaksimalkan, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan pajak. Negeri-negeri muslim membutuhkan banyak sumber pendapatan (untuk mengisi kemerdekaan)

---

<sup>74</sup> Munculnya kembali keinginan masyarakat untuk menerapkan Islam di segala sendi kehidupan mulai terjadi dalam sistem modern. sehingga masyarakat diberi pilihan atas aktivitas ekonominya (seperti pilihan untuk menabung di bank syariah atau konvensional.) sehingga adanya kemungkinan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan negara

<sup>75</sup> Dalam sejarah Islam, sebagaimana dicontohkan Nabi sendiri, sesungguhnya mengadopsi tradisi dan praktik pra-Islam atau yang telah ada tidak menjadi persoalan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dasar Islam. Praktik yang ada bisa diadopsi dengan modifikasi tertentu agar sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Berdasarkan pertimbangan itu, bisa dipahami bila Khalifah Umar menerima sistem perpajakan tanah masa Sasaniyah setelah merevisi ketentuan tingkat pajak, pengumpulan dan administrasinya. Karena itu, Umar menyerahkan tanah kepada para penyewa dan menjadikannya sebagai pemilikan umum umat Islam dan menetapkan pajak, yang kemudian disebut *kharaj*,<sup>265</sup> atas tanah tersebut. Lebih jauh, tidak hanya mengadopsi dan mengadaptasi sistem pajak peradaban lain, Khalifah Umar bahkan juga merasa perlu merekontekstualisasikan beberapa kebijakan publik yang telah diberlakukan masa Nabi Muhammad SAW. Contoh jelas dari upaya ijtihad tersebut adalah kebijakan pembagian tanah *ghanimah*. Pada masa Rasul tanah yang diperoleh dari penaklukan dengan perang akan dibagikan seperlima kepada negara dan kebutuhan sosial (bagian ini dikenal dengan sebutan *khums*), serta sisanya dibagikan untuk mereka yang ikut berperang.<sup>266</sup> Ketika banyak daerah yang ditaklukkan, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagi-bagikan tanah tersebut sebagaimana ditentukan dalam Q.S Al-Anfal (8): 41. Tanah-tanah tersebut dibiarkan tetap dimiliki oleh para pemilik semula dengan kompensasi membayar *kharaj* dan *jizyah*. Dengan demikian, tanah-tanah tersebut diperlakukan sebagaimana tanah *fay'*. Lihat Nafis Ikrima keuangan *public* hal 100

pembangunan ekonomi yang mana harus dipercepat agar keseimbangan dalam kehidupan dapat tetap terjaga dalam kondisi dimana masyarakat Islam mengalami kemunduran, kewajiban pajak sebagai alternatif untuk kekosongan kas yang terjadi di dunia muslim menjadi salah satu perwujudan dari pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah di bumi.

Secara teoritis semangat yang terkandung dalam legalitas pajak sebagai sebuah pendapatan pemerintah dalam kondisi khusus tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling bekerja sama serta tolong menolong antara sesama manusia. Mengenai kerja sama, Hasan Ali mengatakan bahwa prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam, manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam memiliki konsep kepemimpinan, dimana pemimpin mendapat amanah dalam mewujudkan kemaslahatan sosial. Sebagai individu bentuk apresiasi dari posisi dirinya yang juga sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah satu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kemaslahatan manusia dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Pajak merupakan sebuah bentuk muamalah yang lebih dekat dengan tolong menolong dan kerjasama. Tolong menolong dalam hal ini adalah rakyat sebagai pihak yang menolong/memberikan sebagian harta yang mereka miliki kepada pemerintah sebagai bentuk sedekah untuk menolong keuangan pemerintah yang sedang melemah atau membutuhkan dana yang besar untuk penyelenggaraan pemerintahan, sementara kerjasama dalam hal ini adalah pemerintah yang bertindak memberikan pelayanan kepada rakyat yang

selanjutnya rakyat mendapatkan keamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

Adapun secara historis fenomena *dharibah* sebagai sebuah pendapatan insedentil sudah ada pada masa khalifah-khalifah dalam sejarah Islam.<sup>76</sup> Dalam pandangan Firman Menne mengenai pungutan tersebut, bahwa dalam sejarah Islam pungutan tersebut bersifat sementara hanya diambil dalam kondisi dimana kas negara mengalami kekosongan. Dalam kondisi demikian tanggung jawab negara untuk pemenuhan kas negara juga jatuh di pundak kaum muslim, yakni kaum muslim yang kaya memiliki kewajiban untuk menolong negara. Sehingga pajak dapat disimpulkan sebagai sebuah tanggung jawab/kewajiban yang jatuh ke pihak rakyat ketika kas negara mengalami kekosongan.

Intelektual muslim memandang bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi kaum miskin dan lemah dalam masyarakat. Jika dana bendahara negara tidak cukup, negara dapat membebankan pajak pada orang-orang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, sebab jika ada seorang yang hidup dalam kelaparan atau tidak mempunyai pakaian atau tidak mempunyai tempat tinggal pada suatu hari, maka seluruh masyarakat dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah pada hari perhitungan.

Tugas utama negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk itu negara harus memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Pemikiran ini didasarkan

---

<sup>76</sup> Ahmad Zain An Najah menjelaskan bahwa pada zaman Imam Nawawi. Pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tartar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukan oleh pasukan Tatar. Yang berkuasa di Syam waktu itu adalah Sultan Zhahir Baibas. Beliau mengajak para ulama untuk bermusyawarah dalam menghadapi pasukan Tatar, sedang kas yang ada di Baitul Maal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa Negara akan memungut pajak kepada rakyat, terutama yang kaya untuk membantu biaya perang.

pada perkataan Umar bin Khattab “sebaik-baiknya penguasa adalah yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruknya penguasa adalah yang memerintah rakyatnya malah menemui kesulitan”. Negara harus bertanggungjawab untuk meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Pemeliharaan atas kepentingan mereka (rakyat) merupakan kewajiban penguasan karena masalah-masalah tersebut terkait dengan Muslim secara keseluruhan. Lebih dari itu, Abu Yusuf menegaskan bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan kesejahteraan publik (seperti pembangunan tembok dan bendungan) harus ditanggung oleh negara.

Maka pada era sekarang diperlukan sebuah konstruksi bangunan baru untuk mengisi kelemahan keuangan negara. Dekonstruksi pajak sebagai upaya rekayasa hukum dalam wujud kontekstualisasi, jalan ini sebagai alternatif menjaga keutuhan negara (pemerintahan) menuju sebuah pemerintahan yang lebih Islami ke depannya. Langkah ini dikenal dengan istilah Islamisasi, mentransformasikan sistem keuangan ke dalam sebuah sistem Islam. kondisi sosioekonomi yang berubah mengharuskan adanya proses (dekonstruksi) pajak (*tax*) dari pajak dengan pemahaman barat ke pajak (*dharibah*) dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di dunia Islam. Hal ini menjadi gelombang kesadaran Islam pada masyarakat modern untuk berekonomi sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai Islam.

### **5.3.3 Jalan Terakhir dalam Pemenuhan Kas Negara: Melalui *Dharibah***

Menguatnya paham negara bangsa, seolah kaum muslim tidak lagi dipersatukan dengan kekuatan agama. Inilah imbas paham modern yang harus ditanggung negeri-negeri muslim.<sup>77</sup> Konsep persaudaraan muslim layaknya satu

---

<sup>77</sup> Paham modern menurut Jacques Rousseau (1712-1778) yaitu dunia yang bersendikan atas; (a) negara-negara bangsa dalam sistem politik, (b) teknologi yang berdasarkan ilmu



tubuh dalam Islam terpisahkan dengan konsep negara bangsa. Akan tetapi sekalipun menguatnya paham negara bangsa tetap tidak bisa meniadakan nilai-nilai universalitas Islam sebagai sebuah sistem ideologi yang melekat kuat dalam *worldview* masyarakat muslim. Kemerdekaan yang dicapai negeri-negeri muslim setelah beberapa abad dalam dominasi Barat dan usaha untuk menghapuskan Islam ternyata tidak mampu membunuh semangat kaum muslim untuk tetap bersama Islam, disamping kemerdekaan yang dicapai harus dipertahankan dan mengharuskan tetap berjalannya sistem pemerintahan untuk menjaga stabilitas negara dari serangan penjajah.

Dalam Islam terdapat banyak sumber-sumber pendapatan, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, pendapatan-pendapatan dari kekayaan alam dan lainnya. Dalam kontes negeri muslim modern diantara pendapatn-pendapatan tersebut diakui oleh intelektual muslim bahwa terdapat pendapatan negara yang sulit diterapkan untuk saat ini seperti *ghanimah*.<sup>78</sup> Namun diantara sumber-sumber pendapatan yang ada, dalam pandangan intelektual muslim terdapat sumber pendapatan yang sangat potensial dalam kontes modern dan sesuai dengan syariat Islam yakni pengelolaan terhadap kekayaan alam, yang mana dalam konsep Islam hak kepemilikannya ada pada pemerintah atau penguasa. Dengan memaksimalkan semua sumber pendapatan tersebut maka negeri-negeri muslim akan menjadi negeri yang makmur dan

---

pengetahuan, (c) *rasionalisme*, (d) penggandaan keuntungan, dan (e) *sekulerisasi* dan pelemahan peran agama. Perkembangan Islam di era modern diawali melalui persentuhan budaya Barat yang masuk ke dunia Islam. Sehingga hukum Islam sudah tidak lagi sebagai 'pemain tunggal', tetapi telah mempunyai teman main dalam fream hukum yang dilahirkan oleh Barat. Adanya dualism Hukum adalah bagian dari suasana masyarakat Islam. lihat Hasan Ali hal 42-43

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi bahkan memandang diantara pendapatan-pendapatan negara yang ada di priode Islam awal tidak lagi dapat diterapkan dalam negeri muslim konteks modern. Seperti *jizyah* dan *kharaj*.

sejahtera meskipun sumber-sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama dalam masa perkembangan Islam tidak ada.

Dalam proses perjalanan pemerintahan, meskipun semua sumber pendapatan negara telah dimaksimalkan, kekosongan kas dalam negara adalah suatu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Upaya perlindungan negara terhadap kemungkinan ini menurut sebagian intelektual menggunakan dua jalan, pertama adalah pinjaman dan kedua adalah pajak (beban ditetapkan kepada orang tertentu). Jalan pertama berupa pinjaman, jalan ini dalam konsep Islam merupakan jalan yang dibenarkan, karena pinjam meminjam adalah sesuatu yang boleh dalam konteks syariah. Pemerintah boleh saja meminjam dana untuk mengisi kekosongan kas dari berbagai pihak, seperti pihak swasta yang memiliki modal besar atau dari sistem perbankan dari dalam negeri atau dari luar negeri. Ketika keuangan negara telah berjalan normal maka negara bisa menganggarkan untuk membayar utang tersebut, akan tetapi dalam konteks modern, sebagian intelektual memandang bahwa pinjaman sebagai jalan yang tidak sehat. Jalan ini menjadi lebih sulit dan memiliki banyak kelemahan dan dapat melemahkan kekuatan negara muslim dalam skala dunia. Sebab dalam konteks modern pinjaman disertai dengan bunga, selain itu pihak pemberi pinjaman merasa bisa ikut mempengaruhi kebijakan negara sehingga kekuatan negara menjadi lemah di mata dunia. Jalan kedua berupa penetapan beban khusus kepada orang-orang tertentu sekedar untuk mengisi kekurangan kas negara untuk sementara waktu, akan tetapi jalan ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian agar jalan ini berada di atas koridor keadilan.

Capra sangat setuju dengan hal ini dalam menutup pembelanjaan yang defisit melalui pajak, ia memandang bahwa pinjaman akan membawa kepada riba dan pinjaman juga meniadakan keharusan berkorban bagi kalangan tertentu,

selain itu pinjaman juga hanya menanggukkan beban sementara, yang membebani generasi akan datang dengan beban berat yang tidak semestinya ia pikul.<sup>79</sup> Sehingga Capra melihat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan pinjaman.

Keputusan pengisian kas negara dengan jalan pajak menjadi sebuah keputusan terakhir setelah semua sumber-sumber pendapatan negara dimaksimalkan, sebagian intelektual muslim memandangnya sebagai sumber pendapatan darurat. Hal ini disebabkan karena pendapatan dari pajak hanya untuk mengisi kekosongan atau kelemahan keuangan negara, dimana jika tidak adanya kas tersebut akan mengancam stabilitas negara. Ketika kas sudah terisi kembali dan dipandang bahwa negara sudah mampu menjalankan fungsi negara tanpa pajak, maka pajak yang dibebankan ke rakyat dihentikan.

Intelektual muslim yang memberikan justifikasi atas adanya pungutan baru di luar kewajiban yang ditetapkan oleh syariat atas harta, tidak memberikan legislasi tanpa syarat yang dapat menjadikan penguasa (negara) menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya sehingga pemerintah bisa bersikap sewenang-wenang kepada rakyat atas nama kepentingan umum. Dalam konsep *dharibah* yang diinginkan oleh para intelektual muslim dilakukan dengan landasan keadilan dan kemurahan, serta tidak memberatkan bagi rakyat yang akan mempengaruhi produktivitas ekonomi.

---

<sup>79</sup> Berkenaan dengan pinjaman sebagai jalan dalam pemenuhan kas negara, Capra melihat bahwa pinjaman dapat diterima jika digunakan untuk membiayai pengeluaran modal akan tetapi jika pinjaman dilakukan untuk membiayai pengeluaran berjalan maka ini menjadi pinjaman yang tidak sehat bahkan tidak dapat dibenarkan secara moral dan prinsip keadilan, hal ini karena penanggungan beban cicilan akibat pengeluaran yang tidak produktif oleh angkatan sekarang beralih kepada generasi mendatang. Lihat Umar Chapra hal 299 lihat juga Gusfahmi hal 163-164

Syarat yang diinginkan oleh intelektual muslim diantaranya, pertama bahwa semua potensi sumber keuangan negara telah digali dengan maksimal. Dalam syarat ini mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras atas semua pendapatan-pendapatan yang dapat digunakan oleh negara sebelum menjatuhkan pilihan kepada rakyat dengan pajak. Dalam Islam terdapat banyak sumber-sumber pendapatan, seperti *ghanimah*, *fai*, *kharaj*, *ushr*, *jizyah*, dan *shadaqah*. Dalam kontes negeri muslim modern diantara pendapatan-pendapatan tersebut diakui oleh intelektual muslim bahwa ada yang sulit diterapkan untuk saat ini.<sup>80</sup> Namun diantara sumber-sumber pendapatan yang diinginkan oleh intelektual muslim yang sangat potensial dalam kontes modern dan sesuai dengan syariat Islam adalah pengelolaan penuh terhadap kekayaan alam, yang hak kepemilikannya ada pada pemerintah. Dengan penguasaan oleh negara atas harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang tambang yang banyak terdapat di negeri muslim akan menjadikan negeri muslim sebagai negeri yang memiliki kekuatan ekonomi sehingga negara tidak mengalami kondisi keuangan yang lemah.

Syarat yang selanjutnya, ditarik dengan cara yang adil berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan kebutuhan negara. Untuk melihat sisi keadilan tersebut maka intelektual muslim menginginkan adanya musyawarah dengan seluruh komponen yang terkait sebelum memungut pajak, baik dari kalangan ulama, intelektual dan cendikia maupun dari kalangan professional yang mempunyai kapabilitas dibidangnya. Rasa keadilan yang ditekankan oleh intelektual muslim adalah keadilan bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh seseorang dianggap sebagai beban yang sepantasnya dan bisa dipikul oleh

---

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi bahkan memandang diantara pendapatan-pendapatan negara yang ada di priode Islam awal tidak lagi dapat diterapkan dalam negeri muslim konteks modern. Seperti *jizyah* dan *kharaj*.

orang tersebut (wajib pajak). Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Kemudian sistem ketetapan perpajakan harus dibuat tidak hanya berdasarkan kepentingan ekonomi tapi juga harus dibicarakan dalam aspek positif dan normatif. Dalam hal ini legalitas terhadap alasan keberadaan pajak menjadi jelas jika ada *ijithad* kolektif dari para ulama di negerinya. Sehingga pajak bukan hanya pungutan untuk kepentingan memenuhi kas negara yang lepas dari nilai ibadah.<sup>81</sup> Tapi muamalah yang juga sarat dengan nilai ibadah (jihad harta) dengan nilai tolong menolong dalam pajak yang sangat selaras dengan semangat Islam. Selain itu pajak juga harus dibicarakan terkait etika, terutama untuk mencegah para pemimpin yang menggunakan otoritas kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi (kepentingan kelompok dan partai). Begitupun keadilan dalam pendistribusian yang secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan<sup>82</sup>. Karena itu, sangat perlu mendesain sistem

---

<sup>81</sup> Dilema panjang di negeri muslim atas pungutan pajak oleh pihak pemerintah yang dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan tanpa nilai spiritual di dalamnya dan tidak jelasnya legalitas pajak dalam masyarakat muslim terkadang menjadi sesuatu yang harus dihindari bagi sebagian orang. Dengan adanya *ijithad* kolektif antara ulama di setiap negeri diharapkan pajak sesuai dengan semangat Islam. baik dari alasan pemungutan, tata cara perpajakan, distribusi atau pemanfaatan pajak. sehingga pajak menjadi lebih jelas dan semangat membayar pajak juga terkandung nilai ibadah. Ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah sistem akan melahirkan pihak yang menjadi korban kezoliman, sehingga selama ini pajak terkesan sebagai bentuk kezoliman pemerintah terhadap rakyat.

<sup>82</sup> Chapra memandang bahwa keadilan pendistribusian dalam Islam berbeda dengan kepedulian kapitalisme kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, yang tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan, ia lebih disebabkan karena kepentingan dan tekanan kelompok. Sistem distribusi kekayaan berjalan tidak adil dan tetap berlanjut. Usaha-usaha lewat pemanfaatan uang pajak yang mementingkan daerah-daerah tertentu dibawa tekanan partai yang kuat. Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi dan kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Afzalurrahman melihat bahwa Distribusi harta kekayaan haruslah merata di antara manusia, dalam arti tidak ada pihak yang berlebihan dan tidak ada pihak yang kekurangan. Keadilan yang dimaksud bukan berarti seperti sistem ekonomi Sosialis yang menyamaratakan seluruh manusia, akan tetapi sistem

perpajakan yang terjalin rapi ke dalam jaringan nilai-nilai Islam dan membantu mengurangi ketidakadilan<sup>83</sup>. Hal ini bisa di dukung dengan adanya musyawarah dari semua komponen menuju sebuah *ijtihad* kolektif.

Syarat yang selanjutnya ketika pajak ditetapkan sebagai pengisi kekosongan kas adalah hanya dipungut dari golongan kaya, sistem pajak harus menjamin bahwa hanya ditarik dari kalangan orang mampu dan makmur. Menurut Gusfahmi, orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan bukan melebihi keinginannya apalagi melebihi syahwatnya

Syarat yang lain yang diinginkan oleh intelektual muslim bahwa pemerintah harus menjamin bahwa sumber pajak dari sesuatu yang baik dan penggunaan uang pajak kepada sesuatu yang baik pula atau mengandung maslahat tanpa menabrak nilai-nilai syariah. Dalam hal ini Faturrahman Djalil memperjelas bahwa sesungguhnya pajak diperbolehkan oleh ulama dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syariah. Jika tidak sesuai dengan rambu-rambu syariah pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.

Terkait dengan pajak yang harus ditarik dari sumber yang baik, Wibowo memberikan alasan bahwa harta yang tidak halal akan menghilangkan berkah dan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah. Lebih lanjut Wibowo setuju harus ada pemisahan alur pemanfaatan dana dari sumber yang halal dan tidak

---

ekonomi Islam mentolerir adanya perbedaan yang wajar antara si kaya dan si miskin. Lihat; Umar chapra sistem moneter Islam, Jakarta: gema insani, 2000 hal 4 dan Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam I, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 60

<sup>83</sup> Salah satu karakter yang paling menonjol dari sebuah sistem ekonomi dari masyarakat muslim ideal adalah keadilan. Sebuah cara hidup yang dituntut menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan. Ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah sistem akan melahirkan pihak yang menjadi korban kezoliman.

halal. Sumber pajak yang tidak halal diwadahi secara khusus, dan dialokasi hanya untuk proyek-proyek kepentingan atau fasilitas umum. Sedangkan gaji pegawai, wajib dialokasikan hanya dari sumber halal. Bila tidak, maka negara ini dapat dianggap secara sengaja meracuni rakyatnya dengan dana haram.<sup>84</sup>

Syarat yang terakhir adalah menghentikan pemungutan pajak jika kebutuhan negara telah terpenuhi. Syarat ini menjadi salah satu syarat penting atas adanya legalitas ulama terhadap pajak baru. Jika kas negara telah membaik maka kewajiban negara yang sebelumnya beralih dipundak rakyat karena kondisi tertentu, kembali ke tangan pemerintah dalam pemenuhan kas selanjutnya, dengan kata lain pajak dihapuskan atau tarif pajak nol persen. Hal ini karena keberadaan pajak bersifat sementara bukan menjadi pemasukan tetap bagi sebuah negara.

Selain itu terdapat syarat-syarat yang secara umum bahwa pajak sebagai pendapatan negara yang dipungut dari masyarakatnya dalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu perekonomian, seperti menghambat lacarnya produksi, distribusi dan perdagangan serta tak pernah menghalangi rakyat dari usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan kesejahteraan, dan tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.<sup>85</sup>

#### **5.3.4 Prioritas Penggunaan Uang Pajak Darurat (*dharibah*)**

Kebutuhan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan rumah tangga keluarga dan kebutuhan dalam rumah tangga negara (rakyat kolektif). Kebutuhan rumah tangga keluarga dalam pengadaanya difardukan kepada kaum

---

<sup>84</sup> Bercampurnya harta halal dan haram dalam sumber keuangan negara dari pajak, Wibowo menginginkan adanya pemisahan pencatatan dan pengalokasian.

<sup>85</sup> Qardhawi menanggapi tentang pemungutan pajak jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawi h. 1081-1082).

muslimin sendiri (kepala keluarga) seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kebutuhan negara adalah kebutuhan yang difardukan kepada negara, dimana pemerintah wajib mengadakannya melalui sumber-sumber pendapatan yang ada (legal) untuk kepentingan negara dalam hal-hal yang menjadi tanggungan negara seperti, penyediaan kebutuhan rumah tangga, mengadakan keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Gusfahmi memandang bahwa seorang pemimpin wajib mengadakan kebutuhan rakyat (negara) disaat ada atau tidak adanya harta. Tanpa dipenuhiya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi seperti rumah tangga keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk melangsungkan kehidupan. Sehingga seorang pemimpin harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Makanan, pakaian dan perumahan merupakan tanggung jawab individu (kepala keluarga), sedangkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan merupakan tanggung jawab kolektif yang mesti dikordinasiakan dengan negara. Khalifah harus mengadakan kebutuhan ini disaat ada atau tidak adanya harta. Dalam keadaan darurat dan terjadi kekosongan/kekurangan kas negara, pemimpin berhak untuk mengambil harta individu berupa pajak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, disinilah prioritas utama penggunaan uang pajak darurat. Dengan kata lain prioritas penggunaan uang pajak *dharibah* digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut.

Kesehatan, tingkat pendidikan dan keamanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konsep pembangunan ekonomi Islam harus berorientasi pada peningkatan komitmen terhadap agama, dalam pandangan intelektual muslim tujuan akhir dari



pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi "*homoeconomicus*" tapi justru terjadinya "*homo Islamicus*", yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal harus mampu memenuhi sasaran dasar sebuah tatanan social ekonomi Islami. Dalam bahasa Nasution bahwa Kebijakan fiskal Islami harus memiliki orientasi ideologis, yaitu terpenuhinya kesejahteraan material dan spiritual. Pemerintah atau penguasa harus memastikan bahwa penggunaan dana pajak sesuai dengan tujuan pajak ditarik.

Negara memang diberikan hak istimewa dalam memutuskan penggunaan uang, namun semuanya harus didasarkan atas panduan ajaran Islam dan kepentingan rakyat. Chapra mengatakan bahwa keputusan strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara Muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut, tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan. Pertambahan beban bagi rakyat atas adanya kebijakan pajak, dalam pemanfaatannya diutamakan pada pengeluaran-pengeluaran dasar (*dharuriyat*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kamaliyat*) dan barang mewah (*tahsiniyat*)

Dengan demikian prioritas penggunaan uang pajak dikembalikan kepada tujuan semula alasan pajak dipungut dan dalam pemanfaatannya diutamakan pada pengeluaran-pengeluaran dasar (*dharuriyat*) dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap (*kamaliyat*) dan barang mewah (*tahsiniyat*)

### **5.3.5 Fungsi Pajak *Dharibah* dalam Negara**

Sebagaimana sifat pajak *dharibah* yang dijelaskan oleh intelektual muslim bahwa pajak dalam Islam hanya dipungut dalam kondisi darurat, kondisi darurat yang dimaksud yakni ketika kas negara mengalami kekosongan atau kelemahan

sementara semua sumber-sumber pendapatan negara telah dimaksimalkan dan negara yang memiliki kewajiban mewujudkan kemaslahatan tidak bisa merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai batu pijakan untuk mewujudkannya. Upaya darurat yang dilakukan oleh penguasa muslim untuk mendapatkan pendapatan dalam mengisi kekurangan kas negara melalui pemungutan pajak dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidakstabilan negara yang berujung pada tidak terlindunginya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dengan demikian tujuan dari kebijakan pemungutan pajak dalam Islam sesungguhnya hanya sebagai salah satu sumber pendanaan (budjeter) sementara (situasional) jika keadaan kas negara tidak mencukupi untuk merealisasikan kehidupan yang aman sebab ketiadaan kas akan mengancam kestabilan pemerintahan yang akan berujung pada tidak terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan *falah* dalam kehidupan. Meskipun konsep *falah* menurut Caprah tidak jauh berbeda dengan tujuan kesejahteraan dalam konsep ekonomi konvensional. Namun dengan konsep *falah* dalam ekonomi Islam, manusia diletakkan sebagai seorang hamba dan sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi, sebagai seorang hamba kaum muslim dituntut untuk menjadikan semua aktivitas kehidupannya bernilai ibadah sehingga muamalah pajak memiliki semangat ibadah yang berbeda dengan pajak dalam ekonomi konvensional sekalipun menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum namun tidak memiliki kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali.

## 5. 4 Keberatan Terhadap Konsep Pajak Modern Sebagai Pendapatan

### Negara: Refleksi 'Ketidaksetujuan' Intelektual Muslim

Pajak sebagai sebuah sumber pendapatan negara tidaklah diterima oleh semua kalangan meskipun pajak menjadi kontributor terbesar dari anggaran dan pendapatan negara di sebagian negeri-negeri muslim. Dari kalangan intelektual beberapa pertimbangan yang menjadi landasan penolakan terhadap pajak dijabarkan sebagai berikut:

#### 5.4.1 Kewajiban Utama Umat Islam Atas Harta Hanya Zakat

Sebagian dari kalangan intelektual muslim menolak keberadaan pajak sebagai sebuah sumber pendapatan negara hal ini didasarkan pada pandangan bahwa konsep harta dalam Islam merupakan salah satu hal yang terlindungi, yang mana Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kepemilikan individu sehingga seseorang tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain sekalipun yang bertindak dalam hal ini adalah pemerintah. Pandangan tersebut didukung pada beberapa dalil seperti yang terdapat dalam hadis *“Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian.”* hadist yang lain *“tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dirinya”*. Dalil-dalil tersebut menjadi landasan utama bagi kalangan intelektual muslim untuk menolak pungutan berupa pajak.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut, intelektual muslim memandang bahwa satu-satunya kewajiban seorang muslim atas harta yang harus dikeluarkan dan disetorkan ke pemerintah adalah zakat.<sup>86</sup> Adapun kewajiban lainnya atas harta

---

<sup>86</sup> Zakat sebagai konsep pendapatan negara pada awalnya ditarik dan diurus penuh oleh pemerintahan, pemerintah bertindak untuk menangani zakat tersebut. Hal ini karena perintah zakat *“tariklah sebagian dari harta mereka...”* Ini berarti zakat harus ditarik oleh pihak yang memiliki kekuasaan yakni pemerintah. Zakat merupakan salah satu pilar yang

yang juga menjadi landasan bagi sebagian sarjana muslim untuk legalitas pajak “bahwa seorang muslim memiliki kewajiban lain diluar zakat atas harta”, namun pandangan itu bukan pada kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah, sehingga kewajiban yang dimaksud seperti kewajiban menafkahi keluarga, kewajiban menjamu tamu, dan kewajiban lainnya atas harta. Posisi dari kewajiban tersebut, bukan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Satu-satunya kewajiban yang harus disetorkan atas harta kepada pemerintah hanyalah zakat adapun yang lainnya yang ingin disetorkan ke pemerintah masuk dalam kategori sedekah yang derajatnya adalah sunnat, apakah pemberian tersebut berbentuk sedekah, *infaq*, atau *wakaf*.

Bentuk kepemilikan dalam Islam menjadi aturan yang mengatur kehidupan dalam bermuamalat, terlindunginya harta dalam Islam menunjukkan bahwa kewajiban atas harta dalam Islam baik bagi rakyat muslim maupun non muslim harus memiliki dalil *nash* yang memerintahkannya.<sup>87</sup> Tidak adanya dalil untuk kewajiban pajak atas harta menjadi sebuah bentuk tindakan kedzaliman atas harta orang lain. Dengan demikian sebagian intelektual muslim memandang bahwa dalam konsep pemerintahan negeri-negeri muslim saat ini yang mayoritas penduduknya adalah seorang muslim yang tentu mempertimbangkan aspirasi rakyat, seharusnya jika ingin menarik pungutan dari rakyat maka itu hanyalah

---

menempati kedudukan penting di dalam Islam karena kewajiban keagamaan berupa zakat menjadi salah satu bentuk implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, di dalamnya terdapat bentuk jaminan pengamanan sosial untuk kebutuhan orang banyak (sistem distribusi). Pengelolaan zakat yang baik akan menjaga kestabilan kondisi perekonomian seperti tidak terjadi jurang besar antara miskin dan kaya. Tujuan ekonomi atas zakat adalah untuk mempersempit perbedaan ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Pemerintahlah yang harus mengelolah zakat, sebab perintah untuk mengambil zakat dari para wajib zakat ditujukan kepada Rasulullah saw. dalam kapasitas sebagai kepala negara dan pemerintahan. Generalisasi perintah ini berlaku atas seluruh pemimpin pada segala zaman. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi Abu bakar ra, untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat kepada kas negara

<sup>87</sup> Satu-satunya dalil yang memerintahkan dipungutnya pajak adalah kondisi darurat. Kondisi darurat mengakibatkan sesuatu yang haram bisa menjadi boleh karena keadaan darurat. Keadaan darurat tersebutlah yang bisa menjadi dalil dikalangan intelektual muslim yang setuju dengan adanya pajak.

zakat secara normatifnya dan pemaksimalan pengelolaan zakat di masyarakat muslim akan mendatangkan sumber keuangan negara yang besar dan diberkahi<sup>88</sup>. Bahkan sumber pendapatan-pendapatan negara lainnya seperti sedekah, infak dan wakaf akan berdatangan untuk pemenuhan kemaslahatan negara.

Adapun jika pemerintah dalam masyarakat muslim mengeluarkan kebijakan memungut pajak tanpa sebab yang dibenarkan disamping zakat dengan tingkatan derajat wajib, menurut Rahmat Abdurrahman berarti hal ini menyamakan/mensejajarkan dengan hukum Allah Swt. Penyejajaran kewajiban ini dalam masyarakat muslim juga menjadi pengumuman penolakan kepada hukum Allah dalam masalah harta<sup>89</sup>. Selanjutnya negara bertindak memungut pajak lebih diutamakan dari memungut zakat.

---

<sup>88</sup> Sebagian Intelektual muslim memandang bahwa pemenuhan kas negara yang ditarik dari rakyat muslim seharusnya zakat, zakat merupakan instrument fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya dalam masyarakat muslim. dalam pandangan Idris potensi zakat jika digarap dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, bahkan 10 kali lipat dari pendapatan pajak sehingga dapat menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Meskipun zakat memiliki tujuan tertentu yang disebutkan dalam syariah sebagai delapan *asnaf*, namun menurut Rahmat Abdul Rahman penggunaannya dapat dikembangkan dan hal ini mencakup semua pengeluaran-pengeluaran negara yang mengandung maslahat untuk kehidupan. Jika instrument fiskal Islami dikelola dengan baik oleh pemerintah seperti zakat, sedekah, infak dan wakaf maka ujung semua itu akan bermuara pada peningkatan perekonomian bangsa yang diberkati. Adapun jika pada saat ini dampak ekonomi zakat masih sangat kecil di masyarakat muslim karena selama ini belum dikelola secara baik dan profesional disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Rendahnya pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat misalnya. Keawaman masyarakat pada jenis-jenis harta yang dikenai zakat tentu saja berimbas pada besarnya zakat yang dihimpun. Sebagaimana intelektual muslim memberikan pendapat bahwa kondisi demikian tidak terjadi jika pengelolaan sumber pendapatan negara dilakukan dengan baik. Rahmat Abd. Rahman memandang bahwa Jika pengelolaan zakat telah dilakukan dengan sistem yang baik pada segala aspeknya seperti pada registrasi, koleksi dan distribusi. Maka para wajib zakat akan menyerahkan kewajiban zakatnya kepada pemerintah untuk dikelola. Pengelolaan zakat yang baik dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan negara dalam memenuhi kemaslahatan rakyatnya, sedangkan pajak dapat dilakukan pada jenis-jenis tertentu misalnya pajak impor barang<sup>88</sup>

<sup>89</sup> Kedudukan zakat yang sangat tinggi dalam masyarakat Islam bukanlah hasil deklarasi tingkat tinggi manapun, namun tak lain sebagai hasil atau akibat dari pola kehidupan manusia yang telah dibentuk oleh agama Islam untuk kesejahteraan manusia. Inilah hak-hak asasi yang telah diberikan kepada golongan tertentu dalam masyarakat Islam. Maka

Dalam Islam seseorang tidak boleh menetapkan kewajiban atas harta seseorang selain dari apa yang ditetapkan oleh syariat yakni zakat bagi umat Islam dan pajak bagi non muslim, sekalipun yang menetapkan adalah pemerintah. Sebab perkara harta adalah hal dilindungi dalam konsep Islam. seseorang tidak boleh mengambil harta dengan cara yang batil begitupun seseorang tidak boleh mengambil harta tanpa kerelaan dari pemiliknya. Menetapkan sesuatu atas harta di luar yang ditetapkan oleh syariat berarti mengambil hak seseorang baik atas muslim maupun non muslim. Meskipun dalam hal ini yang menetapkan adalah kepala negara.

#### **5.4.2 Konsep *Dharibah* berbedah dengan pajak (tax) modern**

Dalam sistem ekonomi yang berkembang di negeri-negeri muslim, pajak menjadi salah satu jenis pendapatan negara. Dalam bahasa Inggris pajak dikenal dengan istilah tax (sistem ekonomi konvensional) dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *dharibah* (sistem ekonomi Islam). Meskipun keduanya memiliki kesamaan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah namun *tax* dan *dharibah* memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dalam kaitan penciptaan kesejahteraan.

Walaupun dikenal pungutan berupa *dharibah* yang dikatakan sebagai pajak dalam Islam namun sebagian intelektual mengatakan bahwa praktek pajak (*dharibah*) dalam Islam sangat berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme saat ini dalam kaitan penciptaan kesejahteraan, ada karakter khusus bagi pajak syariah yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik pajak konvensional.

Dalam sistem kapitalisme pajak dikenal sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai bentuk sumbangan

---

pandangan intelektual yang memarginalkan mendiskriminasi zakat sama dengan pajak modern. Ini berarti sebuah pelanggaran di masyarakat muslim

wajib kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Pajak juga diartikan sebagai pembayaran yang dibebankan kepada individu (rakyat) atau kelompok (korporat) untuk mendukung pembiayaan bagi pemerintah. Dari pengertian pajak perspektif kapitalis dengan realitas pajak perspektif Islam memang terdapat kesamaan. Namun adanya kesamaan dari segi pungutan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pajak perspektif kapitalis adalah sama persis dengan pajak perspektif Islam, sehingga mengatakan bahwa praktik perpajakan yang diterapkan saat ini tidak sah menurut perspektif Islam.

Sebagian intelektual muslim yang memandang bahwa pajak tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan negara di negeri-negeri muslim sebab pajak yang berkembang di negeri-negeri muslim berdasarkan adopsi rumusan Barat yang berbeda dengan konsep *dharibah* dalam Islam. Perbedaan konsep pajak yang ada saat ini di negeri-negeri muslim dengan konsep *dharibah* sebagai pajak darurat (*dharibah*) dalam Islam dapat dilihat dari konsep pajak modern yang dipungut sebagai pendapatan negara berlaku secara terus menerus bahkan menjadi sumber pendapatan utama negara. Implikasinya pengeluaran atas harta seseorang menjadi semakin besar untuk waktu yang lama bahkan terus menerus<sup>90</sup> selain itu implikasi lainnya menjadikan pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan final sehingga pemerintah tidak terdorong untuk berusaha mencari sumber pendapatan lainnya seperti memaksimalkan pendapatan BUMN dengan pengelolaan penuh oleh negara. Dengan demikian konsepnya berbeda dengan pajak darurat dalam kondisi khusus yang keberadaanya dihapuskan ketika negara telah memiliki dana dalam penyelenggaraan negara, yakni ketika kas negara telah terisi kembali.

---

<sup>90</sup> Gusfahmi memandang bahwa dalam konsep pajak konvensional, pajak tidak akan dihapuskan karena menjadi sumber pendapatan (hanya itulah sumber pendapatan).

Mudzakkir Arif juga melihat perbedaan konsep tersebut dari pertimbangan subjek pajak. Jika dalam konsep pajak *dharibah* dalam Islam itu hanya dipungut dari kalangan kaya<sup>91</sup> sementara dalam pajak modern bukan saja dipungut dari orang kaya namun kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya hal ini karena pajak demikian dipungut berdasarkan objeknya (barang atau jasa) yang di konsumsi.

Perbedaan lainnya dari sisi penggunaan uang pajak dalam perekonomian modern tidak dapat dipastikan bahwa digunakan kearah kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam bahkan terkadang digunakan untuk memperkuat kedzaliman. Alimuddin memandang bahwa seorang muslim harus memperhatikan penggunaan hartanya, hal ini karena penggunaan harta merupakan salah satu hal yang akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat<sup>92</sup>, adapun dalam penggunaan uang pajak modern seseorang tidak dapat memastikan uang pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan. Lebih lanjut Alimuddin memberikan sebuah contoh bahwa pajak bisa saja digunakan untuk jalan prostitusi atau memperkuat polisi yang digunakan untuk memerangi pasukan yang dituduh teroris padahal sebenarnya dia adalah seorang mujahid.

Perbedaan lainnya pajak *dharibah* dibayar berdasarkan semangat ibadah yakni jihad harta untuk kemaslahatan umum yang sangat sesuai dengan nilai Islam. Namun pajak modern dibayarkan hanya atas dasar kepentingan ekonomi semata, hal ini karena karena tujuan kemaslahatan yang digariskan dalam negara terkadang tidak sesuai dengan semangat Islam. Dengan demikian jika dalam

---

<sup>91</sup> Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Lihat Gusfahmi hal. 35

<sup>92</sup> Pandangan tersebut didasarkan pada sebuah hadist Rasulullah bahwa kaki seorang tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang beberapa perkara diantaranya harta, dari mana dan kemana digunakan.



pajak darurat dalam Islam didasarkan pada filosofi nilai tolong menolong dan kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan maka dalam aplikasi pajak modern tolong menolong diragukan, bahkan tolong menolong dalam kebaikan (kemaslahatan) bisa berubah menjadi tolong menolong dalam dosa dan tindakan kedzaliman.<sup>93</sup> Tindakan kedzaliman tersebut menjadi lebih jelas ketika sebagian orang berusaha untuk menghindari pajak.<sup>94</sup>

Dengan demikian konsep pajak syariah (*dharibah*) tidak sama dengan konsep pajak konvensional. Konsep *dharibah* tidak sekuler dan tidak netral nilai (ada nilai ibadah), namun ia didasarkan pada sejumlah konsep yang sesuai dengan spirit Islam. *Dharibah* sebagai pajak memberikan penekanan pada sejumlah nilai seperti tolong menolong, nilai jihad harta, pemerataan dan kemaslahatan umum dan yang paling mendasar adalah nilai ketuhanan. Adapun jika pajak modern tidak demikian maka dalam pandangan intelektual muslim pajak tersebut tidak dapat dijustifikasi sebagai salah satu sumber pendapatan di

---

<sup>93</sup>Tolong menolong dapat dibagi menjadi dua. Pertama, tolong menolong untuk melakukan kebajikan dan takwa semisal tolong menolong dalam jihad, menegakkan hukuman had, mengambil hak dan memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya. Tolong menolong semacam ini diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Tolong menolong dalam pajak *dharibah* bisa dikategorikan sebagai tolong menolong dalam kebaikan (jihad dalam bentuk menginfakkan harta). Kedua, tolong menolong dalam dosa dan tindakan kezaliman semisal tolong menolong untuk membunuh orang, mengambil harta orang lain, memukul orang yang tidak berhak dipukul dan semisalnya. Ini adalah tolong menolong yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya. Tolong menolong dalam pajak modern dapat berubah menjadi tolong menolong jenis ini. Sehingga orang yang membayar pajak menjadi penolong perbuatan dosa dan kezaliman padahal Islam melarang keras tolong menolong dalam kedzaliman. Inilah landasan sebagian intelektual mendukung penghindaran pajak yang tidak bisa memastikan kemaslahatan yang dituju dalam pemerintahan negeri muslim.

<sup>94</sup> Alimuddin dan Mudzakir Arif memandang bahwa sebagian orang menghindari pajak bukan karena tidak ingin taat dengan pemerintah, melainkan sebagai bentuk upaya melindungi penggunaan harta. Yang mana dalam konsep Islam seseorang akan dimintai pertanggung jawaban bukan hanya dalam perkara "dimana harta didapatkan" melainkan juga dalam hal "kemana digunakan". Berkenaan dengan pertanggung jawaban yang terakhir, harta yang disetorkan ke negara dimana seseorang tidak bisa menjamin bahwa harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Sementara orang-orang yang membayar pajak lebih banyak diserahkan dalam bentuk keterpaksaan, agar usahanya tidak terkendala dalam masalah administrasi.

negeri-negeri muslim jika tetap demikian sumber pendapatan tersebut menjadi nyata sebagai sebuah bentuk kedzaliman (pinindasan).

#### **5.4.3 Mengapa harus pajak jadi solusi sumber pembiayaan negara**

Intelektual muslim yang menolak perpajakan tidak memungkiri bahwa dibutuhkan sumber keuangan yang besar untuk kepentingan penyelenggaraan negara muslim modern, yang kesehariannya masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa segar dan sehat, ketersediaan kebutuhan pokok, terpenuhi jasa publik, pendidikan dan sebagainya, yang seluruhnya memerlukan dana dalam penyelenggaraannya. Akan tetapi yang menjadi titik perhatian intelektual muslim atas pajak tersebut pada pertanyaan mengapa dan apa alasan yang mendasari sampai masyarakat harus dengan cara membayar pajak untuk pemenuhan kemaslahatan (kemakmurannya) tersebut. Keberatan intelektual muslim terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara mempertanyakan pilihan kebijakan tersebut. Apakah semua sumber pendapatan negara yang seharusnya (normatif) telah dimaksimalkan sehingga harus jatuh kepada kebijakan perpajakan?. Selain itu sejumlah pertanyaan intelektual terhadap keabsahan pajak dan sejauh mana negara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariah bagi diperbolehkannya memungut pajak.

Sekalipun dibolehkan dalam kondisi darurat, intelektual muslim mempertanyakan apakah kondisi negeri muslim sudah dikatakan darurat. Bagi Intelektual muslim yang menolak pajak memandang bahwa negeri muslim tidak dalam kondisi darurat, kondisi darurat yang dimaksud dalam Islam adalah kondisi ketika tidak terdapat lagi sumber keuangan. Adapun negeri-negeri muslim memiliki kekayaan alam yang banyak yang dapat dikelola oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan negara, sehingga intelektual muslim memandang sangat tidak potensial ketika pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan

negara. Lebih dalam Alimuddin dan Rahmat Abdurrahman memandang bahwa pemerintah seharusnya bekerja keras dalam pengelolaan kekayaan alam agar bisa digunakan untuk kepentingan luas sehingga sumber pendapatan negara tidak ditarik dari rakyat.

Selain penolakan atas sejauh mana negara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh syariah bagi diperbolehkannya memungut pajak, sikap rakyat sebagai wajib pajak yang merasa didzolimi ditambah dengan integritas pemerintah (termasuk para pejabat pajak) juga menjadi bagian dari pertimbangan intelektual muslim atas penolakannya terhadap justifikasi pajak terutama pada sebagian jenis pajak tidak memperhatikan tingkat kekayaan wajib pajak dan sumber pendapatan rakyat.

Selain itu kebijakan pajak mengakibatkan ketergantungan pada pajak sehingga ikut mendorong pemerintah untuk tidak mencari dan berusaha mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari kekayaan alam di negeri-negeri muslim. Hal ini karena kebijakan pajak yang praktis, negara mencukupkan usaha untuk mendapatkan sumber keuangan hanya melalui sidang pemutusan pajak oleh wakil-wakil rakyat tanpa perlu bekerja.

Mengenai konsep negara bagi sebagian kalangan yang melakukan dikotomi antara negara Islam dan negara bukan Islam untuk justifikasi pajak, pandangan ini mengatakan bahwa jika negara Islam maka tidak ada pajak. Akan tetapi univesalitas Islam yang mampu menjangkau setiap zaman bagi sebagian kalangan intelektual tidaklah mempersoalkan bentuk negara berkenaan dengan pajak tersebut. Meskipun negeri-negeri muslim saat ini bukanlah negara Islam (ideal)<sup>95</sup> sehingga harus sama dengan konsep sumber pendapatan yang ada

---

<sup>95</sup> Pada hakikatnya klasifikasi negara itu bukan berasal dari Alquran. Tidak ada ayat dalam Alquran yang secara eksplisit menyebutkan klasifikasi tersebut, begitu pula dalam sunnah Rasulullah serta zaman para sahabat generasi pertama dalam sejarah perjalanan

pada zaman nabi, namun penolakan intelektual muslim bukan karena konsep negara Islam itu sendiri, melainkan pajak sebagai sumber pendapatan negara memang tidak cocok di negeri-negeri Islam yang kekayaan alamnya melimpah.

#### **5.4.4 Pengaruh sekularisme dalam pendapatan negara (refleksi pembebanan pajak)**

Berakhirnya perang dunia antar ideologi dunia telah melahirkan tatanan global baru yang lebih didominasi kapitalisme sebagai sebuah ide dan tindakan.<sup>96</sup> Landasan atau sistem nilai (*value based*) yang membentuk kapitalisme adalah paham materialisme-hedonisme dan sekularisme. Paham materialism hedonisme cenderung berpandangan parsial tentang kehidupan dengan anggapan bahwa materi adalah segalanya. Paham materialisme ini telah membawa orientasi hidup manusia lebih kepada kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik semata sehingga mengabaikan dimensi spiritual. Sedangkan paham sekularisme berusaha memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, bahkan cenderung mengabaikan dimensi normatif atau moral. Implikasi selanjutnya, paham ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusialah yang berhak

---

kaum muslimin. Bahkan untuk tipe negara ideal yang dibangun nabi saw. di madina, para pemikir Islam pun berbeda dalam memberi sebutan nama untuknya. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai “negara madina”, sebagian menyebutnya “negeri hijrah” (Darul Hijrah), ada pula yang menamakannya “negeri muhajirin” (darul muhajirn). Hanya saja para ulama mengembangkan konsep-konsep tersebut beberapa ratus tahun kemudian, yakni pada awal dinasti Abbasiyah. Lihat. Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum internasional dan Hukum Islam tentang sengketa dan Perdamaian. PT. Gramedia pustaka utama 2013. Hal 134

<sup>96</sup> Kapitalisme merupakan sebuah paham yang lahir akibat pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah diantara dua kutub ekstrem, yaitu pandangan gereja dan para raja Eropa. Pandangan gereja memandang bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi gereja di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir yang menolak eksistensi gereja. Idris (2013:36) mengatakan bahwa sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama. Akan tetapi meniadakan agama dalam negara. Selanjutnya karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan bernegara, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabannya adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja).

menentukan kehidupannya sendiri.<sup>97</sup> Kedua nilai dasar ini telah menjadi bingkai bagi pembentukan pandangan dunia (*world view*) ekonomi kapitalis.

Dasar filosofis pemikiran ekonomi pasar (kapitalis) bersumber dari karya monumental Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang merumuskan bahwa alam semesta berjalan serba teratur, sistem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri (*self adjustment*) karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai *invisible hands* (tangan gaib).<sup>98</sup> Sistem ekonomi pasar ini menekankan untuk tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah

---

<sup>97</sup> Mengenai paham sekuler Idris (2013) mengatakan manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (*freedom/liberalism*) yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku dan kebebasan berkepemilikan. Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologi ini jelas pula, bahwa prinsip sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme. Sekularisme ini pula yang mendasari prinsip cabang kapitalisme lainnya, yaitu prinsip yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat (dengan pajak). Semua dianggap lepas atau tidak boleh dikaitkan dengan agama. Dengan demikian, segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan asas manfaat ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa). Anggapan Barat yang sekuler berpendapat bahwa agama tidak relevan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan yang berlaku hanyalah hukum-hukum perilaku ekonomi. Sehingga melahirkan tatanan ekonomi liberal. Liberalisme dibangun atas dasar prinsip utama yang sangat terkenal, yakni *laissez-faire*, *laissez-passer*. Pandangan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal pada para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang disukainya, serta meminimalkan campur tangan pemerintah.

<sup>98</sup> Sistem ekonomi liberal didasarkan pada paradigma ekonomi kapitalisme. Kapitalisme sendiri pernah digagas oleh Adam Smith dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Wealth of Nations*. Dasar-dasar ekonomi liberal mengacu pada kebebasan pasar, dan yang paling berhak mengatur segalanya adalah pasar berikut kompetisinya. Pendukung doktrin ekonomi pasar bebas atau dikenal dengan istilah "*laissez-faire*". *Laissez-faire* adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti "biarkan terjadi". Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan (Chapra, 2001: 22).

dalam perekonomian. Pandangan ini berpendapat bahwa pemanfaatan terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dan pada gilirannya akan mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bersama apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian, tidak campur tangannya pemerintah dalam masalah ekonomi telah menjadikan peran pemerintah untuk mengelolah sda semakin kecil.

Dalam pandangan "*laissezfaire*", kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan masalah ekonomi hendaknya sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Selanjutnya negara yang memiliki otoritas mengelolah kekayaan alam untuk kepentingan rakyat semakin kecil perannya sehingga pemenuhan kas negara dicukupkan dari penerimaan pajak.

Para intelektual memandang bahwa Eropa mempunyai pengaruh pada sebagian besar hasil pemikiran antara abad 18 dan 19 yang berdasarkan prinsip *liberalism, individualism* dan pembatasan intervensi negara terhadap persoalan-persoalan privat. Sistem ekonomi kapitalis yang menekankan pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian inilah yang melandasi prinsip penerapan pajak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh negara."

Ide pemisahan agama dengan negara yang menjadi nilai dari sistem kapitalisme berkembang luas dalam negara-negara jajahan Barat melalui penetrasi dan dominasi Barat yang menghegemoni masyarakat muslim, antipati dan isolasi umat Islam.<sup>99</sup> (Nasution, 2007) mengungkapkan bahwa para pakar

---

<sup>99</sup> Ibrahim Warde dalam bukunya *Islamic Finance* mengungkapkan bahwa setelah era colonial berakhir, negara-negara yang *independen* menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru pula. Pada 1950-an dan 1960-an terlihat kemunculan nasionalisem

ekonomi telah terpengaruh dengan ide pemisahan agama dari negara, ikut mengatakan bahwa penyelesaian segala permasalahan yang timbul (kekurang kas) tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan, tapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja. Sehingga dalam hal pengelolaan keuangan negara, dunia Islam dewasa ini telah kehilangan spirit *religiositas* dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. Hilangnya spirit *religiositas* dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara, menurut Nasution disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam sehingga dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital. Lebih lanjut Nasution mengatakan tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterahkan rakyatnya.<sup>100</sup>

---

ekonomi dan penekanannya pada pertumbuhan dan pembangunan dan leberalisasi sebagai tahapan selanjutnya. Para liberalis menonjolkan akses Islam dalam hal hak-hak kekayaan dan sanjungan pada keuntungan perdagangan untuk mendukung kebijakan *laissez-faire* (kebijakan yang membolehkan perusahaan-perusahaan bisnis untuk beroperasi dan berkembang secara bebas tanpa campur tangan atau kontrol dari pemerintah. Lebih lanjut Warde menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan sangat tersekulerisasi secara signifikan. Perdebatan ideologi di era modern sudah dibingkai berdasarkan norma-norma Barat. Pada era Liberal, muslim yang belajar ekonomi gaya Barat (serta bidang pengetahuan lain yang berhubungan dengannya) mencoba untuk mentransfer ilmu pengetahuan tersebut pada dunia Islam. Ibrahim warde, Ibid., Hal 82-83. Mugist (2003) juga mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip Islam di dunia Islam mulai pudar bersamaan dengan semakin banyaknya mengadopsi kebudayaan luar, terutama barat yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Islam semakin cenderung sekuler, lebih-lebih setelah banyak negara Islam yang menjadi wilayah koloni bangsa barat pada abad modern yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis. Jurnal hermeneia jurnal kajian Islam interdisipliner vol.2 no.2 juli-des 2003 hal 174

<sup>100</sup> Nasution memberikan contoh, seperti tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program *welfare*. Program kesejahteraan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan bencana yang meliputi kesehatan dll. Menghilangnya *regiolitas* dari panggung ketatanegaraan dan serta merta mengadopsi sekularisme dan matrealisme yang tidak dipahami mendorong moralitas yang bobrok. Korupsi yang merupakan penyakit menjadi bukti. Unsure zakat dalam perekonomian dewasa ini (konvensional) tidak menjadi variable utama dalam struktrur teori yang ada. Tidak ada unsure zakat dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) karena memang zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. (nasution, hal 207)

Mengenai hubungan sistem ekonomi kapitalis sebagai turunan dari paham sekularisme terhadap perpajakan sebagai pendapatan negara di negeri muslim, Alimuddin mengungkapkan bahwa *“logikanya kenapa pemerintah memungut pajak, itu karena turunan dari ekonomi yang kita pelajari ekonomi kapitalis, bagaimana itu? Konsep ekonomi kapitalis mengatakan bahwa pemerintah tidak usah berusaha, biarkan kami ini pengusaha bekerja, sebagian dari hasil kami serahkan ke pemerintah berupa pajak, jadi kalian (pemerintah) duduk-duduk saja”*.

Minimalnya peran negara dalam konsep kapitalis telah menjadikan negara menyerahkan sistem ekonomi kepada sistem pasar sehingga pengelolaan kekayaan alam diberikan kepada pemodal (pihak kapitalis) yang selanjutnya negara mendapatkan bagian berupa pajak. Konsep ekonomi kapitalis telah diadopsi di negeri-negeri muslim sehingga peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam menjadi kecil selanjutnya pemerintahan negeri-negeri muslim memenuhi kas negara dengan pajak hasil dari adopsi konsep kapitalis. Sementara paham ekonomi liberal mengajarkan rakyat dapat mengusahakan ekonomi dan berusaha sesukanya asalkan membayar pajak sebagai kontribusi ke pemerintah. Disisi lain akibat dari paham kapitalis, aspek zakat sebagai kewajiban bagi kaum muslim ditiadakan dalam negara seiring dengan semakin menguatnya konsep kebangsaan yang didukung dengan dominasi dan hegemoni Barat.

Sehingga dengan demikian dalam konteks modern, pajak di berbagai negeri muslim yang menjadi sumber pendapatan utama negara merupakan dampak dari kebijakan ekonomi kapitalis yang meminimalkan peran negara



dalam perekonomian.<sup>101</sup> Sehingga kesejahteraan rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta melalui setoran pajak.<sup>102</sup>

Penolakan intelektual muslim terhadap pajak sebagai pendapatan negara juga karena sistem pajak merupakan adopsi sistem kapitalisme, yang menurut intelektual muslim jika negeri-negeri muslim menggunakan mekanisme di luar Islam untuk mensejahterahkan rakyat justru dunia Islam tidak mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan dan intelektual muslim memandang bahwa tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterahkan rakyatnya. Hal ini karena masyarakat muslim memiliki filosofi nilai dalam kehidupan yang bertentangan dengan pajak sekuler tanpa nilai ketuhanan dan spiritual lainnya.<sup>103</sup>

Intelektual muslim memandang bahwa konsep pajak sebagai pendapatan negara dalam masyarakat muslim tidak mampu memberikan kesejahteraan

---

<sup>101</sup> Mengenai pengaruh kapitalis dengan sistem pajak diberbagai negeri muslim juga diakui oleh John Perkins, dalam bukunya *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, bahwa imperium negara-bangsa yang mendominasi negara bangsa lainya menunjukkan cirri-ciri. 1. Mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi. 2) menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangs-bangsa lain, 3) memiliki angkatan militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus gagal, 4) menyebar bahasa, sastra seni dan berbagai aspek budayanya ke seluruh tempat yang beradah dibawah pengaruhnya, 5) menarik pajak bukan hanya dari warganya sendiri, tapi juga orang-orang dari negara lain, dan 6) mendorong penggunaan mata uangnya sendiri di negara-negara yang berada di bawa kendalinya. John Perkins, *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, Jakarta: Ufuk Press 2007

<sup>102</sup> Cengkruman kapitalisme semakin kuat dengan melihat perkembangan APBN dari tahun ke tahun; secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Tahun, 1989, misalnya sumber pendapatan negara yang berasal dari Pajak masih sekitar 51%. Namun, tahun 2006 pendapatan negara dari pajak meningkat menjadi 75%; sisanya dari pengelolaan SDA dan pinjaman. Menurunnya penerimaan bukan pajak adalah dampak kebijakan Pemerintah yang semakin kapitalis melalui proyek swastanisasi pengelolaan SDA ke swasta, khususnya asing, melalui peningkatan investasi yang dilegalkan melalui UU seperti UU SDA, UU Minerba, UU Penanaman Modal. Lalu dari sisi kualitas, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah terus meningkatkan obyek pajak dan subyeknya.

<sup>103</sup> Karena pajak yang ada merupakan hasil rumusan negara-negara pemenang perang, dan setelah sedikit perubahan agar berpihak kepada keadilan. Menurut Firman Menne pajak lebih diterima di negara bukan Islam seperti Eropa, Singapur, Amerika dll karena negara mereka memang negara uang.

kepada manusia muslim. Hal ini karena konsep pajak Peradaban Barat yang dibawa oleh globalisasi tidak sejalan dengan konsep peradaban Islam. Jika Barat maju karena meninggalkan agama, Islam tidak demikian. Justru ketika umat Islam memisahkan diri dari agama, maka kehancuran atau kebiadaban akan semakin berkuasa. Untuk itu, diperlukan suatu perubahan peradaban dunia yang sarat akan nilai-nilai Islam.

Lebih dari itu, paham kapitalis menjadikan negeri-negeri muslim sulit untuk maju, dari sisi kekayaan alam melalui paham kapitalis, kekayaan alam dikuasai oleh pihak swasta melalui proyek swastanisasi pengelolaan SDA, khususnya asing melalui peningkatan investasi. Dari sisi pajak sebagai pendapatan negara, Barat juga ikut menikmati dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi melalui perangkat pemberian pinjaman. Akhirnya sumber-sumber daya negara semakin berkurang manfaat bagi negara (kesejahteraan umum). Belunggu modal yang tinggi menjadikan negeri muslim terikat. Dana penopang negara akhirnya diambil dari rakyat melalui pajak yang terus membengkak. Sehingga hakikatnya umat Islam dikesampingkan hanya untuk kepentingan-kepentingan kaum kolonial modern.

#### **5.4.5. Kedzoliman dalam tubuh perpajakan**

Secara umum pajak yang tidak didasarkan pada ketentuan agama akan menciptakan ketidak-sejahteraan bermula dari ketidak-adilan dalam masyarakat dengan kedzaliman dan penindasan sebagai mana ini terjadi dalam sejarah umat manusia yang tidak lepas dari berbagai tindak kedzoliman dan selalu saja kaum yang menjadi korban bulan-bulanan atas kedzoliman tersebut adalah mereka yang lemah dan miskin. Jauh sebelum semburat cahaya Islam muncul, sejarah silam bangsa Persia, Romawi, Cina, Mesir, India dan bangsa-bangsa tua lainnya,

sarat dengan tumpukan lembaran-lembaran kelam kedzoliman, hal tersebut lantaran dilatari oleh kebiasaan para raja yang hidup mewah, menumpuk pundi-pundi harta dan berfoya-foya di samping aturan dan undang-undang *dzolim* yang dikukuhkan sebagai pemuas hawa nafsu penguasa. Karenanya, mereka tidak merasa malu menjerat leher rakyat jajahan dengan upeti dan pajak yang jauh dari batas kesanggupan.

Dalam dunia modern fenomena ketidakadilan dalam pajak harus diakui dan kini telah menjadi kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari. Meskipun sejak awal Islam datang menyeru umat manusia untuk lepas dari kungkungan kedzoliman akan tetapi perubahan zaman sebagaimana yang digambarkan oleh Sang utusan bahwa akan datang suatu zaman dimana manusia tidak lagi memperhatikan tentang harta haram dan halal, nampaknya zaman itu telah ada dalam dunia Islam modern, warisan-warisan pajak jahiliyah telah muncul kembali, kesewenang-wenangan kaum yang kuat dan kedzaliman penguasa dalam memungut pajak.

Kebijakan perpajakan dewasa ini menjadi sebuah sistem yang digunakan oleh berbagai pemerintah di masyarakat muslim sebagai alat untuk mendapatkan sumber pendanaan. Aliran keuangan yang masuk ke kas negara tak terlepas dari penderitaan diatas pundak rakyat yang telah tersistemisasi dengan gaya yang halus. Aliran kas dari rakyat ke negara didefinisikan dengan halus sebagai kontribusi warga negara. Padahal kontribusi berupa uang hakikatnya hanya diserahkan oleh orang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang ekonomi. Adapun pajak dengan berbagai jenisnya terkadang tidak bisa membaca mana rakyat yang kaya dan miskin. Sehingga sifatnya sulit untuk dikatakan sebagai kontribusi, menurut Firman Menne bahkan lebih banyak bermakna 'pemalakan' atau 'perampok resmi'.

Intelektual memandang bahwa *kedzaliman yang hampir merata di negeri-negeri muslim adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama*". Kedzaliman dalam perpajakan dapat dilihat dari penetapan kewajiban kepada rakyat atas pemenuhan kas negara yang sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat secara terus menerus. pembebanan pajak merupakan bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil karena kewajiban tersebut bukanlah merupakan sebuah kewajiban. Terdapat banyak dalil dalam Islam tentang terlindunginya harta seseorang seperti dalam surah An-Nisa ayat 29 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil" dan dalam banyak hadist Rasulullah diantaranya "Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya"

Menurut Rahmat dalam disertasinya *Keuangan Negara Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia* menyebutkan contoh kedzaliman dalam jenis pajak modern jenis yang melanggar aturan agama yaitu pajak penghasilan atas umat Islam. Penghasilan seseorang di dalam Islam hanya dikenakan kewajiban zakat, dengan syarat memenuhi nisab dan dimiliki selama setahun (*haul*), sehingga mewajibkan pajak atas penghasilan seseorang selain zakat, hukumnya sama dengan merampas atau menyaingi hak Allah swt. dalam menetapkan hukum. Kewajiban pajak penghasilan dapat menambah beban para wajib zakat, sebab harus mengeluarkan dari jumlah penghasilannya sebanyak dua kali, tanpa kondisi yang mengharuskan pemerintah boleh memungut pajak.

Contoh yang lain disebutkan oleh Mudzakkir dalam jenis pajak PPN. Dimana hampir semua jenis barang dan jasa pada setiap tingkatan dikenakan

PPN dengan tingkatan sama 10 % kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah pemakai dan yang memakai dari segala tingkat ekonomi, tanpa membedakan miskin dan kaya. Pengenaan pajak yang sama untuk setiap jenis komoditi menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban yang sama dengan golongan pendapatan tinggi, Sehingga pajak tersebut menjadi sesuatu yang memberatkan bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama kaum miskin yang kemampuan daya belinya semakin berkurang dengan adanya PPN. ini mencerminkan ketidakadilan dalam pembebanan pajak.

Lebih dari itu, selain kedzaliman yang terdapat dalam jenis-jenis pajak. Kedzaliman dalam legalitas pajak di negeri muslim, yang mana pemerintah menjustifikasi kebijakan pajak tanpa ijtihad kolektif atau tidak terdapatnya fatwa yang jelas terkait legalitas pajak. Pajak seharusnya bukan kebijakan yang dibangun berdasarkan internal negara (pemerintah). Keputusan Kebijakan pajak sepihak dari pemerintah merupakan tanpa ijtihad kolektif juga merupakan sebuah kedzaliman, dalam bernegara seharusnya pemerintah mempertimbangkan aspirasi rakyat mayoritas muslim dengan melakukan ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa negara karena pungutan apa pun yang tidak disebutkan dalam syariah merupakan intervensi terhadap hak dan kebebasan pribadi. Dengan demikian pajak yang dipungut dengan tidak sesuai dengan konsep syariah atas seorang muslim maka pemerintah sebagai pemungut pajak telah mengintervensi kemerdekaan pribadi-pribadi rakyat. Jadi intelektual muslim memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi rakyat terutama umat Islam dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah swt.

#### **5.4.6 Sebuah pintu untuk pendapatan non-halal**

Dengan adanya validitas pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang diterima dalam masyarakat muslim yang homogen akan mengundang perkembangan usaha-usaha yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Logika ini dapat dipahami bahwa pajak yang dibayar oleh pengusaha dari usaha-usaha yang tidak dibenarkan dalam Islam mendapatkan perlindungan dihadapan negara terhadap kelangsungan usahanya. Perlindungan tersebut diberikan karena mereka telah membayar pajak kepada negara. Sehingga dalam hal ini pajak menjadi sebuah tameng perlindungan atas kemungkaran yang dijalankan hanya dengan membayar pajak, perusahaan-perusahaan mungkar mendapat legitimasi perlindungan untuk menjalankan kemungkaran yang selanjutnya membuka pintu untuk bertambahnya perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Sementara dalam pandangan intelektual muslim seperti Rahmat Abdurrahman bahwa pendapatan negara haruslah dicukupkan dari sumber-sumber yang halal. Sumber-sumber halal ini diyakini dapat memberikan keberhakan kepada anggaran negara, sehingga dapat menutupi pos-pos pengeluaran dan mengarahkan pembangunan sesuai jalurnya yang diridhai oleh Allah swt. sebaliknya sumber-sumber haram tidak mendatangkan sesuatu kecuali murka Allah yang dapat berwujud pada ketidakberkahan, sehingga pembangunan negara yang dibiayai oleh sumber-sumber ini mengalami disorientasi, dan cenderung merusak pengelolannya.

Pada sisi yang lain Rahmat menjelaskan bahwa sumber pendapatan negara yang haram dapat menggerus sumber lain yang halal, seperti pajak pendatan negara dari pajak minuman keras, justru mengakibatkan pengeluaran negara yang besar demi menanggulangi pengaruh dari minuman keras tersebut, berupa tindakan-tindakan pidana dan kriminal, atau contoh lain, penerimaan

negara dari pajak tempat-tempat prostitusi, faktanya menyebabkan pengeluaran negara yang lebih besar buat mengatasi dekadensi moral dan keruntuhan sendi-sendi sosial pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

#### **5.4.7 Penghindaran pajak modern upaya perlindungan harta**

Ketidak jelasan dalam penarikan dan penggunaan uang pajak menjadikan sebagian dari kalangan intelektual muslim setuju dengan penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada konsep kepemilikan harta dalam Islam yang merupakan amanah dimana seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas harta baik tentang cara memperoleh maupun dalam penggunaan. Berkenaan dengan penggunaan harta seorang muslim harus mengarahkannya kepada hal-hal yang mengandung maslahat baik dunia maupun akhirat. Sementara penggunaan harta yang berkaitan dengan pembayaran pajak, seseorang tidak dapat memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintah digunakan untuk kemaslahatan umum hal ini karena tidak adanya komitmen pemerintah terhadap syariat. Landasan penghindaran pajak yang selanjutnya berkaitan dengan konsep terlindunginya harta. Intelektual muslim memandang bahwa penghindaran pajak modern boleh dilakukan karena pada hakikatnya harta adalah sesuatu yang dilindungi, dan seseorang tidak boleh bertindak untuk mengambilnya tanpa hak sekalipun yang bertindak adalah penguasa dan upaya untuk menjaga harta adalah jihad sebagaimana Rasulullah saw. menilai seorang muslim yang berjuang melawan perampok yang ingin mengambil harta sebagai orang yang mati syahid.

## 5.5 Akuntansi Perpajakan : Refleksi Kebutuhan Keuangan Dunia Islam

Akuntansi dalam islam merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah pencatatan tersebut bersifat universal yang bertujuan untuk kemaslahatan adapun Akuntansi dalam perpajakan dimaksudkan untuk pencatatan perpajakan yang sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki Islam sehingga akuntansi menjadi alat untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semangat Islam.

### 5.5.1 Akuntansi Sebagai Bagian dari Sistem Islam yang Kompleks

Akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu secara teoritis maupun praktis merupakan produk sejarah yang mencerminkan kebutuhan manusia atas kompleksitas tuntutan kehidupan berekonomi. Harahap menyebutnya sebagai sebuah refleksi budaya<sup>104</sup>. Pandangan ini dapat dijelaskan bahwa akuntansi sebagai sebuah produk lahir berdasarkan realitas sistem yang mendukungnya, ibaratkan sebuah pohon akan tumbuh sangat dipengaruhi oleh lahan tempat ia tumbuh. Masyarakat yang hidup dalam tatanan ekonomi kapitalisme akan menganut model akuntansi kapitalisme. Begitupun sistem sosialisme akan melahirkan akuntansi sosialisme.

Akuntansi sebagai ilmu bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam, seperti yang dikatakan Harahap bahwa dalam Islam sejak munculnya telah ada perintah melakukan sistem pencatatan,<sup>105</sup> sistem pencatan merupakan upaya

---

<sup>104</sup> Harahap dalam bukunya *Akuntansi Islam* menuliskan bahwa akuntansi merupakan refleksi budaya. Muncul pertanyaan apakah ada akuntansi dari budaya Islam? Agama (Islam) dalam posisi ini dalam konteks fenomena berperan seperti budaya. Menciptakan perilaku sosial yang menjadi nilai hingga membentuk kebiasaan masyarakat dalam pranata sosial. Sehingga agama dapat dianggap sebagai (turats) budaya (nilai) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian akuntansi yang lahir dari rahim agama merepresentasikan nilai dan budaya masyarakat.

<sup>105</sup> Sistem pencatatan akuntansi dalam Islam tekanannya pada tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang melakukan muamalah. Lihat Sofyan Syarif Harahap, *akuntansi Islam*, 2004 Jakarta; Bumi Askara hal 120-123



untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Filosofi yang mendasari akuntansi dalam peradaban Islam tiada lain bahwa dalam Islam pertanggung jawaban merupakan ajaran yang fundamental dari sisi teologis dan sosiologis.<sup>106</sup> Sehingga dengan demikian akuntansi dalam Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan sejarah melainkan secara teologis sebagai perintah Allah untuk kemaslahatan<sup>107</sup>.

### 5.5.2 Harmonisasi Akuntansi Islam dan Pajak Islam (*dharibah*)

Ketika masyarakat yang bersangkutan adalah Islam, maka sistem ekonomi pun harus Islam dan akuntansi otomatis juga harus berdasar pada Islam. Rumusan Gambling dan Karim tersebut mengisyaratkan bahwa, Jika ada masyarakat Islam maka ada ekonomi Islam, jika ada ekonomi Islam maka ada akuntansi Islam dan jika ada pajak Islam maka akuntansinya pun ada. Karena Masyarakat yang hidup dalam tatanan ekonomi kapitalisme akan menganut model akuntansi kapitalisme. Begitupun sistem sosialisme akan menciptakan akuntansi sosialisme. Sehingga Dalam tatanan masyarakat Islam akuntansi pun harus diterjemahkan berdasarkan skala sistem ekonomi Islam dalam mengatur filosofi hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat yang hidup dalam pungutan pajak konsep kapitalis akan menganut model akuntansi perpajakan sesuai dengan konsep kapitalisme.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Salah satu hakikat manusia dalam Islam dipahami sebagai pemegang amanah sehingga pertanggung jawaban kepada sang pemilik menjadi niscaya seperti dalam QS. Al Haaqqah [69]: 20.

<sup>107</sup> QS. Al Baqaarah [2]: 282.

<sup>108</sup> Akuntansi sebagai produk lahir berdasarkan realitas sistem yang mendukungnya. Dalam sistem kapitalis akan melahirkan pajak perspektif kapitalis sehingga akuntansi hadir dalam realitas kapitalis sebagai alat untuk memperkuat kedzaliman, dimana akuntansi menjadi alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter bertujuan untuk memperkuat sistem kapitalis

Dalam tatanan masyarakat Islam dan pajak sesuai dengan konsep Islam akuntansi pun harus diterjemahkan berdasarkan filosofi hidup umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga ketika terpenuhi syarat untuk pemungutan pajak *dharibah* dalam dunia Islam, maka akuntansi sebagai alat keuangan dalam muamalah tersebut menjadi suatu keharusan.

Proses penafsiran ajaran Islam ke dalam sistem perpajakan hingga melahirkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan semangat Islam merupakan bagian dari kebutuhan dunia muslim. Akuntansi Islam dalam perpajakan mencerminkan perpajakan yang sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki Islam. Dengan demikian akuntansi dalam perpajakan menjadi alat untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semangat Islam.

Inilah yang diungkapkan Hayashi (1995) bahwa peran akuntan (*mutasahib*) di masyarakat Islam tidak hanya sekadar melakukan praktik pencatatan, melainkan bagaimana ia dapat memastikan berjalannya prosedur institusi yang jujur, adil sesuai syariah, disamping memastikan ada tidaknya penimbunan dan penyimpangan yang terjadi (Harahap, 2004: 8). Dengan demikian terdapat keselarasan tujuan antara Islam dan akuntansi (Harahap, 2004: 117-122), yakni berperan dalam menjaga kebenaran dan keadilan<sup>109</sup>, kepastian dan keterbukaan<sup>110</sup> serta kejujuran<sup>111</sup>. Keselarasan antara pajak syariah dengan akuntansi dapat ditarik bahwa dengan hadirnya akuntansi dalam perpajakan Islam sebagai alat untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan. Islam sebagai sebuah ideologi melalui perintah pencatatannya secara normatif

---

<sup>109</sup> QS. AL Zalzalah [99]: 7-8.

<sup>110</sup> QS. Al Hujuraat [49]: 6.

<sup>111</sup> QS. Al Isra [7]: 35.

berperan dalam menciptakan rekonstruksi tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai ajarannya yang terintegrasi dengan kehidupan holistik.

### 5.5.3 Sistem Audit dalam Pajak Islam.

Pajak dalam Islam sebagai salah satu alternatif sumber keuangan untuk pemenuhan kemaslahatan dalam kondisi darurat membutuhkan sebuah sistem akuntansi untuk pencatatan, pengawasan, pertanggung jawaban dan pelaporan.<sup>112</sup> Islam menuntut seorang penguasa untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara moral, mencari penghasilan melalui cara-cara yang adil, professional, amanah, dan memperhatikan rambu-rambu syariah serta memandang kekayaan sebagai titipan yang akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt pada hari kiamat. Olehnya Akuntansi yang lebih teliti diperlukan dalam hal perpajakan karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan.<sup>113</sup>

Pada hakikatnya uang publik adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban, pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pertanggung jawaban pada hari kiamat. Maka diperlukan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pajak berjalan diatas koridor syariah.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hubungan muamalah antara pemerintah dan rakyat memerlukan pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain. Dalam Islam sejak munculnya telah ada perintah melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang melakukan muamalah. Menurut Harahap, Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi.

<sup>113</sup> Uang pajak yang disetorkan tersebut hakikatnya milik Allah yang diwakilkan kepada para pejabat untuk digunakan dalam kemaslahatan. Untuk penyimpanan, penjagaan, pengawasan dan pembagian maka perlu sistem pencatatan, sistem pertanggungjawaban dan sistem pelaporan.

<sup>114</sup> Sistem pengawasan keuangan sendiri telah ada dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah dan khalifanya. Dalam buku *Ekonomi Islam* yang disusun oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam disebutkan bahwa lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah

Para intelektual memandang bahwa pengawasan harta dalam aturan Islam mempunyai peran yang sangat penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber keuangan negara dan menjagannya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber keuangan negara (baitul mal), melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluaran yang sesuai dengan kaidah syariah.

Al-Haritsi dalam bukunya *Fiqih ekonomi Umar bin Khattab* mengatakan, pengawasan harta dalam aturan Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum. Yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam pengumpulan atau pengeluarannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Lebih lanjut ia mengatakan kedekatan pengertian tidak berarti kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar akidah dan akhlak yang bersumber darinya.

Hadirnya akuntansi dalam perpajakan menjadi perwujudan dari perintah Allah untuk melakukan pencatatan.<sup>115</sup> Proses akuntansi dalam Islam memiliki satu tujuan yaitu harus mematuhi prinsip Islam, maka dengan adanya

---

adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sebagai sebuah alat keuangan telah ada di zaman nabi Muhammad. Bukan hanya soal pencatatan keuangan tersebut. Masalah pengawasan (audit akuntansi) juga telah diterapkan. Rasulullah mengangkat salah seorang sahabat untuk menjadi pengelola (penulis) dan juga mengangkat sahabat yang lain untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pendapatan-pendapatan negara. Namun sebagai suatu disiplin ilmu tidak lepas dari dinamika zaman, akuntansi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan tingkat kebutuhan.

<sup>115</sup>Al-Quran mengakui pentingnya membuat catatan sebagaimana diatur dalam surah al-baqarah 282 dan QS. Asysyuraa'[26]: 182-183

pengawasan melalui proses audit akuntansi dapat memperkuat kesesuaian antara pajak dengan semangat Islam. Baik pengawasan untuk memastikan baiknya sumber pendapatan pajak, penggunaan uang pajak dan etika pengelola pajak. Dengan demikian akuntansi melalui audit keuangan negara memiliki posisi yang penting dalam menjaga arah pembangunan suatu bangsa dan dalam menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang ada saat ini dipahami berbeda dengan konsep pajak yang ada dalam Islam, hal ini karena pajak mengalami perubahan konsep dari masa ke masa yang sesuai dengan perkembangan negara dan masyarakat baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.
2. Konsep pajak yang sama dengan konsep pajak modern tidak ditemukan dalam Islam akan tetapi realitas yang paling dekat dengan konsep pajak yang ada saat ini lebih dekat pada konsep *dharibah* (pungutan dalam perang) yang ditarik dalam kondisi tertentu dalam Islam. Kedekatan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsur pajak, objek pajak dan hakikat keberadaan pungutan pajak.
3. *Dharibah* sebagai pungutan yang menjadi sumber penerimaan negara terdapat dalam Islam namun keberadaanya bukan karena adanya *nash* Alquran dan Hadist secara langsung melainkan karena *ijma* ulama untuk pemenuhan kemaslahatan.
4. Konsep *dharibah* berbeda dengan pajak (*tax*) dalam ekonomi konvensional, yang mana tujuan dari kebijakan pajak dalam Islam sesungguhnya hanya sebagai salah satu sumber pendanaan (*budgeter*) sementara (situasional) jika keadaan kas negara tidak mencukupi untuk merealisasikan kehidupan yang aman sebab ketiadaan kas akan

mengancam kestabilan pemerintahan yang akan berujung pada tidak terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Adapun di Dunia Muslim, pajak mengalami perubahan makna setelah banyak negara Islam menjadi wilayah koloni Barat yang mau tidak mau harus menerima pemberlakuan sistem ekonomi kapitalis dan secara tidak langsung mendorong negara-negara Islam semakin cenderung sekuler. Batasan pemaknaan pajak mengalami perubahan seiring perubahan bentuk konsep negara, hingga pajak menjadi sebuah istilah umum untuk menggambarkan sebuah pungutan yang ditarik dari rakyat (warga negara) kepada pemerintah tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.

5. Terdapat dua pandangan tajam atas pajak di negeri muslim antara pandangan yang setuju dan pandangan yang menolak pajak sebagai pendapatan negara. Landasan intelektual muslim yang setuju dengan adanya pajak (*dharibah*) dalam penyelenggaraan negara didasarkan pada konsep kemaslahatan meskipun demikian intelektual muslim yang setuju dengan pajak, tidak memandang bahwa pajak dapat ditarik oleh pemerintah dengan sewenang-wenang tanpa rambu-rambu *syariah*. Sementara intelektual muslim yang menolak keberadaan pajak sebagai sebuah pendapatan negara di negeri muslim didasarkan pada pertimbangan bahwa: (1) Kewajiban pajak tidak memiliki dalil syariah secara langsung sementara berkenaan dengan harta, Islam memiliki konsep penghormatan hak kepemilikan individu yang mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi. Dalam hal keuangan negara, pemerintah sebagai pelaksana tidak sepatutnya menarik sumber pendapatan negara dari rakyat kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kewajiban yakni zakat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah

seharusnya mencukupkan sumber-sumber pendapatan dari apa yang diarahkan oleh syariah, minimal tidak bertentangan dengan syariah. (2) Adanya dalil yang bisa disetarakan dengan pungutan jahiliyah yang mencela *makis* yaitu pemungut cukai/pajak jalanan. (3) Kondisi di negeri muslim tidak dalam keadaan darurat. Intelektual muslim yang tidak setuju dengan pajak di negeri muslim memandang bahwa jika pun pajak dibolehkan dalam kondisi tertentu dalam hal ini darurat, maka negeri muslim saat ini tidak bisa digeneralisir dalam keadaan demikian, sebab kekayaan alam negeri muslim sangat banyak. Sehingga pajak tidak memiliki alasan untuk dipungut dalam keadaan darurat di negeri muslim.

6. Pandangan intelektual muslim yang setuju dengan pajak dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima dalam Islam sesuai dengan misi *rahmatan lil alamin* yang dibawa. Dimana seorang penguasa memiliki hak untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan kemaslahatan sehingga jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*). Pajak yang diwajibkan oleh penguasa karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa sementara perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian penetapan pajak atas orang-orang kaya dapat diterima dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah "*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a'laahuma*" (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar). Namun kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dalam legalitas pajak modern ditentang oleh sebagian intelektual muslim yang



lain, hal ini karena kekosongan kas atau kelemahan keuangan negara yang terjadi disebabkan minimnya peran pemerintah dalam mengusahakan atau bekerja mendapatkan sumber kekayaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di negeri muslim. Dengan demikian keadaan tersebut tidak dapat dikatakan darurat sehingga jika pajak dibebankan dalam kondisi demikian maka pungutan tersebut telah diambil secara tidak wajar dan dzalim, yang tidak lain merupakan bentuk penyitaan sejumlah harta dari seorang muslim. Hal ini menyelisihi prinsip umum *syari'at* Islam yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta adalah haram diganggu berdasarkan beberapa dalil dalam Islam. Kedzaliman tersebut termasuk dalam firman Allah yang sebagai bentuk perbuatan melampaui batas di muka bumi tanpa hak<sup>116</sup>.

Selain itu berbagai jenis pajak yang memberatkan dan konsep negara yang tidak dapat memastikan penggunaan uang pajak menjadi penguat bagi sebagian intelektual muslim untuk menolak pajak sebagai pendapatan negara. Konsep negara yang tidak dapat memastikan penggunaan uang pajak dalam hal ini adalah sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan *syariah* seperti memperoleh dan menggunakan uang pajak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam. Sehingga pandangan intelektual muslim yang setuju dengan dharibah hanya pada pungutan yang betul-betul sesuai dan sejalan dengan syariat Islam sementara pandangan intelektual muslim yang tidak setuju dengan pajak hanya pada konsep pajak modern yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

---

<sup>116</sup> QS Asy- Syura ayat 4

7. Sistem ekonomi kapitalis sebagai turunan dari paham sekularisme mempunyai pengaruh atas konsep pajak yang berkembang di negeri-negeri muslim. Minimnya peran pemerintah dalam konsep kapitalis telah menjadikan negara menyerahkan sistem ekonomi kepada sistem pasar sehingga pengelolaan kekayaan alam diberikan kepada pemodal (pihak kapitalis) yang selanjutnya negara mendapatkan bagian berupa pajak dengan pajak adopsi konsep kapitalis disisi lain akibat dari paham kapitalis, aspek zakat sebagai kewajiban bagi kaum muslim ditiadakan dalam negara seiring dengan semakin menguatnya konsep kebangsaan yang didukung dengan dominasi dan hegemoni Barat.
8. Konsep *dharibah* dalam Islam dapat dijadikan sebagai sarana ibadah (jihad harta) jika dapat dipastikan bahwa pungutan tersebut ditarik dan digunakan untuk mengikuti aturan Islam yakni untuk kemaslahatan. Sebagai sebuah pendapatan yang dibuat untuk pemenuhan kemaslahatan memerlukan sebuah sistem pencatatan (akuntansi). Sistem pencatatan dalam *dharibah* mencerminkan pungutan yang sesuai kemaslahatan yang dikehendaki Islam. Dengan demikian akuntansi dalam perpajakan yang sesuai dengan Islam menjadi alat untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semangat Islam.

## 6.2 Saran

Penelitian ini masih merupakan dasar untuk memahami perpajakan dalam Islam berdasarkan pandangan intelektual muslim. Oleh karenanya pengembangan dan peninjauan ulang secara kritis masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan pengkonstruksian sebuah teori. Adapun hasil pembahasan yang telah disajikan oleh penulis menunjukkan bahwa konsep

pajak yang ada dalam Islam berbeda dengan konsep pajak modern yang ada di negeri-negeri muslim oleh karena itu harus dilakukan kajian yang mendalam untuk memastikan kesesuaian pajak dengan syariah sebelum diperbolehkan (diundangkan) dan lembaga fatwa seperti MUI memiliki tanggung jawab dalam hal ini untuk melakukan ijthad kolektif atas keberadaan pajak di negeri muslim mengenai kesesuaiannya dengan nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan tahun 2010. Departemen Agama Republik Indonesia
- A.Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad, Agustan. 2011. Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi dan Aktualisasinya dalam Nilai-Nilai Falsafah Pancasila. *Jurnal Hunafa Studi Islamika*, (Online), Vol. 8, No.2, (<https://www.jurnalhunafa.org> diakses 5 Mei 2015)
- Ali, Abu Ibrahim Muhammad. Mei 08, 2008. *Pajak dalam Islam*. (online), ([www.almanhaj.or.id](http://www.almanhaj.or.id)), Diakses 16 Oktober 2014.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Eds terj. Oleh H Asmuni Solihan Zamakhshari. Jakarta: Khalifah)
- Al-Khail, Sulaiman Bin Abdullah Hamid. 2011. *Inilah Islam: Sumber, Karakteristik & Keistimewaannya*. Bekasi: Sukses Publisng.
- Al-Muslih, Abdullah dan ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Usairy, Ahmad. 2003. *Sejarah Islam*. penerjemah: Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (terj). Surabaya: Risalah Gusti
- An-Najah, Ahmad Zain. 2010. *Pajak Hari Ini Bertentangan dengan Islam*. (Online) ([www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com) diakses 01 November 2014)
- Arif, M. Nur Rianto Al. 2013. Fungsional Zakat dan Pajak dalam Perekonomian, *Jurnal Ekonomi Islam, FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka*, (Online), Volume 3, Nomor 1, (<https://www.academia.edu> diakses 10 Mei 2015)
- Arif, Syamsuddin. 2007. *Intelektual dan Intelektualisme: Perspektif Barat dan Islam*. Makalah disampaikan dalam sebuah diskusi di Kuala Lumpur. (Online), ([www.insistnet.com](http://www.insistnet.com) diakses 22 Oktober 2014)
- As-Sholih, Muhammad Bin Ahmad. 2002. *Manajemen Islami: Harta Kekayaan*. Solo: Era Intermedia.

- Astrini, Nur Avia. 2012. *Studi Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- At-Tuwaijry, Muhammad bin Abdullah. 2007. *Makna Islam dan Iman*. Islamhouse.
- Athoillah, M. Anton dan Q-Anees, Bambang. 2013. *Filsafat Ekonomi Islam*. Penerbit Sahifa
- Asyaitibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. 2006. *Al I'tisham*. Jakarta; Pustaka Azzam, Penerjemah Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur
- Ba'abduh, Abu Abdillah Luqman. November 15, 2011. *Khalifah diatas Manhaj Nubuawah*. (online). [www.asysyariah.com](http://www.asysyariah.com) Diakses 15 Maret 2014
- Basri, Faisal. 2009. *Catatan Satu Dekade Krisis : Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia*. Esensi Penerbit Erlangga
- Bohari, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chalil, Zaki Fuad . 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonimi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam* Jakarta: Gema Insani Press.
- Daftary, Farhad. 2002. *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'anulkarim*. Syaamil Cipta Media
- Fadillah, Andi Annisa. 2010. *Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Bosowa Maros*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Fahmy, Hamid. Februari 12, 2013. *Pandangan Hidup Islam (Islamic Worldview)*. (Online), [www.hamidfahmy.com](http://www.hamidfahmy.com) diakses 22 Maret 2014.
- Fahmy, Hamid. Desember 03, 2012. *Pembebasan Nusantara*. (online). Dalam [www.hamidfahmy.com](http://www.hamidfahmy.com) diakses 22 Maret 2014.
- Farkus, Muhammad 'Ali. Jumadi al-Awwal 12, 1417 H. *Pajak dalam Islam. Penerjemah Muhammad Nur Ichwan Muslim*. (online), ([www.muslim.or.id](http://www.muslim.or.id)), Diakses 02 Februari 2014.

- Fawaz, Muhammad Washito Abu. September 17, 2011. *Hukum Pajak dalam Fiqih Islam*.(Online), (<http://abufawaz.wordpress.com>), Diakses 02 Februari 2014.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo
- Hafidudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1.
- Hakim, Rahmad. 2011. *Zakat dan Pajak dalam Islam*. Negeri Sembilan: Faculty of Economics and Muamalat and Faculty of Syari'ah and Law Islamic Science University of Malaysia, (Online), (<http://mizaninstitute.com/zakat-dan-pajak-dalam-islam> diakses 10 Oktober 2014).
- Haliding, Safri. 2013. Zakat dalam Kebijakan Fiskal. (Online), dalam (<http://www.unismuh.ac.id/> diakses 29 April 2015)
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Askara
- Hasib, Kholili. Juli 02, 2012. *Worldview Islam sebagai Dasar Pendidikan Karakter*. (Online). Dalam [www.inpasonline.com](http://www.inpasonline.com) diakses 22 Maret 2014.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Husain, Safarni. 2010. Zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, *Jurnal Risalah Hukum fakultas Hukum Unmul*, (Online), Vol. 6, No.1. (<http://risalah.fhunmul.ac.id> diakses 10 Mei 2015)
- Idris, 2013. *Analisis Dampak Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Sector Riil Dan Sector Investasi Dalam Perspektif Syariah*, Desertasi tidak diterbitkan, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Aluaddin.
- Ilyas, Wirawan dan Richard, Burton. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Indayani, Haniyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Publik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Irkhami, Nafis. 2010. *Kuangan Publik Islam*.(Online), (<http://nafis.staff.iainsalatiga.ac.id/> diakses 2 Juni 2015)
- Islahi, A. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

- Isri, Saifullah. *Nilai-nilai Pendidikan dalam Pajak*. (Online), dalam (<http://saifullahisri.org/nilai-nilai-pendidikan-dalam-pajak/> diakses 3 Juni 2015)
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qodir. 2010. *Prinsip Dasar Islam*. Cet.ke-8. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Kania, Dinar Dewi. September 13, 2013. *Epistemologi Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. (online). Dalam [www.inpasonline.com](http://www.inpasonline.com) diakses 21 Maret 2014.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adiwarman Azwar. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Garfindo
- Khalafallah, Muhammad Ahmad. 2008. *Masyarakat Muslim Ideal*. Yogyakarta:Insan Madani.
- Kurniawan, Andry . 2009. *Praktek pemungutan pajak pertambahan nilai dalam perspektif hukum islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta (Online) (<http://repository.uinjkt.ac.id> diakses 10 Mei 2015)
- Latif, Yudi. 2012. *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, Jakarta: Democracy Project.
- Madaniy, A.Malik. 1994. Pajak dalam Perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Al-Jami'ah*, (Online) No. 56, (<http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses 7 Mei 2015)
- Mahmudah, Siti. 2011. Rekonstruksi Syari'at Islam (Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal)*Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Online) Vol. 45 No. II, (<http://asy-syirah.uin-suka.com> diakses 5 Mei 2015)
- Majalah Qiblati edisi 08 thn VI/ Mei 2011, kolom Dakwah, *Negara Islam*.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M.Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mugist, Abdul. 2003. Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam (Kajian atas pemikiran M.Abdul Mannan dalam Teori dan praktek Ekonomi Islam). *Jurnal Hermeneia jurnal kajian islam interdisipliner*. (Online) vol.2 No.2. (<http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses 10 April 2015)
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam*. Jakarta: Salemba Empat

- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada..
- Munandar, Aris. 2010. *Hukum Kerja di Kantor Pajak*. (Online) dalam [www.ustadzaris.com](http://www.ustadzaris.com) diakses 14 April 2015
- Nasution, Edwin Mustafa dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan ke-2, Malang: Bayu Media Publishing.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*. 2013. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014*. 2014. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Perkins, John. 2007. *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*. Jakarta: Ufuk Press
- Phonna, Andri Suryadi. 2012. *Riba, Bunga dan Bagi Hasil dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. ANDI: Yogyakarta.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2008. *Khutbah Jumat Ekonomi Syariah*, versi e-book. Jakarta: pkes publishing.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islams*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putro, Bambang Dharwiyanto. 2000. *Peranan Elite Intelektual dalam Dinamika Masyarakat antara Harapan dan Kenyataan*. Jurnal Humaniora UGM Volume XII No.2
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. Cet 10.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.



- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin ekonomi Islam jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Rahmat Abd. 2014. *Keuangan Negara Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparasi Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah Karya Al Mawardi Dan Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Karya Abu Ya'la)* Desertasi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rohmanto, Bayu. 2008. *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Negara*. Skripsi. Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Samuddin, Rapung dan Muhammad Ashri. 2013. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. PT. Gramedia pustaka utama.
- Saragih, Khairul Azhar. 2010. *Pandangan Ali Syara'ati Tentang Tanggung Jawab Sosial Intelektual Muslim (Perbandingan dengan Intelektual Muslim Indonesia)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Satria, Hariqo Wibawa. 2009. *Pemikiran Lafran Pane Tentang Intelektual Muslim Indonesia*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Setiawan, Deny. 2010. *Prepestif Islam Mengenai Pajak Suatu Studi Pendahuluan*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun 1
- Sudarsono, Heri. 2003. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto, Muhammad. 2007. *Pendapatan Primer Keuangan Negara pada Priode Awal Islam*. (online) dalam <http://journal.amikom.ac.id/index.php/Koma/article/view/1396> diakses 20 November 2014
- Tirmizi, Erwandi, 2014. *Pembahasan Pajak*. (Online) dalam [www.erwanditirmizi.com](http://www.erwanditirmizi.com) diakses 20 November 2014
- Ulum, Bahrul. Desember 12, 2013. *Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas*.(Online) Dalam [www.inpasonline.com](http://www.inpasonline.com) diakses 22 Maret 2014
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta
- Widyaresmi, Sistha. 2012. *Timur yang Menjadi Barat : Orientalisme dalam Ranah Diskurif*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- Winarto, Joko. 2011. *Tugas dan Tanggung Jawab Ilmuan*. (Online) <http://filsafat.kompasiana.com/2011/05/29/tugas-dan-tanggung-jawab-ilmuan-368478.html> diakses 13 Nopember 2014
- Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhwah*. Bandung: Mizan.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Pandangan Hidup dan Tradisi Intelektual Islam (Eksposisi awal framework pemikiran Islam)*. (online), dalam [www.insistnet.com](http://www.insistnet.com) diakses 24 Maret 2014
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. November 5, 2013. *Pembebasan Nusantara*.(online) Dalam [www.miumipusat.org](http://www.miumipusat.org) diakses 24 Maret 2014.
- Zein, Fadil. Desember 12, 2013. *Hipotesa Media Mainstream & Umat Islam*. (online). Dalam [www.miumipusat.org](http://www.miumipusat.org) diakses 18 Maret 2014.

## BIODATA

### Identitas Diri

Nama : Muhammad Anwar Alimuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Labakkang, 08 September 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Jln. Dr. Sam Ratulangi No.81A  
Telpon Rumah dan HP : 085 255 65 95 03  
Alamat *E-mail* : [anwarmuhammad91@gmail.com](mailto:anwarmuhammad91@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal : SDN 10 Lembang Kab. Pangkajene Kepulauan  
SMPN 1 Bungoro Kab. Pangkajene Kepulauan  
SMKN 1 Bungoro Kab. Pangkajene Kepulauan
- Pendidikan Nonformal : Basic Malino English Village

### Pengalaman

- Organisasi : UKM LDK MPM UNHAS  
FOSEI UNHAS  
KM-MDI Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS
- Kerja : Staf Keuangan PPMI Shohwatul Is'ad  
Staf Keuangan PT. Nurismu Tour & Travel  
Staf Keuangan PT. BMC Authorized Money  
Changer

Demikianlah biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 30 November 2015

Muhammad Anwar